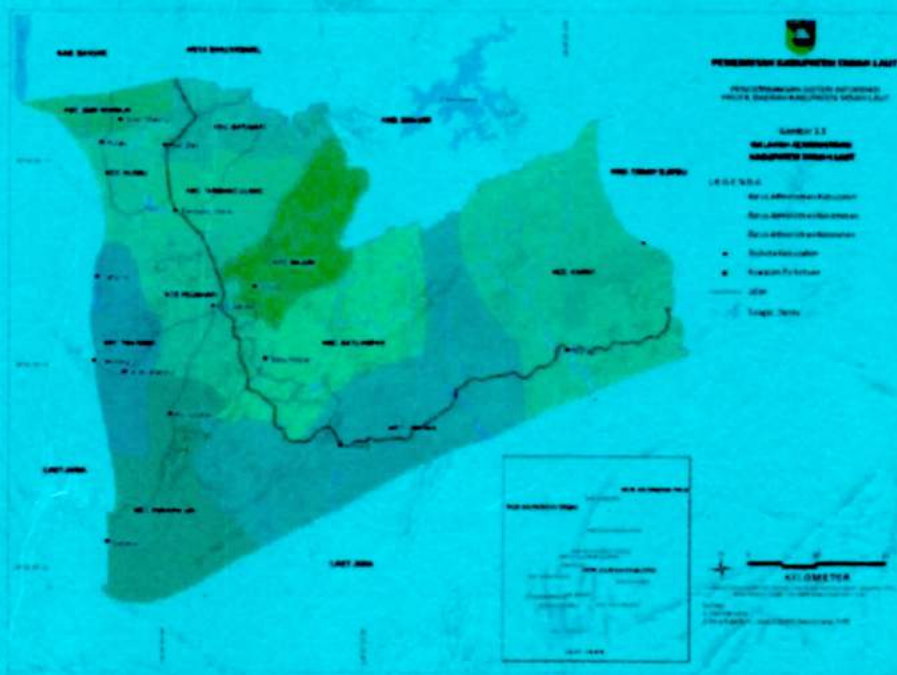


**LAPORAN**  
**KAJIAN POTENSI INVESTASI UNGGULAN**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**  
**TAHUN 2019**



**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU (DPM & PTSP) KABUPATEN TANAH LAUT  
DENGAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
(LPPM)  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**JULI, 2019**



## REKAPITULASI HASIL PENELITIAN

---

1. Judul Penelitian : Kajian Potensi Investasi Unggulan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019
2. Organisasi : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Kabupaten Tanah Laut
3. Ketua Tim Kajian : Dr. Syaiful Hifni, Drs. Ec. M.Si, Ak, CA
4. Anggota Tim Kajian : Drs. Ec. H. Akhmad Sayudi, M.Si, Ak, CA  
Chairul Sa'roni, SE, M.Si  
Dr. H. Ichsan Anwary, SH, MH
5. Olah Data : Wawan Gustiawan, SE  
Dheo Tegar Pratama, S.ST
6. Jangka waktu : 150 (seratus lima puluh) hari
7. Sumber Dana : APBD- DPM & PTSP TA 2019
8. Dana Penelitian : Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)
9. Lokasi Penelitian : Kabupaten Tanah Laut

Banjarmasin, Juli 2019  
Ketua Tim Kajian



Dr. Syaiful Hifni, Drs. Ec. M.Si, Ak, CA  
NIP 1963 09 04 199003 1003

Mengetahui,  
Plt-Ketua  
LPPM ULM



Dr. Deila Ariyani Sofia, S.Pi, M.P  
NIP 197304281998032002

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia Nya, sehingga telah dapat diselesaikan Kerjasama Penyusunan Kajian Potensi Investasi Unggulan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019. Kajian ini dilaksanakan sesuai dasar Kerjasama Nota Kesepakatan antara DPMPTSP dengan LPPM ULM (Nomor 415.4/01/DPMPTSP/2019 dan Nomor 08.1/UN8.2/PP/2019), yang dijabarkan dalam ToR dan SPK, serta atas dasar Surat Kepala Dinas PM & PTSP Kabupaten Tanah Laut (Nomor 800/119/DPMPTSP/2019, tertanggal 19 Pebruari 2019).

Kajian ini sesuai tujuannya, diharapkan berguna bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan keputusan manajemen investasi daerah secara akuntabel dan transparan. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui leading sector dan SKPD dalam manajemen investasi daerah dengan pendekatan "filtering" dan "priority" untuk pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi daerah, sesuai Visi dan Misi Pembangunan "BERINTERAKSI" Tahun 2018-2023

Demikian disampaikan dan terima kasih atas kerjasama yang telah dilaksanakan dengan LPPM ULM.

Banjarmasin, Juli 2019  
Ketua Tim Penyusun Kajian  
LPPM-ULM



Dr. Syaiful Hifni, Drs.Ec. M.Si, Ak  
NIP 1963 0904 1990 03 1003

Mengetahui,  
Plt-Ketua  
LPPM ULM



Dr. Della Ariyani/Sofia, S.Pi, M.P  
NIP 197304281998032002

## PRAKATA

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Melalui Leading Sektor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berdasarkan hasil kajian dari LPPM ULM Tahun 2019, menyajikan informasi yang mendasar dan relevan terkait upaya meningkatkan dukungan investasi, dan akses terhadap sumber daya daerah. Dokumen ini memberikan informasi penting tentang distribusi komoditi, dan peluang investasi pada lingkup geografis di Kabupaten Tanah Laut. Tersedianya informasi potensi sumber daya daerah untuk investasi bagi PMDN, PMA serta melalui Belanja Modal setiap SKPD pada sektor pembangunan. Pembangunan melalui investasi terkait dengan penyajian Komoditi Produk Jenis Usaha (KPJU) Potensial dan KPJU Unggulan Kabupaten Tanah Laut mengacu pada posisi LQ dari KPJU. Keberlanjutan investasi secara efektif serta terkontrol menjadi tujuan dari penyajian informasi dari potensi investasi unggulan. Manajemen investasi daerah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi. Hal ini diharapkan dapat membantu upaya peningkatan pendapatan daerah dan pertumbuhan sector pembangunan secara berkelanjutan sesuai Visi dan Misi Pembangunan Tanah Laut 2018-2023, yaitu Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi (BERINTERAKSI).

Laporan Penyusunan kajian Potensi Investasi Unggulan Daerah Kabupaten Tanah Laut ini menyajikan informasi mengenai KPJU potensial, dan unggulan, serta peluang investasi di Kabupaten Tanah Laut. Laporan ini juga secara rinci dapat ditelusuri melalui potensi dan peluang investasi sesuai lokasi Kecamatan-Desa. Di samping itu, isi laporan ini juga akan digunakan sebagai pemenuhan "*Data base management systems*" yang dijadikan sebagai isi informasi investasi Kabupaten Tanah Laut pada aplikasi "SIPID" BKPM. Dokumen laporan ini diharapkan berguna bagi para pihak yang berkepentingan dalam memperoleh informasi yang komprehensif mengenai potensi dan peluang investasi di Kabupaten Tanah Laut.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat berperan dalam penyusunan laporan ini.

Pelaihari, Juli 2019  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kabupaten Tanah Laut  
Plt

Drs. Joko Wuryanto, M.Si  
NIP. 196501161992031008

## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL .....	i
REKAPITULASI HASIL PENELITIAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
PRAKATA .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vi
<b>BAGIAN 1. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan dan Saran .....	3
1.3. Output dan Outcomes Kegiatan.....	3
1.4. Ruang Lingkup Kegiatan .....	4
<b>BAGIAN 2. GAMBARAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT</b>	
2.1. Aspek Geografis Dan Demografi .....	6
2.2. Penduduk dan Tenaga Kerja .....	14
2.3. Perekonomian Daerah .....	19
2.4. Infrastruktur Wilayah .....	25
<b>BAGIAN 3. METODE KAJIAN</b>	
3.1. Tipe Penelitian .....	32
3.2. Metode Kajian Penelitian/Kajian.. ..	32
3.3. Lokasi Penelitian .....	32
3.4. Objek /Aspek Kajian /Penelitian .....	32
3.5. Instrumen Penelitian .....	34
3.6. Metode Pengumpulan Data .....	34
3.7. Metode dan Teknik Analisis Data .....	35
3.8. Pendekatan Pelaksanaan Kajian .....	35
3.9. Metode Pelaksanaan : Pelaporan .....	40
<b>BAGIAN 4. PETA POTENSI DAN PELUANG INVESTASI</b>	
4.1. Deskripsi Potensi Sektoral / KPJU Daerah.....	44
4.2. Manajemen Investasi : Peran Pemerintah.....	45
4.3. Deskripsi Layanan Usaha.....	54
4.4. Tujuan Pembangunan Industri .....	71
4.5. Daya Dukung Untuk Sektoral -KPJU .....	90
4.6. Assessment : Identifikasi Komoditi /Produk/Jenis Usaha (KPJU) .....	96
4.7. Deskripsi KPJU Unggulan Kabupaten Tanah Laut .....	101
4.8. Analisis Potensi, Unggulan, Prioritas, Dan Peluang Investasi Daerah.....	111
4.9. KPJU untuk Potential Investment / Prioritas Investasi dan Slap Ditawarkan .....	115
4.10. KPJU Tidak Siap Ditawarkan .....	121
4.11. Deskripsi Manajemen Investasi : Data Eksisting Dan Rencana Data Perencanaan .....	122
4.12. Fasilitasi Manajemen Investasi Tanah Laut.....	133
<b>BAGIAN 5 PENUTUP</b>	
5.1. Kesimpulan.....	135
5.2. Saran dan Implikasi .....	136
5.3. Daftar Referensi .....	141

LAMPIRAN-LAMPIRAN POTENSI DAN PELUANG INVESTASI

<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>Halaman</b>
2.1. Luas Wilayah Kecamatan Jumlah Desa/Kelurahan.....	9
2.2. <i>(Man Power Indicator Tanah Laut Regency) 2010-2015</i> .....	18
2.3. PDRB Kabupaten Tanah Laut (2008 -2013).....	20
2.4. PDRB Kabupaten Tanah Laut (2014 – 2017).....	24
2.5. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut Periode Tahun 2014-2017 24	
2.6. Jarak Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten Tanah Laut.....	26
3.1. Topik, Responden dan Sasaran Data atau Informasi.....	33
3.2. Kerangka Pikir Kegiatan Pemetaan Investasi Dacrah.....	38
4.1. Layanan Sesuai Lapangan Usaha.....	44
4.2. Entitas SKPD : Fungsi dan Peran Investasi dan Keuangan Daerah Tala.....	50
4.3. Pengembangan Investasi Daerah Sesuai Kawasan Pembangunan Lokasi Administrasi Kecamatan Kabupaten Tanah Laut.....	52
4.4. Jenis Tanaman Pangan : Padi dan Palawija (Produksi/Ton).....	55
4.5. Jenis Tanaman :Buah-Buahan.....	55
4.6. Jenis Tanaman :Sayur-Sayuran.....	56
4.7. Perkebunan.....	56
4.8. Deskripsi Perusahaan Karet.....	57
4.9. Perusaha Swasta Kelapa Sawit.....	57
4.10. Luas Dan Produksi Tanaman Kelapa Sawit.....	58
4.11. Luas dan produksi Tanaman Karet.....	58
4.12. Populasi Ternak Ruminansia.....	58
4.13. Populasi Ternak Unggas.....	59
4.14. Produksi Ikan Laut.....	59
4.15. Perizinan Pertambangan.....	61
4.16. Produksi Bahan Tambang Menurut Jenisnya 2013-2015.....	62
4.17. Sektoral Industri Pengolahan.....	62
4.18. Karakteristik untuk Pengembangan Investasi "KPJU: Agro Industri".....	70
4.19. Klasifikasi dan Aspek Industri: Daya Tarik Investasi.....	72
4.20. Tingkatan Pertumbuhan Lingkungan Industri.....	72
4.21. Regional Pusat Pertumbuhan (Industri) di Indonesia.....	73
4.22. Potensi Daerah otonom sebagai <i>Hinterland</i> Sumber Daya –Sektoral KPJU Bagi Daerah Lainnya.....	74
4.23. Aspek-Aspek Daya Saing Daerah.....	75
4.24. Sasaran Pembangunan Pariwisata Nasional.....	83
4.25. Tujuan Strategis Pembangunan Pariwisata Tahun 2015 – 2019.....	83
4.26. Jenis pelayanan yang diselenggarakan Dinas Pariwisata Tala.....	85
4.27. Potensi BUMDesa Kabupaten Tanah Laut Per Agustus 2018.....	88
4.28. Luas Daerah Menurut Desa Di Kecamatan Jorong.....	95
4.29. Bobot Kepentingan Tujuan Penetapan KPJU Unggulan.....	96
4.30. Bobot Setiap Sektor sesuai Capaian KPJU- Kabupaten Tanah Laut.....	101
4.31. Kriteria Kelayakan Strategi Investasi untuk Program/Kegiatan.....	107
4.32. Kriteria Kinerja untuk Pilihan Strategi Program Pengembangan KPJU/Sektoral.....	108
4.33. LQ Kabupaten Tanah Laut.....	110
4.34. KPJU Potensial Kabupaten Tanah Laut (Dasar LQ dan AHP).....	112
4.35. KPJU Unggulan Kabupaten Tanah Laut (Dasar LQ dan AHP).....	113
4.36. List KPJU Unggulan/Sektor Usaha Kabupaten Tanah Laut.....	115
4.37. Pertambangan.....	121
4.38. Daftar PMDN di Kabupaten Tanah Laut.....	122
4.39. Daftar PMA di Kabupaten Tanah Laut.....	124

## DAFTAR GAMBAR

## Halaman

1.1.	Kerangka Pikir Penyusunan Dokumen RUPM Kabupaten Tanah Laut 2017-2025	5
2.1.	Peta Wilayah Kabupaten Tanah Laut	7
2.2.	Persentase Kemiringan Lahan Beserta Luasnya	11
2.3.	Persentase Tinggi Permukaan Laut	11
2.4.	Persentase Lahan Hutan	12
2.5.	Fisiografi Lahan Kering di Kabupaten Tanah Laut	13
3.1.	Alur Aktifitas Penyusunan Kajian	39
4.1.	Kerangka Regulasi	46
4.2.	APBD Sesuai APBN dan Tujuan Pembangunan	48
4.3.	Analisis Masalah ( Problem Analysis)	68
4.4.	Analisis Tujuan	69
4.5.	Lingkup Kawasan Industri Nasional	94
4.6.	Analisis Potensi-KPJU Unggulan	104
4.7.	Potensi dan Prioritas KPJU Unggulan dan Pertumbuhan (Goal/Ends/Sasaran)	105
4.8.	Analisis SWOT KPJU Kabupaten Tanah Laut	110



# BAGIAN I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kemajuan suatu wilayah pembangunan daerah otonom akan sangat ditentukan oleh perencanaan pembangunan yang terpadu. Perencanaan sangat diperlukan terkait proses pembangunan daerah yang melibatkan multi sektor dan pelaku pembangunan, sehingga harus terjalin kerjasama dan koordinasi diantara semua pihak yang berkepentingan. Pemerintah daerah akan bertanggung jawab secara lebih penuh terhadap kebijakan dasar dalam manajemen investasi yang diperlukan bagi pembangunan daerah, termasuk pembangunan sarana dan prasarana. Manajemen investasi dalam pembangunan ekonomi diperlukan dengan kebijakan yang akses terhadap sumber dana, serta kebijakan lingkungan.

Investasi dilakukan juga pada pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) serta pengembangan sumberdaya manusia. Peran ini diambil alih oleh kebijakan kerangka anggaran pemerintah serta kerangka regulasi yang ditetapkan. Secara luas, dalam pembangunan sesuai konsep "*new capitals*" potensi investasi berkaitan dengan pembangunan dalam aspek "capital", yaitu : (i) Keuangan (ii) Sumber daya alam, (iii) Sosial dan relasional, (iv) SDM (human) (v) Manufacturer-teknologi, (vi) Kekayaan intelektual (HaKI). Salah satu informasi dasar yang dibutuhkan untuk meningkatkan dukungan investasi dan akses terhadap sumber dana termasuk bentuk "*new capitals*" lainnya, adalah data spasial (peta) potensi sumber daya daerah, yang memberikan informasi penting tentang distribusi komoditi, luasan wilayah, keunggulan KPJU dan peluang investasi di suatu daerah. Tersedianya informasi potensi sumber daya daerah untuk pengembangan komoditi unggulan daerah akan sangat membantu untuk keputusan investasi (PMA, PMDN), termasuk Belanja modal dan pembiayaan Pemerintah.

Data dan informasi potensi sumber daya daerah Kabupaten Tanah Laut dikemukakan terkait Komoditas produk jasa unggulan (KPJU), dan upaya pengembangan dalam konteks peningkatan investasi di Kabupaten Tanah Laut. Kegiatan manajemen informasi potensi investasi unggulan memerlukan dasar pemenuhan pemetaan daerah-daerah Kecamatan-Desa secara bertingkat. Oleh karena itu perlu dibangun pangkalan data untuk menampung data dan informasi hasil-hasil pemetaan agar replikasi dan duplikasi hasil-hasil pemetaan dapat dipantau, dikembangkan dan dikomunikasikan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu instansi yang berwenang dalam hal perijinan dan penanaman modal daerah memerlukan suatu dokumen yang berisikan peta potensi dan peluang investasi di daerahnya. Hal ini diperlukan guna peningkatan promosi dan kerjasama investasi di Kabupaten Tanah Laut. Kegiatan kajian potensi investasi unggulan di Kabupaten Tanah Laut memberikan gambaran penyebaran komoditi unggulan di Kabupaten Tanah Laut.

Menuju pengembangan investasi di Wilayah Kabupaten Tanah Laut, diperlukan penyajian untuk kajian kelayakan investasi (PMDN, PMA, dan Belanja Modal Pemerintah). Dalam perspektif manajemen investasi, peran PMA dan PMDN berkaitan dengan manfaat ekonomis yang dominan, sementara untuk peran belanja investasi Pemerintah justru akan lebih fokus pada layanan publik. Fungsi dan peran BUMD dapat menjadi bagian dari kebijakan investasi Pemerintah daerah dalam pembangunan dalam menopang PAD.

Manajemen investasi Kabupaten Tanah Laut dikembangkan dengan lingkup potensi investasi dan dan unggulan sektoral /PJU dalam lingkup 11 (sebelas) Kecamatan dengan 130 (seratus tiga puluh) Desa, dan 5 Kelurahan, serta meliputi 1.504 RT. Potensi dan peluang –unggulan investasi hadir dengan daya dukung, dan daya tampung terkait sumber daya ekonomi. Hal ini juga terkait aspek “sosio” dan keberlanjutan sumber daya alam khas Kabupaten Tanah Laut. Sesuai relevansi RPJMD Tanah laut (2013-2018), pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui kebijakan penataan ruang wilayah telah memprioritaskan 5 (lima) kawasan dengan masing-masing fungsi dan potensi strategisnya, yaitu :

1. Kawasan industri dipusatkan di Kecamatan Bati-Bati dan Kecamatan Jorong
2. Kawasan pertanian dipusatkan di Kecamatan Kurau, Kecamatan Bumi Makmur, Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Jorong dan Kecamatan Kintap
3. Kawasan Perikanan dipusatkan di Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Jorong dan Kecamatan Kintap
4. Kawasan pertambangan dipusatkan di Kecamatan Jorong dan Kecamatan Kintap
5. Kawasan wisata dipusatkan di Kecamatan Takisung, Kecamatan Panyipatan, Kecamatan Pelaihari dan Kecamatan Bajuin.

Kawasan pembangunan sesuai RTRW Kabupaten Tanah Laut menjadi dasar dalam kebijakan penanaman modal yang mengacu dan sesuai dengan Visi Pembangunan Tanah Laut (2018-2023).

Kebijakan layanan investasi daerah sesuai visi “BERINTERAKSI” harus dapat meningkatkan kualitas SDM, menumbuhkan industry kreatif, dan bersinergi. Manajemen investasi daerah, penting menjaga eksistensi desa /kelurahan sebagai tempat lokasi fisik sektoral-KPJU terdepan sesuai RTRW di Kabupaten Tanah Laut. Upaya untuk pengembangan jejaring investasi secara internal diperlukan, agar dapat menempuh level jejaring investasi PMA, PMDN, dan belanja modal Pemerintah (Pusat-Provinsi-Kabupaten). Pemenuhan jejaring internal bermakna dipenuhinya syarat pengembangan investasi di daerah dengan investor dan dengan Peran belanja dalam kerangka anggaran pemerintah. Dalam pengembangan jejaring eksternal (PMDN dan PMA), hadir peran pemerintah yang memberikan dukungan dengan kerangka regulasi pemerintah. Secara administratif, keselarasan rencana investasi dengan dokumen Potensi investasi, KPJU/Sektoral unggulan, menjadikan hadirnya peluang investasi yang didukung akuntabilitas, dalam perijinan dan rekomendasi pembangunan.

## **1.2. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dari penyusunan peta potensi dan peluang investasi daerah di Tanah Laut adalah untuk tersedianya informasi potensi dan peluang investasi daerah di Tanah Laut. Sasaran dari penyusunan peta potensi dan peluang investasi daerah di Tanah Laut, antara lain:

1. Tersusunnya peta potensi daerah di Tanah Laut
2. Teridentifikasinya peluang investasi daerah di Tanah Laut
3. Terinformasikannya hasil potensi dan peluang investasi daerah kepada calon investor

## **1.3. Output dan Outcomes Kegiatan**

Output dari penyusunan peta potensi dan peluang investasi daerah di Tanah Laut adalah dokumen dalam sebuah buku tentang potensi dan peluang investasi daerah di Tanah Laut. Outcomes kegiatan sebagai manfaat informasi potensi dan peluang investasi yang meliputi:

1. Kelompok Investasi yang Potensial untuk Dilakukan (*Potential Investment*).
2. Kelompok Investasi yang Prioritas untuk Dilakukan (*Priority Investment*).
3. Kelompok Investasi yang siap Ditawarkan (*Investment Ready for Offer*).

Kegiatan Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah diharapkan dapat memberikan informasi detail tentang “potensi investasi daerah yang tepat dan terkini tentang peluang usaha, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang, dan potensi unggulan lainnya kepada para calon investor baik lokal maupun asing”.

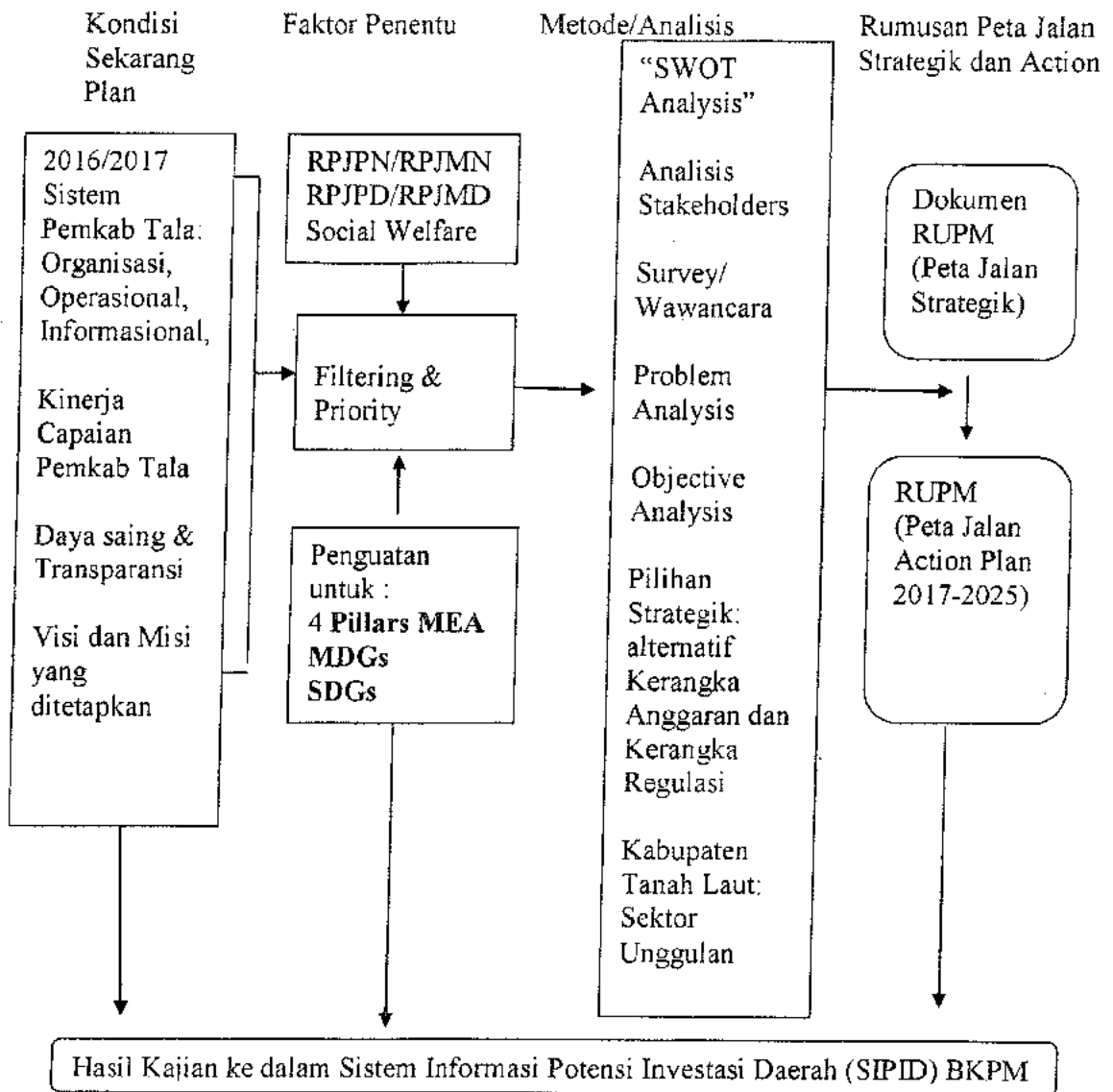
#### **1.4. Ruang Lingkup Kegiatan**

Secara garis besar penyusunan peta potensi dan peluang investasi daerah di Tanah Laut dilakukan dengan menggunakan metode survei dan studi literatur pada elemen yang relevan. Kegiatan ini mencakup seluruh komoditi produk jasa unggulan (KPJU) pada seluruh sektor pembangunan yang memiliki peluang investasi di kabupaten Tanah Laut. Kegiatan ini juga sebagai kompilasi data dari 2 (dua) kajian terdahulu yang telah dilaksanakan, yaitu kajian naskah akademik yang dilakukan pada tahun 2016, melalui Bagian Ekonomi dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, serta Kajian RUPMK melalui DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut (2017) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai dokumen “Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tanah Laut 2017-2025. Menuju penetapannya sebagai dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang yang diberlakukan sampai dengan tahun 2025. Kegiatan akan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Studi Pustaka
- 2) Pengumpulan data dan pengumpulan peta serta pengumpulan data sekunder.
- 3) Pengolahan data awal meliputi kompilasi data dan informasi hasil kajian (2017 -2018), dan integrasi relevansi data dalam kondisi kajian 2019.

Acuan kegiatan sesuai kerangka pikir kegiatan (2017- 2018) dengan penambahan tujuan kajian untuk output kajian.

**Desain**  
**Kerangka Pikir Desain RUPM "Strategis" & "Action Plan" 2017-2025**  
**Kabupaten Tanah Laut**



**Gambar 1.1.**  
**Kerangka Pikir Penyusunan Dokumen RUPM Kabupaten Tanah Laut**  
**2017-2025 (Diolah Kembali, 2019)**

## BAGIAN 2

### GAMBARAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

#### 2.1. Aspek Geografis Dan Demografi

##### 2.1.1. Geografis

**Kabupaten Tanah Laut** adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pelaihari yang merupakan pusat kegiatan Kabupaten Tanah Laut. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.631,35 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 319.808 jiwa. Motto daerah ini adalah "Tuntung Pandang" (bahasa Tanah Laut) sedangkan maskot fauna daerah adalah "Kijang Emas". ([https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Tanah\\_Laut](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tanah_Laut))

**Kabupaten Tanah Laut** terletak pada posisi 114°30'20 BT – 115°23'31 BT dan 3°30'33 LS - 4°11'38 LS dengan batas-batas administratif sebagai berikut :

Utara	Kabupaten Tanah Laut dan Kota Tanah Laut baru
Selatan	Laut Jawa
Barat	Laut Jawa
Timur	Kabupaten Tanah Bumbu dan Laut Jawa

Berdasarkan tingkat kelandaiannya wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, yaitu meliputi wilayah datar (kemiringan 0-2%) sebesar 290.147 ha, wilayah bergelombang (kemiringan 2-15%) sebesar 43.060 ha, wilayah curam (kemiringan 15-40%) sebesar 26.833 ha dan wilayah sangat curam (kemiringan >40%) sebesar 12.890 Hektar.



Kabupaten Tanah Laut merupakan kabupaten yang terletak paling selatan dari Propinsi Kalimantan Selatan dengan ibukota Pelaihari. Secara geografis, Kabupaten Tanah Laut terletak di antara  $114^{\circ} 30' 22'' - 115^{\circ} 10' 30''$  BT dan  $3^{\circ} 30' 3'' - 4^{\circ} 10' 30''$  LS, dengan luas wilayah  $3.631,35 \text{ Km}^2$  atau selitar 9,71 persen dari total luas wilayah Propinsi Kalimantan Selatan, posisi Tanah Laut sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Banjarmasin (Ibu kota propinsi), dan Laut Jawa, serta memiliki pantai dan pelabuhan sebagai jalur distribusi barang dari dan ke luar daerah.

### 2.1.2. Topografi

Kabupaten Tanah Laut umumnya merupakan daerah dataran tinggi dan bergunung-gunung yang terdapat dibagian Utara dan Timur, yaitu tersebar di Kecamatan Pelaihari, Bajuin, Jorong, Batu Ampar, Tambang Ulang dan Kintap sampai ke perbatasan dengan Kabupaten Banjar. Keadaan wilayahnya terdiri dari dataran tinggi dan bergunung-gunung, dataran rendah, serta pantai dan rawa. Jenis tanahnya sangat beragam yaitu latosol (29,17 %), podsolik (32,98 %), alluvial (32,26 %) dan organosol (5,59 %). Dari segi pemanfaatannya, lahan tersebut terdiri dari pemukiman, persawahan, tegalan, kebun campuran, perkebunan, alang-alang/semak dan hutan. Pada wilayah ini terdapat beberapa puncak yaitu: Puncak gunung Kemuning (750 m dpl), Puncak Gunung Batu Karo (621 m dpl), Puncak Gunung Batu Balerang (921 m dpl), Puncak Gunung Kematian (951 m dpl), Puncak Gunung Batu Mandi (901 m dpl), Puncak Gunung Sekupang (1.051 m dpl), Puncak Gunung Haur Bonak (744 m dpl), Puncak Gunung Aur Bunek (1.150 m dpl), dan Puncak Gunung Condong (553 m dpl).

Di bagian Selatan dan Barat merupakan daerah dataran rendah, pantai, dan rawa-rawa yaitu terdapat di Kecamatan Kurau, Bumi Makmur, Takisung, dan Panyipatan. Berdasarkan tingkat kelandaiannya wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, yaitu meliputi wilayah datar (kemiringan 0-2%) sebesar 290.147 Hektar (78%); wilayah bergelombang (kemiringan 2-15%) sebesar 43.060 Hektar (12%); wilayah curam (kemiringan 15- 40%) sebesar 26.833 Hektar (7%); dan wilayah sangat curam (kemiringan >40%) sebesar 12.890 Hektar (3%).



**Tabel 2.1.**  
**Luas Wilayah Kecamatan Jumlah Desa/Kelurahan**

<b>Kecamatan</b>	<b>Luas ( Km<sup>2</sup> )</b>	<b>Jumlah Desa/Kel.</b>
Panyipatan	336,00	10
Jorong	628,00	11
Batu Ampar	548,10	14
Kintap	537,00	14
Pelaihari	575,75	20
Takisung	343,00	12
Bati-Bati	234,75	14
Tambang Ulang	176,75	9
Kurau	268,00	11
Bumi Makmur	141,00	11
Bajuin	196,30	9
<b>Jumlah</b>	<b>3.631,35</b>	<b>135</b>

**(Sumber, disajikan kembali, 2019)**

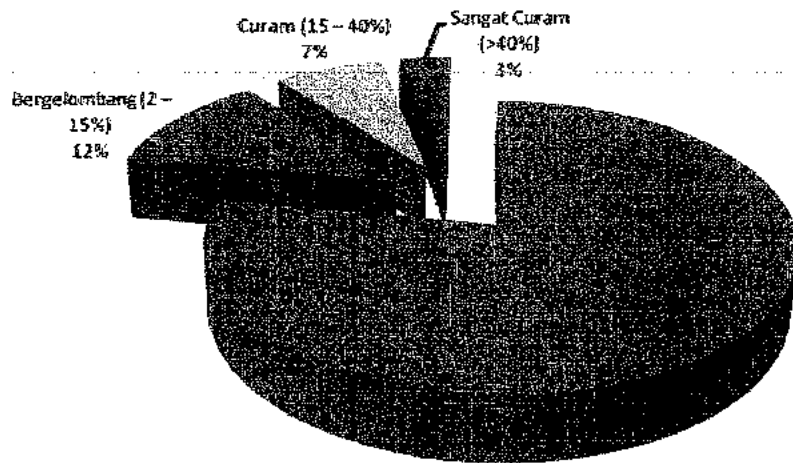
Wilayah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 11 Kecamatan dan 130 Desa dan 5 Kelurahan serta 1.504 RT. Kecamatan Panyipatan dengan luas wilayah 336 km<sup>2</sup> dengan Ibu Kota Desa Panyipatan jumlah desa dan RT yaitu 10 Desa dan 126 RT, Kecamatan Takisung dengan luas wilayah 343 km<sup>2</sup> dengan ibu kota Desa Takisung jumlah desa dan RT yaitu 12 Desa dan 162 RT, Kecamatan Kurau dengan luas wilayah 127 km<sup>2</sup> dengan ibu kota Desa Padang Luas jumlah desa dan RT yaitu 11 Desa dan 69 RT, Kecamatan Bumi Makmur dengan luas wilayah 141 km<sup>2</sup> dengan ibu kota Handil Babirik jumlah desa dan RT yaitu 11 desa dan 73 RT, Kecamatan Bati Bati dengan luas wilayah 234,75 km<sup>2</sup> dengan ibu kota Desa Pandahan jumlah desa dan RT yaitu 14 Desa dan 145 RT, Kecamatan Tambang Ulang dengan luas wilayah 160,75 km<sup>2</sup> dengan ibu kota Desa Tambang Ulang jumlah desa dan RT yaitu 9 Desa dan 71 RT, Kecamatan Pelaihari dengan luas wilayahnya 379,45 dengan ibu kotanya Kelurahan Pelaihari jumlah desa/Kelurahan dan RT yaitu 5 Kelurahan dan 15 desa serta 261 RT, Kecamatan Bajuin dengan luas wilayahnya 196,30 km<sup>2</sup> dengan ibu kotanya Desa Bajuin jumlah desa dan RT yaitu 9 Desa dan 96 RT, Kecamatan Batu Ampar dengan luas wilayahnya 548,10 km<sup>2</sup> dengan ibu kota Desa Batu Ampar jumlah desa dan RT yaitu 14 Desa dan 181 RT, Kecamatan Jorong dengan luas wilayahnya 628,00 km<sup>2</sup> dengan ibu kotanya Desa Jorong jumlah desa dan RT yaitu

11 Desa dan 157 RT, Kecamatan Kintap dengan luas wilayahnya 537,00 km<sup>2</sup> dengan ibu kotanya Desa Kintapura jumlah desa dan RT yaitu 14 Desa dan 163 RT.

Luas wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah 3.631,35 km<sup>2</sup> (363.135 ha) atau sekitar 9,71% dari luas Provinsi Kalimantan Selatan, secara administratif terdiri dari 11 wilayah kecamatan, 130 desa dan 5 kelurahan. Daerah yang paling luas adalah Kecamatan Jorong dengan luas 628,00 km<sup>2</sup>, kemudian Kecamatan Batu Ampar seluas 548,10 km<sup>2</sup> dan Kecamatan Kintap dengan luas 537,00 km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan yang luas daerahnya paling kecil adalah Kecamatan Kurau dengan luas hanya 127,00 km<sup>2</sup>. Dari data diatas dapat dilihat bahwa luas Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Jorong, kemudian Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Kintap dengan luas, sedangkan kecamatan yang luas daerahnya paling kecil adalah Kecamatan Kurau.

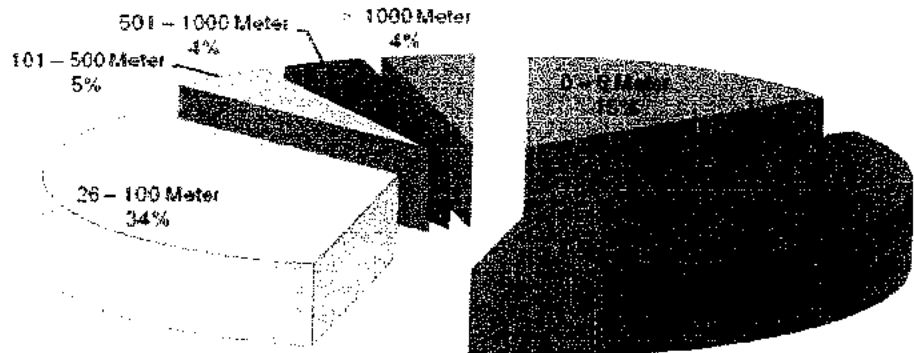
### **2.1.3. Iklim Cuaca**

Temperatur udara maksimum di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2008 34,0° C sampai 325,0° C, temperatur minimum berkisar antara 20,1° C sampai 22,2° C dan rata-rata temperatur udara tiap bulan berkisar antara 26,0° C sampai 27,3° C. Dengan rata-rata kelembapan udara tiap bulan berkisar antara 80 persen sampai 83 persen. Untuk keadaan curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember sebesar 731,0 mm. Untuk keadaan kecepatan angin, terbesar terjadi pada bulan Juli dan Agustus yang mencapai 3,9 knots dan terendah terjadi pada bulan Nopember yakni sekitar 2,2 knots. Sedangkan keadaan penyinaran matahari secara rata-rata selama setahun sebesar 26 persen, dengan penyinaran terbanyak terjadi pada bulan Juni sebesar 40,3 persen dan terendah pada bulan Januari sekitar 9,3 persen. (<https://dinisa17.wordpress.com/profil-kabupaten-tanah-laut/>).



**Gambar. 2.2. Persentase Kemiringan Lahan Beserta Luasnya**

Kabupaten Tanah Laut mempunyai ketinggian diatas permukaan laut dapat diklasifikasikan dalam delapan kelompok, yaitu ketinggian 0 - 6 Meter sebesar 58.231 Hektar (16%), ketinggian 7 - 25 Meter sebesar 142.133 Hektar (37%), ketinggian 26 - 100 Meter sebesar 125.386 Hektar (34%), ketinggian 101 - 500 Meter sebesar 17.759 Hektar (5%), ketinggian 501 - 1000 Meter sebesar 13.661 Hektar (4%) dan ketinggian lebih dari 1000 Meter sebesar 15.760 Hektar (4%)



**Gambar 2.3. Persentase Tinggi Permukaan Laut**

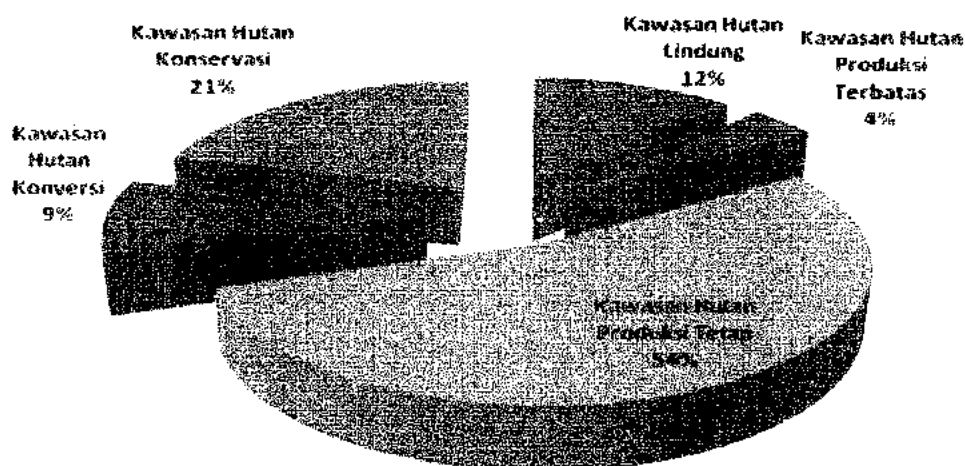
## 2.1.4. Penggunaan Lahan

### 2.1.4.1. Lahan Hutan

Hutan mempunyai peranan yang penting bagi stabilitas keadaan suatu susunan tanah dan isinya. Luas hutan di Kabupaten Tanah Laut adalah sebesar 132.645 Ha. Bila dirinci menurut fungsinya, hutan produksi tetap seluas 71.658 Ha, 12.174 Ha merupakan hutan produksi yang bisa di konversi, 5.290 Ha adalah hutan produksi terbatas, dan kawasan hutan konservasi seluas 27.662 Ha.

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Kabupaten Tanah Laut, pada tahun 2011 produksi kayu HTI sebesar 23.096 m<sup>3</sup> dan produksi kayu rakyat sebesar 1.045 m<sup>3</sup>.

Luas lahan kritis di Kabupaten Tanah Laut mencapai 54.929 Ha. Areal tersebut berada pada hutan di Kawasan hutan lindung 15.775 Ha dan di kawasan budidaya 39.154 Ha. Luas lahan sangat kritis mencapai 17.307 Ha, areal tersebut berada pada hutan di Kawasan hutan lindung 1.374 Ha dan di kawasan budidaya 15.933 Ha



Gambar 2.4. Persentase Lahan Hutan

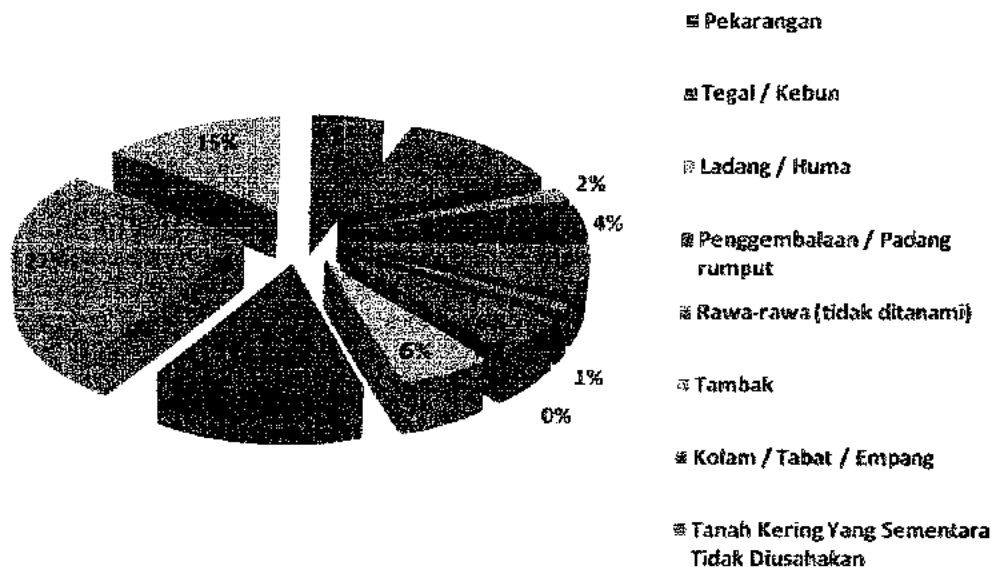
### 2.1.4.2. Lahan Persawahan

Lahan persawahan tercatat 76.143 Ha yang terbagi menjadi sawah irigasi 9.189 Ha, sawah tadah hujan/non irigasi 24.271 Ha, sawah pasang surut 15.363 Ha, sawah lainnya 27.320 Ha.

### 2.1.4.3. Lahan Kering

Lahan kering yang ada di Kabupaten Tanah Laut seluas 177.069 Ha, dengan perincian sebagai berikut pekarangan seluas 15.972 Ha, tegal/kebun seluas 35.389,5 Ha, Ladang/Huma seluas 5.679 Ha, penggembalaan/ padang rumput seluas 12.167 Ha,

rawa-rawa (tidak ditanami) seluas 20.343 Ha, tambak seluas 3.167 Ha, kolam/tabat/empang seluas 417 Ha, tanah kering yang sementara tidak diusahakan seluas 15.064 Ha, Tanah yang ditanami kayu-kayuan/hutan rakyat seluas 15.730 Ha, hutan negara seluas 36.680 Ha, perkebunan seluas 73.233 Ha, dan lain-lain seluas 39.939 Ha.



**Gambar 2.5.**  
Fisiografi lahan kering di kabupaten tanah laut

#### 2.1.5. Iklim

Iklim merupakan kondisi rata-rata dari semua peristiwa yang terjadi di atmosfer yang terdapat pada suatu daerah yang luas serta pada waktu relatif lama. Temperatur udara di Kabupaten Tanah Laut terendah (minimum) berkisar antara 20,0°C yang terjadi pada bulan Nopember dan Desember sampai dengan 23,3°C yang terjadi pada bulan Januari dan temperatur udara tertinggi (maksimum) di Kabupaten Tanah Laut yaitu 29,2°C yang terjadi pada bulan Agustus sampai dengan 35,2°C yang terjadi pada bulan Maret dan Oktober dan rata-rata temperatur udara tiap bulan berkisar antara 26,7°C yang terjadi pada bulan Juli sampai 28,1°C yang terjadi pada bulan April dan Mei. Kelembaban udara di Kabupaten Tanah Laut terendah 77,1 % yang terjadi pada Bulan Februari sedangkan tertinggi 85,2% yang terjadi pada Bulan Juni.

Kabupaten Tanah Laut hanya dikenal dua musim, sebagaimana musim di Indonesia pada umumnya, yaitu musim penghujan dan kemarau. Pada bulan Maret dan April arus angin barasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sebaliknya pada bulan Mei sampai dengan Desember arus angin banyak

mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik, sehingga terjadi musim penghujan. Keadaan seperti itu berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober-Nopember. Curah hujan di Kabupaten Tanah Laut yaitu sebesar 203,8 mm sedangkan curang hujan terendah sebesar 62,0 mm/th pada bulan April sedangkan curang hujan tertinggi sebesar 488,6 mm/th pada bulan Nopember. Sedangkan untuk Kecepatan Angin di Kabupaten Tanah Laut rata-rata 2,30 knot, kecepatan angin terendah adalah 1,70 knot terjadi pada bulan Juni dan kecepatan angin tertinggi 3,70 knot terjadi pada bulan Desember.

## **2.2. Penduduk dan Tenaga Kerja**

Pembangunan ketenagakerjaan juga terkait kondisi pada aspek yang ada di bidang kependudukan antara lain:

- (a) Penyebaran penduduk yang tidak merata pada masing-masing wilayah dimana Kecamatan Pelaihari dan Bati-Bati rata-rata kepadatan penduduknya tinggi sementara Kecamatan lain masih sedikit
- (b) Meningkatnya jumlah pengangguran terbuka dan terselubung
- (c) Masih belum optimalnya pelaksanaan layanan Administrasi Kependudukan
- (d) Belum tertatanya administrasi kependudukan dalam rangka membangun sistem pembangunan, pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan.

Jumlah penduduk Kabupaten Tanah Laut dalam tahun 2017 mencapai jumlah 334.328 orang (BPS, 2018). Jumlah penduduk dalam katagori miskin mencapai 4,58%. IPM Kabupaten Tanah Laut mencapai angka 68. Aspek kependudukan menjadi central dalam pembangunan. Dalam pembangunan ekonomi, setiap pertumbuhan sektoral, dikaitkan dengan kesempatan kerja yang ditimbulkan, serta nilai tambah ekonomi. Sebaran sektoral tenaga kerja di Kabupaten Tanah Laut mengikuti pola pada dominasi di sector pertanian, Jasa PHR, Industri (primer, sekunder, dan tersier), serta sektor terkait lainnya (Sakernas, 2012, Laporan , Profil Investasi Tala , 2015). Tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten tanah Laut mencapai 72,42% berada di atas TPAK Provinsi (69,46%). Tingkat pengangguran mencappai 2, 93 % di bawah kondisi Provinsi (3,80%) (BPS, 2014). Tingkat pengangguran terbukan (TPT) Kabupaten Tanah Laut bergerak dari 3.87 (2010), 5,79 (2011), 4,2 (2012), dan 3,12 (2013).

### **2.2.1. Ketenagakerjaan**

Dalam teori ekonomi makro, variable tenaga kerja merupakan variable terpenting untuk mengukur tingkat output suatu perekonomian. Model-model ekonomi juga selalu akan membedakan perekonomian yang “full employment” dengan perekonomian yang berada dibawah tingkat “full employmet”. Kedua model itu tentu juga harus dibahas dalam pendekatan yang berbeda. Karena itu, dalam pembuatan kebijakan ekonomi, variable tenaga kerja harus diperhitungkan, agar kebijakan ekonomi yang terbentuk dapat secara komprehensif memecahkan berbagai persoalan ekonomi, yang kerap kali berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan.

Di Kabupaten Tanah Laut masalah ketenagakerjaan masih merupakan fenomena kompleks, seperti problem di tataran nasional. Apalagi pasar tenaga kerja di Tanah Laut diperkirakan akan semakin terintegrasi di masa mendatang. Aktifitas investasi selayaknua mendorong perluasan kesempatan kerja, dengan peran tenaga kerja daerah, dan komposisi dengan tenaga kerja asing. Karakteristik Kalimantan Selatan, khususnya Tanah Laut merupakan wilayah yang mudah dijangkau dari mana pun juga. Akibatnya jelas, arus migrasi maupun urbanisasi menjadi tak terhindarkan. Dengan situasi sedemikian ini, bagaimanapun akan berpengaruh pada struktur ketenagakerjaan, yakni kemungkinan progresif menggelembungnya penduduk usia produktif (usia kerja). Untuk itu, perluasan kesempatan kerja perlu dioptimalkan secara produktif. Manajemen investasi daerah selayaknya dapat memberikan dampak pembangunan ketenagakerjaan.

### **2.2.2. Peran Strategis Ketenagakerjaan**

Bidang ketenagakerjaan memiliki peran yang sangat strategis dalam mengatur, mengelola dan mempertanggungjawabkan pembangunan ketenagakerjaan melalui fungsi-fungsi sebagai berikut:

#### **1. Fungsi Pelayanan**

Fungsi utama bidang ketenagakerjaan adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan di sector pembangunan ketenagakerjaan. Masyarakat (lulusan sekolah, termasuk lulusan Perguruan Tinggi), dan bagian masyarakat yang tidak mampu menyelesaikan pendidikan formil yang sulit untuk mampu membangun kesempatan kerja dan memasuki dunia kerja tanpa adanya campur tangan Pemerintah. Melalui SKPD leading sector pembangunan ketenagakerjaan diberikan dalam bentuk kerangka anggaran dan kerangka regulasi. Fungsi pelayanan pembangunan

ketenagakerjaan dalam peran leading sector merupakan bagian pokok dari peran yang bersifat umum dan harus dilakukan oleh SKPD Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

## **2. Fungsi Pengaturan**

Pemerintah daerah melalui leading sector memiliki fungsi pengaturan (*regulating*) untuk mengatur dan melembagakan fungsi pelayanan ketenagakerjaan. Terkait seluruh pemangku kepentingan pembangunan ketenagakerjaan dapat berjalan sesuai dengan kebijakan dalam bentuk program pembangunan didasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran. Ditetapkan arah kebijakan dan Pengaturannya yang dipenuhi dengan bentuk dan isi program, dan kegiatan didukung lingkungan pelaksanaan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan. Pengaturan pembangunan ketenagakerjaan terkait upaya terhadap proses pembangunan dan pola pemberdayaan tenaga kerja daerah. Maksud dari fungsi ini adalah agar stabilitas warga terjaga, nilai-nilai dan pertumbuhan ekonomi, sosial, politik dan budaya sesuai yang diharapkan. Selaras dengan kesepakatan lingkungan global (seperti pemberlakuan implementasi MEA 2015-2025).

## **3. Fungsi Pembangunan**

Fungsi pembangunan ketenagakerjaan dijalankan untuk mendorong perubahan sesuai dengan harapan yang dicita-citakan bersama pada sector ketenagakerjaan. Perubahan mengarah pada visi dan strategi pembangunan yang terukur dengan berbagai indikator kualitas, daya saing tenaga kerja dalam menciptakan lapangan usaha dan kapasitas dalam memasuki dunia kerja. Pada kondisi masyarakat terkait angkatan kerja yang belum berdaya saing, maka pembangunan ketenagakerjaan dilakukan dengan fungsi pengelolaan dengan intensitas pengendalian internal dan efektifitas pengawasan yang melembaga.

## **4. Fungsi Pemberdayaan Tenaga Kerja (Daerah)**

Fungsi ini dijalankan pada masyarakat terkait tenaga kerja produktif yang belum memenuhi daya saing (kompetensi dan profesionalisme) untuk bisa memenuhi kesempatan berusaha dan kesempatan kerja. Leading sector, memenuhi fungsi dan peran Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) dengan melakukan kerangka regulasi, kerangka anggaran. Penjabaran PTKD dilakukan dengan menetapkan arah kebijakan, program dan kegiatan



didasarkan Rencana strategic pembangunan ketenagakerjaan Nasional dan daerah. Pemberdayaan tenaga kerja daerah dilakukan untuk pengelolaan "PTKD" dalam upaya meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat pada angkatan kerja di daerah. Pemberdayaan dilakukan melalui melalui arah kebijakan, program dan kegiatan dalam tahap pengelolaan Pemberdayaan tenaga kerja daerah (PTKD).

Pemberdayaan tenaga kerja daerah Kabupaten Tanah laut semakin mendesak diperkuat dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi yang komrehensif, untuk menjangkau substansi upaya pemberdayaan. Hal ini dilakukan dalam langkah melanjutkan setiap program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai saat sekarang. Tanpa adanya penegasan dalam perda mengenai perlindungan tenaga kerja lokal, dikhawatirkan perusahaan merekrut pekerja tanpa berkeinginan memberdayakan masyarakat sekitar. Upaya untuk memberdayakan dan melindungi tenaga kerja daerah di Kabupaten Tanah Laut adalah keharusan, sebab dengan semakin bertumbuhnya pembangunan, seperti kawassan strategis nasional di Kawasan Industri Jorong, yang mendorong hadirnya investor, maka berkembangnya kawasan Industri ini, memerlukan pemberdayaan terarah untuk memenuhi pembangunan dengan peran tenaga kerja daerah.

Pemenuhan peran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sebagai *agent of development*, memerlukan disain program pembangunan PTKD dan lingkungan implementasinya. Upaya pengembangan ketenagakerjaan dilakukan melalui program/kegiatan dengan melakukan pengembangan fungsi dan peran terkait ketenagakerjaan dalam tataran kognitif, apektif dan psikomotorik unntuk angkatan kerja di Kabupaten Tanah Laut. Upaya pemberdayaan dilakukan juga dengan "partnership" melalui peran Lembaga pendidikan (Sekolah), BLK (Pemerintah), Lembaga Pengembangan (private), Perguruan Tinggi, serta pihak eksternal terkait (swasta, LSM).

Mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (sesuai pasal 150), terkait objek jenis retribusi daerah dapat ditambah untuk daerah sepanjang memenuhi criteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) merupakan pembayaran atas pemberian perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang

ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang telah memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk. Juga, berdasarkan isi pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penetapan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagai Retribusi Daerah memberikan peluang kepada daerah untuk menambah sumber pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat memperkuat efektifitas pengelolaan keuangan daerah.

Potensi subjek retribusi tenaga kerja asing didata pada sumber pemberi kerja TKA di Kabupaten Tanah Laut. Tenaga Kerja Asing (“TKA”) yang dipekerjakan oleh pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan, antara lain yaitu memiliki pendidikan yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki oleh TKA dan memiliki sertifikat kompetensi atau memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA paling kurang 5 (lima) tahun. Sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2015, pasal 3 : Pemberi kerja TKA yang mempekerjakan 1 (satu) orang TKA harus dapat menyerap TKI sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pada perusahaan pemberi kerja TKA”. Juga, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing adalah regulasi yang mengatur tambahan jenis retribusi daerah. Dalam regulasi ini diatur salah satunya adalah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

### 2.2.3. Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Tanah Laut

**Tabel 2.2.**  
*(Man Power Indicator Tanah Laut Regency) 2010-2015*

<b>Indikator</b>	<b>Ags 2010</b>	<b>Ags 2011*)</b>	<b>Ags 2012*)</b>	<b>Ags 2013*)</b>	<b>Ags 2014</b>	<b>Ags 2015</b>
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Bekerja	148.924	153.695	154.457	148.815	158.318	150.510
Pengangguran	5.991	7.962	6.519	4.589	4.775	7.139
Angkatan Kerja	154.915	161.657	160.976	153.404	163.093	157.649
Bukan Angkatan Kerja	54.795	52.012	56.430	67.615	62.107	71.765
Penduduk usia 15 tahun ke atas	209.710	213.669	217.406	221.019	225.200	229.414
TPAK (%)	73.87	75.65	74.04	69.40	72.42	68.71
TPT (%)	3.86	4.92	4.04	2.99	2.92	4.52

(Sumber. Diadaptasi, dari BPS, 2017 Ket : \*) Data Backcasting (Proyeksi Penduduk 2010-2035)

Dalam deskripsi Provinsi Kalimantan Selatan:

- Jumlah angkatan kerja mencapai 2,25 juta orang terdiri dari 2,17 juta orang yang bekerja dan 78,73 ribu orang yang menganggur. Pada Februari 2019, TPAK Kalimantan Selatan sebesar 73,98 persen dan TPT sebesar 3,50 persen.
- Sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbanyak di Kalimantan Selatan. Sektor pertanian menyerap 31,89 persen tenaga kerja. Dibandingkan dengan penyerapan pada Februari 2018 yang sebesar 35,19 persen, maka terjadi penurunan penyerapan oleh sektor pertanian ini sebesar 3,30 poin.
- Sebanyak 55,07 persen penduduk bekerja di sektor informal (berstatus berusaha sendiri (20,44 persen), berusaha dibantu buruh tidak tetap (14,09 persen), pekerja bebas (3,99 persen) dan pekerja tak dibayar (16,55 persen)). Sedangkan Pekerja di sektor formal tercatat sebanyak 44,93 persen (buruh/karyawan (40,98 persen) dan status berusaha dibantu dengan buruh tetap (3,95 persen)).
- Berdasarkan jam kerja, penduduk bekerja 35 jam atau lebih seminggu naik sebesar 5,93 poin menjadi 66,70 persen dibandingkan setahun yang lalu yang sebesar 60,77 persen. Penduduk yang bekerja antara 15–34 jam per minggu mengalami penurunan relatif besar yaitu sebesar 3,47 poin.
- 43,67 persen penduduk bekerja di Kalimantan Selatan berijazah SD/tidak punya ijazah dan 17,12 persen pekerja tamat SMP sederajat, dan 11,40 persen pekerja berpendidikan diploma dan universitas.
- TPT tertinggi pada jenjang SMA sederajat yaitu sebesar 5,66 persen. TPT terendah terdapat pada jenjang pendidikan SMP Sederajat ke bawah sebesar 2,45 persen. (BPS, Tanah Laut, 2018): <https://tanahlautkab.bps.go.id/pressrelease/2019/05/07/1298/tpt--tingkat-pengangguran-terbuka--februari-2019-kalimantan-selatan-sebesar-3-50-persen.html>

## 2.3. Perekonomian Daerah

### 2.3.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pemberian otonomi yang luas kepada daerah adalah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah. Sebuah konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah dan ditegaskan bahwa secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan dan pengawasan daerah. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskal (*fiscal need*) yang merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, sehingga tidak mengalami defisit fiskal. Salah satu upaya untuk meningkatkan *fiscal capacity* daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan daerah.

### 2.3.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pembangunan ekonomi suatu daerah pada hakekatnya adalah serangkaian usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Indikator yang biasa digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian makro suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau Pendapatan Regional. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah dan periode waktu

tertentu. Hasil penghitungan PDRB biasa dikenal sebagai PDRB menurut lapangan usaha dan PDRB menurut penggunaan. PDRB menurut lapangan usaha merupakan total nilai tambah (*value added*) dari semua kegiatan ekonomi di suatu wilayah dan pada periode waktu tertentu, sedangkan PDRB menurut penggunaan merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi akhir. Selain itu, dalam penyajiannya PDRB juga dibedakan menjadi PDRB atas dasar harga konstan dan PDRB atas dasar harga berlaku.

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dihitung menurut harga tahun dasar, dimana tahun dasar yang digunakan adalah sesuai data. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dan dihitung menurut harga tahun berjalan. Dengan demikian, PDRB merupakan data yang sangat dibutuhkan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah dan dapat pula digunakan sebagai alat evaluasi terhadap kinerja pembangunan di bidang ekonomi.

Di samping itu, penghitungan PDRB ini menggunakan konsep domestic, artinya seluruh nilai tambah yang ditimbulkan oleh berbagai sektor/lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di daerah/wilayah tertentu dihitung sebagai bagian dari nilai tambah yang dihasilkan daerah tersebut tanpa memperhatikan kepemilikan dari faktor produksi. Dengan kata lain, PDRB menunjukkan gambaran *Production Originated*.

**Tabel 2.3.**

**PDRB Kabupaten Tanah Laut (2008 -2013)**

Sektor	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1. Pertanian	653756.40	676759.60	700468.11	726956.45	757567.46	787177.52
2. Pertambangan dan Penggalian	169823.56	180943.12	195058.78	211246.76	222755.28	231381.56
3. Industri Pengolahan	385038.23	418749.37	455607.38	496140.70	540475.93	587718.72
4. Listrik, Gas & Air Bersih	3109.25	3252.75	3410.81	3592.08	3811.99	4041.04
5. Konstruksi	43213.01	47815.19	52370.86	57263.41	62803.78	68405.87
6. Perdag, Hotel dan Resto	505878.43	529117.16	554056.88	580545.74	608154.57	637068.14
1. Pengangkutan dan Komunikasi	37882.13	39831.22	42142.48	45178.26	48568.24	52480.66
8. Keu. Real Estat & Jasa Perusahaan	68583.80	74034.28	80390.74	87112.26	94376.03	103549.37
9. Jasa –Jasa	158641.67	172291.04	188514.56	205724.69	224483.86	244391.59
<b>Jumlah</b>	2025926.47	2142793.73	2272020.61	2413760.35	2562997.13	2716414.49

\$2.025.926.47 \$2.142.793.73 \$2.272.020.61 \$2.413.760.35 \$2.562.997.13 \$2.716.414.49

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut periode 2008-2013 rata-rata 6,0—6,2 % dan pada tahun 2013 ditargetkan mencapai 6,5 %. Adapun perkembangan pertumbuhan ekonomi Tanah Laut dalam kurun waktu 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.2. Hambatan pertumbuhan pada periode ini adalah masalah energi (melonjkanya harga minyak dan terbatasnya pasokan listrik); dampak perubahan iklim dan harga produk pangan impor yang menjadi bahan baku industri pengolahan.

Pada capaian lima tahun terakhir (2008-2012); pertumbuhan sektor pertanian selama lima tahun terakhir semuanya di bawah rata-rata pertumbuhan Kabupaten Tanah Laut walaupun trendnya terlihat meningkat. Rata-rata pertumbuhan sektor pertanian hanya sebesar 3,44 % sementara rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut pada periode yang sama 5,92 %. Masih relatif rendahnya pertumbuhan sektor pertanian ini disebabkan persoalan semakin terbatasnya lahan-lahan subur akibat alih fungsi lahan; perubahan iklim dan juga semakin berkurangnya jumlah petani. Pertumbuhan sektor pertanian sendiri utamanya didorong oleh sub sektor peternakan dan hasilnya, tanaman perkebunan dan tanaman bahan makanan.

Sektor lainnya yang peranannya tidak bisa diabaikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Laut adalah sektor pertambangan dan penggalian. Pertumbuhan pertambangan dan penggalian terutama didorong oleh batubara dan biji besi. Rata-rata pertumbuhan sektor ini masih diatas rata-rata pertumbuhan Kabupaten Tanah Laut. Pada periode tahun 2008-2012; pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian mencapai rata-rata 6,93 % sementara rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut pada periode yang sama hanya 5,92 %.

Pertumbuhan yang cukup tinggi dan stabil pada periode 2008-2012 adalah sektor industri pengolahan. Pertumbuhan sektor ini terutama didorong oleh masuk dan beraneka ragamnya industri yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Rata-rata pertumbuhan sektor ini jauh diatas rata-rata pertumbuhan Kabupaten Tanah Laut. Pada periode tahun 2008-2012; pertumbuhan sektor industri pengolahan mencapai rata-rata 8,83 % sementara rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut pada periode yang sama hanya 5,92 %. Kinerja pertumbuhan sektor industri pengolahan ini semakin menegaskan bahwa Kabupaten Tanah Laut sedang menuju daerah industri. Hanya saja pertumbuhan sektor ini masih terlihat stagnan sehingga dari tahun 2008 sampai tahun 2012 tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Ke depan, industri Kabupaten Tanah Laut perlu lebih meningkatkan upaya pengembangan industri kecil dan menengah.

Sektor listrik dan air bersih mengalami pertumbuhan yang rendah dalam lima tahun terakhir. Rata-rata pertumbuhan sektor ini pada periode 2008-2012 hanya 5,08 % sementara rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut pada periode yang sama 5,92 %. Rendahnya

pertumbuhan sektor ini karena sub sektor air bersih dan atau sistim air perpipaan masih belum mampu menunjukkan kinerja yang cukup baik.

Seperti halnya sektor industri pengolahan maka sektor bangunan juga menunjukkan pertumbuhan yang tinggi. Pada periode tahun 2008-2012, pertumbuhan sektor bangunan mencapai rata-rata 9,97 % sementara rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut pada periode yang sama hanya 5,92 %. Hal ini berarti bahwa pembangunan infrastruktur dasar dan pembangunan untuk pelayanan publik oleh pemerintah maupun juga pembangunan oleh pihak swasta telah menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanah Laut.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran ternyata pertumbuhannya selama periode tahun 2008-2012 hanya mencapai rata-rata 4,73 %; dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut yang mencapai 5,92 % pada periode yang sama. Rendahnya pertumbuhan sektor ini (terutama perdagangan) menunjukkan bahwa hasil utama dari sumberdaya yang ada di Kabupaten Tanah Laut tidak di transaksikan di Kabupaten Tanah Laut tetapi di bawa keluar untuk selanjutnya transaksi perdagangannya terjadi diluar. Pada sisi lain, Kabupaten Tanah Laut yang sesungguhnya mempunyai tempat tujuan wisata yang cukup banyak ternyata belum mampu menumbuhkan sub sektor hotel dan restoran.

Sektor pengangkutan dan komunikasi utamanya tumbuh cukup baik yaitu rata-rata 6,06 % dengan trend yang meningkat. Pertumbuhan sektor ini terutama didorong oleh komunikasi yang memang terus berkembang.

Sektor keuangan, persewaan dan jasa juga menunjukkan pertumbuhan yang baik dan diatas rata-rata Kabupaten Tanah Laut. Pada periode tahun 2008-2012; pertumbuhan sektor ini mencapai 8,98 %. Pertumbuhan sektor ini utamanya didorong oleh perbankan dan persewaan. Hal yang sama juga pada sektor jasa didorong oleh kegiatan pemerintahan umum. Sektor pertanian pertumbuhannya diharapkan stabil yang merupakan refleksi kemandirian pada sektor pertanian. Pertumbuhan diharapkan dari efek pengembangan keunggulan daerah baik keunggulan kompetitif maupun komparatif. Sektor yang diharapkan tumbuh dan masuk ke dalam sektor unggulan adalah Industri, perdagangan, transportasi, keuangan dan jasa-jasa. Namun pertumbuhan ekonomi sebesar rata-rata 5,92 % tersebut ternyata masih belum sepenuhnya mampu menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang tiap tahun semakin meningkat. Data tahun 2010 menunjukkan bahwa pencari kerja terdidik mencapai 6.805 orang, meningkat dibanding tahun 2009 yang hanya 6001 orang atau ada peningkatan sebanyak 804 orang. Memang tahun 2011 mengalami penurunan hanya 1.268 orang, namun diperkirakan penurunan tersebut karena sebagian besar dari pencari kerja tersebut tidak memperbaharui lagi pencatatannya di Dinas Tenaga Kerja atau pergi keluar dari Kabupaten Tanah Laut untuk mencari kerja. Selain itu ditengarai bahwa pengangguran terselubung (bekerja hanya paruh

waktu) di Kabupaten Tanah Laut masih cukup besar. Ada indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi Tanah Laut yang dicapai sekarang masih dominan didorong oleh investasi padat modal. Sektor pendorong pertumbuhan ekonomi juga terbatas pada beberapa sektor saja terutama tambang dan perkebunan. Ke depan diperlukan manajemen investasi untuk sector KPJU di sector pertanian dalam arti luas (perikanan, peternakan), perdagangan, dan industry pengolahan, serta pariwisata.

Selain pertumbuhan ekonomi, sasaran makro lainnya juga menunjukkan hasil yang mengembirakan khususnya PDRB Perkapita. PDRB perkapita menunjukkan trend meningkat dan tahun 2011 sudah mencapai Rp 15.511.318 (harga berlaku) dan Rp 7.952.240 (harga konstan). Pada RPJPD Kabupaten Tanah Laut tahun 2005-2025 disebutkan bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan, salah satu indikatornya adalah pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 adalah sebesar 3000 dollar atau dengan kurs sekarang sekitar Rp 33 juta. Bila trend peningkatan PDRB perkapita dapat terus dipertahankan maka sasaran RPJPD tersebut sudah akan tercapai hanya pada tahun 2020-an, lebih cepat dari prediksi semula. Hanya perlu diwaspadai adalah penurunan ekspor sektor tambang (batubara); kemungkinan kenaikan BBM di masa datang dan fluktuasi harga sawit. Bila hal ini terjadi maka akan menghambat laju peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Tanah Laut pada masa yang akan datang.

Bila dilihat dari struktur ekonomi yaitu peranan komponen kegiatan ekonomi yang membentuk ekonomi suatu wilayah, maka ketiga pembentuk kelompok struktur ekonomi yaitu kelompok primer (pertanian dan pertambangan penggalian); kelompok sekunder (industri) dan kelompok tersier (perdagangan dan jasa-jasa) menunjukkan besaran yang relatif tidak terlalu berbeda. Walaupun demikian, kelompok primer masih dominan yaitu sumbangannya pada tahun 2012 yang mencapai 38,23%; kelompok sekunder 22,79% dan kelompok tersier 38,99%. Pada jangka pendek, struktur ekonomi lebih menggambarkan corak perekonomian suatu daerah. Memang sudah terjadi pergeseran struktur perekonomian namun sektor pertanian dan pertambangan (primer) masih relatif besar dan dalam kurun waktu lima tahun terakhir relatif stagnan. Padahal yang diharapkan adalah terjadinya perubahan struktur dimana kontribusi sektor primer menurun dan sektor sekunder (industri) meningkat. Sesuai visi dalam RPJPD tahun 2005-2025; Kabupaten Tanah Laut dirancang dan dicita-citakan menjadi daerah industri dan pelabuhan. Oleh sebab itu seharusnya sektor industri menjadi prioritas terutama melalui pengembangan industri kecil berbasis pertanian. Ke depan agar terjadi pergeseran atau transformasi struktur maka diperlukan pengembangan industri rumahtangga, kecil dan menengah.

**Tabel 2.4.**  
**PDRB Kabupaten Tanah Laut (2014 – 2017)**

Sektor	2014	2015	2016	2017
1. Pertanian	1,913,451	2,092,199	2,238,779	2,374,093
2. Pertambangan & Penggalian	3,329,087	3,033,352	2,862,648	3,017,699
3. Industri Pengolahan	1,093,293	1,229,254	1,394,644	1,588,719
4. Pengadaan Listrik, Gas	4,614	7,163	9,160	10,627
5. Pengadaan Air	16,510	18,439	20,041	22,173
6. Konstruksi	632,810	737,996	799,280	900,458
7. Perdag Besar, Eceran & Reparasi	921,078	1,052,491	1,187,688	1,331,029
8. Transportasi dan Perdagangan	532,691	609,787	669,640	733,754
9. Akomodasi dan Makan Minum	138,565	153,988	168,091	183,872
10. Informasi dan Komunikasi	265,374	292,968	323,914	358,409
11. Jasa Keuangan	135,873	149,939	163,631	180,391
12. Real Estate	190,220	209,403	228,545	243,754
13. Jasa Perusahaan	29,451	33,138	36,736	40,906
14. Adm Pem., Pertahanan dan Jamsos	511,868	607,827	635,701	668,547
15. Jasa Pendidikan	333,791	394,057	452,861	487,769
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	88,400	104,763	118,178	126,541
17. Jasa Lainnya	64,821	75,233	84,550	93,104
Jumlah	10,201,898	10,801,997	11,394,087	12,361,846

(Sumber, Diolah, dari BPPS)

**Tabel 2.5.**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Laut Periode Tahun 2014-2017**

Sektor	2014	2015	2016	2017
1. Pertanian	153,212	178,747	146,580	135,314
2. Pertambangan dan Penggalian	20,557	-295,735	-170,704	155,050
3. Industri Pengolahan	109,676	135,961	165,390	194,076
4. Pengadaan Listrik, Gas	1,449	2,549	1,998	1,467
5. Pengadaan Air Bersih	2,526	1,929	1,602	2,132
6. Konstruksi	83,833	105,186	61,284	101,178
7. Perdag Besar, Eceran dan Reparasi	130,965	131,413	135,197	143,341
8. Transportasi dan Perdagangan	72,146	77,096	59,852	64,115
9. Akomodasi dan Makan Minum	19,258	15,423	14,104	15,781
10. Informasi dan Komunikasi	34,466	27,594	30,946	34,495
11. Jasa Keuangan	14,412	14,066	13,692	16,760
12. Real Estate	23,465	19,183	19,142	15,209
13. Jasa Perusahaan	4,440	3,687	3,598	4,170
14. Adm Pem., Pertahanan dan Jamsos	56,935	95,959	27,874	32,846
15. Jasa Pendidikan	41,522	60,266	58,803	34,908
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,821	16,362	13,415	8,364
17. Jasa Lainnya	9,907	10,412	9,317	8,554
Jumlah	790,591	600,099	592,090	967,759

(Diolah, 2019)



Sesuai data selama Tahun 2013-2017, 5 lapangan usaha penggerak laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut adalah Pertanian, Pertambangan, Industri, Perdagangan dan Industri. Pada Tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Tanah Laut tercatat sekitar 4,64 persen. Bila ditelusuri lebih lanjut, 3,3 persen sumber pertumbuhan berasal dari 5 sektor tersebut, sementara 1,34 persen berasal dari 12 sektor lainnya. Hal ini penting diketahui untuk menentukan langkah strategis bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Tanah Laut. Dalam tahun 2017 untuk PDRB atas dasar harga yang berlaku mencapai Rp. 12.362 Milyar. Untuk laju pertumbuhan PDRB per kapita untuk dasar harga konstan (2010) mencapai Rp. 36,976 (2017). Sumber pertumbuhan PDRB Kabupaten Tanah Laut (2017) meliputi: Sektor Pertanian, sector Industri, sector Perdagangan, sector Konstruksi, dan sector pertambangan.

## **2.4. Infrastruktur Wilayah**

### **2.4.1. Transportasi darat**

Jalan merupakan prasarana pengangkutan yang penting dan strategis untuk memperlancar aktivitas roda perekonomian. Semakin meningkatnya usaha pembangunan antar wilayah di Tanah Laut menuntut pula peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar arus lalu lintas barang dan jasa dari satu wilayah ke wilayah lain.

Panjang jalan di Tanah Laut dibagi menjadi 3 yaitu : Jalan Nasional dengan panjang jalan yaitu 140,76 km, Jalan Provinsi dengan panjang jalan yaitu 104,907 km, dan Jalan Kabupaten dengan panjang jalan yaitu 1.380,45 km. Dan untuk kondisi jalan yaitu ; kerikil sepanjang 390,6 km, aspal sepanjang 641,28 km, dan Tanah sepanjang 348,41 km.

Penyediaan infrastruktur jalan khususnya yang berkualitas selalu menjadi fokus perhatian dalam setiap pembangunan akan tetapi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut masih pula memiliki jalan yang mengalami rusak berat sepanjang 159,63 km, rusak ringan sepanjang 124,66 km, ditambah beban pemeliharaan rutin terhadap jalan-jalan yang sudah beraspal lapen dan hotmix. Keterbatasan dana menjadi kendala utama dalam upaya pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur wilayah. Keadaan jembatan yang di Kabupaten Tanah Laut sampai dengan tahun 2011 berjumlah 427 buah dengan panjang jembatan 21.755 km.

Tabel 2.6.

Jarak Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten Tanah Laut

Kecamatan	Jarak (Km)	Jalan Yang Dilalui
Panyipatan	20	Darat
Jorong	39	Darat
Batu Ampar	15	Darat
Kintap	71	Darat
Pelaihari	0	Darat
Takisung	18	Darat
Bati-Bati	25	Darat
Tambang Ulang	16	Darat
Kurau	37	Darat
Bumi Makmur	45	Darat
Bajuin	5	Darat

(Sumber, Disajikan kembali, 2019)

Kabupaten Tanah Laut salah satu daerah di Kalimantan Selatan yang memiliki peranan penting dalam pertumbuhan industri dan perdagangan (bisnis), keadaan sarana dan prasarana di Kabupaten Tanah Laut dinilai cukup memadai. Transportasi darat di daerah ini sebagian besar jalan raya mempunyai permukaan beraspal dan dalam kondisi baik. Meskipun demikian masih terdapat kendala untuk akses dengankelayakan jalan pada daerah pedesaan. Selain transportasi, tersedianya sarana dan prasarana di Kabupaten Tanah Laut juga dipenuhi melalui fasilitas telekomunikasi, air dan gas, pengairan, listrik, dan kawasan industry Jorong. Seluruh fasilitas tersebut selanjutnya diupayakan mampu menjangkau hingga ke wilayah-wilayah pedesaan. Adapun fasilitas lain yang tersedia adalah lembaga keuangan dan perbankan, lembaga pendidikan, rumah sakit, hotel, dan restaurant.

#### 2.4.2. Transportasi Laut

Pelabuhan sebagai prasarana transportasi yang mendukung kelancaran sistem transportasi laut memiliki fungsi yang erat kaitannya dengan faktor-faktor sosial dan ekonomi. Secara ekonomi, pelabuhan berfungsi sebagai salah satu penggerak roda perekonomian karena menjadi fasilitas yang memudahkan distribusi hasil-hasil

produksi sedangkan secara sosial, pelabuhan menjadi fasilitas publik dimana di dalamnya berlangsung interaksi antar pengguna (masyarakat) termasuk interaksi yang terjadi karena aktivitas perekonomian.

Fungsi dari pelabuhan merupakan titik simpul pusat hubungan (*central*) dari suatu daerah pendukung (*hinterland*) dan penghubung dengan daerah di luarnya. Secara umum pelabuhan memiliki fungsi sebagai *link*, *interface*, dan *gateway*. Fungsi pelabuhan sebagai *Link* (mata rantai) yaitu pelabuhan merupakan salah satu mata rantai proses transportasi dari tempat asal barang ke tempat tujuan. *Interface* (titik temu) yaitu pelabuhan sebagai tempat pertemuan dua *mode* transportasi, misalnya transportasi laut dan transportasi darat. *Gateway* (pintu gerbang) yaitu pelabuhan sebagai pintu gerbang suatu negara, dimana setiap kapal yang berkunjung harus mematuhi peraturan dan prosedur yang berlaku di daerah dimana pelabuhan tersebut berada.

Sebagai negara kepulauan, pelabuhan memiliki arti penting bagi Indonesia karena mendukung kelangsungan sistem transportasi laut yang merupakan sistem transportasi paling besar di Indonesia. Peran pelabuhan sangat penting bagi perkembangan sosial dan ekonomi suatu daerah mengingat pelabuhan merupakan pusat segala kegiatan pelayanan pelayaran yang meliputi pelayanan terhadap kapal dan muatannya (penumpang, barang, dan hewan). Kabupaten Tanah Laut memiliki karakteristik geografis dengan lingkungan pantai dan laut. Hal ini menjadi modal dasar yang melandasi suatu gagasan relevansi informasi untuk investasi, terkait pembangunan Pelabuhan. Indikator Kinerja adalah penurunan biaya logistik daerah/nasional, terkait pasar global, peningkatan *human capital* sektor logistik (pengembangan SDM, Pengembangan Usaha, Pengembangan).

### 2.4.3. Energi Listrik

#### 2.4.3.1. Kelayakan Pengelolaan : PLTBGs-POME (Jasa Kelistrikan)

Ide pengembangan perluasan pada *core main business* dikemukakan melalui ide pengelolaan bisnis pada jasa kelistrikan dengan POME melalui Kementerian Energi dan SDM, dengan dana APBN. Hal ini dikaji terkait adanya fasilitas hibah dari pembangunan PLT Biogas berbasis limbah cair kelapa sawit di lokasi PT Citra Putra Kebun Asri Kecamatan Jorong yang sudah mencapai 93%, dan pada bulan Mei 2017 akan diserahkan terimakan kepada BUMD Pemkab Tala.

Main Business "Pengelolaan Jasa Kelistrikan" (Ketenagaan Listrik dan Energi). Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBGS) adalah pembangkit listrik yang dihasilkan oleh energi yang berasal dari biogas. Pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBGs, biogas generator) dengan memanfaatkan limbah cair sawit, dengan biaya produksi listrik lebih murah ketimbang pembangkit listrik diesel. PLTBGs mengolah limbah cair sawit POME (Palm Oil Mill Effluent) menjadi energi listrik. Listrik dari biogas ini dapat menaikkan rasio elektrifikasi sekaligus mengurangi subsidi energi energi fosil yang masih banyak digunakan di Indonesia. PLTBGs memanfaatkan gas metan dari limbah sawit dengan biaya produksi listrik lebih murah ketimbang pembangkit listrik diesel PLN. Perencanaan PLTBGs sangat dipengaruhi oleh wilayah yang bersangkutan terutama kesinambungan bahan baku. Di mana gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik cair. Kandungan utama dalam biogas adalah metana dan karbon dioksida. Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan maupun untuk menghasilkan energi listrik. Salah satu sumber bahan baku biogas yang potensial untuk dimanfaatkan adalah limbah cair sawit.

Beberapa kondisi terkait PLTBGs- POME:

(i) Peningkatan permintaan energi dan menipisnya sumber cadangan minyak dunia serta permasalahan emisi dari bahan bakar fosil memberikan tekanan kepada setiap negara untuk segera memproduksi dan menggunakan energi terbarukan. Salah satu energi terbarukan yang berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia adalah biogas, khususnya yang berasal dari limbah cair kelapa sawit. (ii) Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik. Dengan bahan bakar biogas, akan menghasilkan biaya produksi listrik yang lebih murah dan ramah terhadap lingkungan.

Analisis biaya untuk memproduksi listrik per kWh dengan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan biogas limbah cair kelapa sawit sebagai bahan bakar, memperhitungkan biaya modal, biaya bahan bakar serta biaya operasional dan perawatan. Dapat diacu data biaya produksi listrik per kWh (berdasarkan kondisi tingkat suku bunga 6%, 9%, 12%) adalah Rp 569,13/kWh, Rp 659,34/kWh, Rp 770,89/kWh dan biaya produksi listrik per kWh tanpa memperhitungkan biaya pengembalian modal adalah Rp 250/kWh.

PT PLN (Persero) membeli listrik yang dihasilkan dari energi biomassa dan biogas. Harga jual listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Sawit (PLTBGs) lebih mahal dengan direvisinya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM ) No 4 Tahun 2012 menjadi Permen No 27 Tahun 2014. Peraturan Menteri tersebut mengatur tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTBGs. Direktur Jenderal Kelistrikan Kementerian ESDM menerbitkan Permen ESDM No 4 Tahun 2012 pada Februari, di mana minat swasta untuk berinvestasi pada PLTBGs masih minim. Penyebab utamanya adalah depresiasi nilai rupiah terhadap dolar AS dan meningkatnya harga biomassa. "Permen No 27 Tahun 2014 diterbitkan dengan harga menarik bagi investor,". Penyediaan energi listrik dari PLTBGS didominasi dengan skema penjualan kelebihan tenaga listrik (excess power) dan bukan merupakan pembangunan pembangkit listrik baru yang bertujuan untuk penyediaan listrik swasta ke jaringan PLN.

Peraturan Menteri ESDM itu pada prinsipnya untuk mengurangi pemanfaatan energi fosil, khususnya bahan bakar minyak (BBM) pada daerah-daerah yang memiliki ketergantungan terhadap BBM dan wilayah kepulauan yang masih memiliki rasio elektrifikasi rendah. Harga dasar jual listrik (feed in tariff) dasar jual PLTBGs Rp 1.050 per kwh jika terinterkoneksi pada jaringan tegangan menengah atau Rp 1.400 per kwh jika terinterkoneksi pada jaringan tegangan rendah. Sesuai data, terdapat tambahan harga melalui pemberian insentif wilayah berupa faktor regional 'F' (faktor pengali harga dasar) berkisar antara 1 sampai dengan 1,6. "Artinya, setiap daerah bisa berbeda faktor pengalinya,". Sebelumnya untuk tarif listrik PLTBGs Rp 975 dikali F per kwh untuk tegangan menengah dan Rp 1.325 dikali F untuk tegangan rendah. Untuk nilai F sebelumnya, 1 untuk Jawa Bali dan Sumatra, 1,2 untuk Sulawesi Kalimantan dan Nusa Tenggara, 1,3 untuk Maluku dan Papua. Terdapat insentif terhadap PLTBGs yang digunakan mengikuti kebutuhan beban pada sistem ketenagalistrikan setempat (load follower) dengan perhitungan tiap kwh. Dengan perubahan beleid itu, diberikan kesempatan kepada perusahaan yang telah berjalan atau telah membangun pembangkit listrik untuk melakukan renegotiasi dengan PLN menggunakan harga jual listrik menjadi acuan tertinggi. PLN memiliki mekanisme membeli listrik biomassa dan biogas dengan harga yang lebih mahal. Alasannya, kedua jenis pembangkit ini mampu menjangkau daerah pelosok dan terpencil di Indonesia.

Divisi Energi Baru Terbarukan PLN, mendeskripsikan bahwa di pelosok daerah yang masih belum menikmati listrik lebih relevan bila membangun pembangkit listrik dengan kapasitas kecil. "Memang menggunakan batu bara lebih murah, namun harus dibangun dengan kapasitas besar," Kelemahan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya harus dibangun dengan kapasitas besar hingga 100 megawatt (MW). Karenanya, keberadaan PLTBGs yang berkapasitas kecil menjadi solusi efektif untuk memasok listrik ke daerah pelosok. Tarif listrik PLTBGs walaupun lebih mahal dari batu bara namun lebih murah dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Pemerintah menetapkan harga pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBGs) oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN persero) sesuai lokasi layanan/Region. Penetapan harga ini tertuang dalam peraturan menteri (Permen) nomor 27 tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBGs) oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Peraturan Menteri (Permen) tersebut merupakan revisi dari Permen sebelumnya yaitu Permen No. 4 Tahun 2012, sebagai bentuk insentif untuk mendorong minat investor dalam pengembangan pembangkit listrik berbasis biomassa dan biogas.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Rida Mulyana mengatakan ditetapkannya harga tersebut sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam upaya penyediaan listrik kepada masyarakat terutama listrik dari energi baru terbarukan. "Kita memiliki potensi energi baru terbarukan yang besar terutama biomassa, sementara disisi lain masih banyak saudara kita yang belum mendapatkan listrik, dengan adanya permen ini dapat menambah kapasitas listrik yang sudah ada dan menyediakan akses yang belum dapat listrik. Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 tahun 2014 di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu, 22 Oktober 2014, di mana Peraturan Menteri ini memberikan kesempatan kepada Badan Usaha yang telah berjalan (dengan pengelolaan PLT eksisting) untuk dapat melakukan negosiasi dengan PT PLN (Persero) menggunakan besaran FiT sebagai harga acuan tertinggi.

#### 2.4.3.2. Telekomunikasi dan Informatika

Kemajuan teknologi dibidang komunikasi di Kabupaten Tanah Laut telah diterapkan dan hampir menjangkau wilayah Kabupaten. Untuk telex, faximile sudah menyebar pada kegiatan pemerintahan, dunia usaha. SSB dan telex telah berjalan sangat efektif. Prasarana dan sarana telepon juga telah mudah dijangkau bahkan pada tingkat kelurahan/desa. Ditengah persaingan informasi yang ditandai menjamurnya sarana telekomunikasi, kecepatan dan infrastruktur komunikasi multak diperlukan. PT Pos Indonesia sebagai salah satu bagian dari BUMN yang berwenang dalam melayani dan mengendalikan arus informasi serta komunikasi, memiliki andil besar dalam menciptakan banyak kemudahan dalam berkomunikasi bagi masyarakat luas. Tidak hanya itu, lembaga ini juga berperan dalam delivery maupun pengiriman surat-surat, paket pos, wesel dan lain sebagainya. Namun dari segi prasarana yang ada ternyata jumlah kantor pos yang ada tidak mengalami perubahan dari tahun 2009 hingga tahun 2011, yaitu sebanyak 8 unit.

Perangkat surat mungkin salah satu sarana untuk berkomunikasi, namun masih banyak sarana lainnya seperti telepon kabel, telepon seluler, telegram, fax ataupun telex bahkan di era serba elektronik, teknologi informasi juga memegang peranan penting melalui internet dan emailnya. Apalagi sekarang ini kepemilikan telepon seluler sampai ke pelosok desa, hal ini sebagai alternative untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang tidak terjangkau dengan telepon kabel.

Komunikasi dalam jumlah pelanggan telepon kabel yaitu sebanyak 2.813 pelanggan dan jumlah pelanggan internet (speedy) yaitu sebanyak 799 pelanggan, serta jumlah warnet adalah sebanyak 29 buah. Dalam era IT dan era disrupsi menunjukkan intensitas penggunaan internet dengan berbagai bentuk sistem jaringan juga berkembang di Kabupaten Tanah Laut.

## BAGIAN 3

### METODE KAJIAN

---

#### 3.1. Tipe Penelitian

Pendekatan Kajian Potensi Investasi Unggulan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019, dilakukan dengan dukungan penelitian /kajian terapan kebijakan.

#### 3.2. Metode Kajian Penelitian/Kajian

Subjek kajian adalah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan *Leading sector* Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan *Private sector*, serta Socio/ Masyarakat.

#### 3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di lingkungan Kabupaten Tanah Laut, terkait *private sector* serta socio/masyarakat Kota Banjarmasin.

#### 3.4. Objek /Aspek Kajian /Penelitian

Objek kajian dan untuk penyusunan RPIK, adalah:

- a. RPJMD – RTRW Kabupaten Tanah Laut
- b. Regulasi terkait Penanaman Modal
- c. Renstra Leading Sector
- d. Aspek Manajemen Investasi

Aspek-aspek tersebut dikaitkan dengan pembangunan lintas sektoral Investasi, terkait isu global kesepakatan MEA, tujuan pembangunan global MDGs dan SDGs dalam kebijakan otonomi daerah serta desentralisasi fiskal.

Adapun topik dan responden kuesioner/ survai, serta sasaran data/ informasi yang diharapkan adalah berikut:



**Tabel 3.1.**  
**Topik, Responden dan Sasaran Data atau Informasi**

<b>Topik</b>	<b>Responden</b>	<b>Sasaran Data/Informasi</b>
Kebijakan dan regulasi daerah, termasuk perijinan dan non perijinan	BKPM Daerah atau PDPPM/ PDKPM Bappeda	Kebijakan dan regulasi investasi di daerah RTRW dan RPJMD
Tanah atau lahan	BPN Bappeda	Sertifikat dan ijin penggunaan lahan Ketersediaan lahan dan arahan pemanfaatan kawasan
Pangan	SKPD urusan Pangan, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan	Potensi dan peluang pengembangan pangan, keragaan komoditas dan komoditas unggulan daerah, produksi pangan unggulan, pengolahan pangan, investasi bidang pangan, kendala pembangunan, arahan pembangunan sektoral, kajian terkait investasi bidang pangan, data & informasi lainnya
Energi	SKPD urusan ESDM	Potensi energi, kebutuhan energi, kendala pengembangan energi, potensi investasi bidang energi, kajian terkait investasi bidang energi
Infrastruktur	SKPD urusan Infrastruktur Wilayah (PU dan Perhubungan)	Kondisi infrastruktur, potensi pengembangan infrastruktur, kebutuhan dan sasaran pengembangan infrastruktur, kendala yang dihadapi, investasi bidang infrastruktur, kajian terkait bidang infrastruktur
Kemampuan keuangan daerah	Bappeda SKPD urusan Pengelolaan Keuangan Daerah	Alokasi anggaran untuk bidang pangan, infrastruktur dan energi, serta sumber-sumber pembiayaan
Ketenagakerjaan	SKPD urusan Tenaga Kerja	Kondisi tenaga kerja lokal, Upah minimum regional, Aturan ketenaga-kerjaan (PTKD, IMTA, )

Melalui penstrukturan di atas, diharapkan pendalaman data dan informasi terkini terkait dengan investasi daerah dapat tercakupi.

Output yang didapatkan dari kegiatan ini adalah dokumen/data sekunder terkait investasi daerah sebagaimana diidentifikasi pada kegiatan persiapan.

### **3.5. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian yang digunakan adalah data gathering RUPM Kabupaten Tanah Laut untuk objek kajian/dimensi RUPM.

### **3.6. Metode Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik survei, wawancara, dan untuk data sekunder dilakukan dengan teknik dokumentasi.

Kegiatan untuk mendapatkan data terkait dengan investasi daerah mengacu pada isi dokumen kajian. Kegiatan penunjang terkait dengan pengumpulan data sekunder meliputi: 1. Browsing data internet; 2. Data BPS; 3. Kunjungan kepada SKPD terkait.

**Pengumpulan Data Sekunder (*Desk Study*).** Tahap ini diperlukan untuk mendapatkan data awal potensi investasi di kabupaten Tanah Laut. Dari kajian ini diharapkan dapat tersusun daftar panjang (*long list*) potensi investasi untuk masing-masing Kecamatan.

Kegiatan penunjang terkait dengan kajian data sekunder meliputi:

- 1) Penyusunan daftar panjang potensi investasi di kabupaten Tanah Laut;
- 2) Penyusunan daftar investasi unggulan di kabupaten Tanah Laut;
- 3) Output yang dihasilkan dari kajian data sekunder berupa daftar panjang (*long list*) potensi investasi di kabupaten Tanah Laut.

Setelah didapatkan daftar tetap peluang investasi prioritas untuk masing-masing Kecamatan, maka selanjutnya pengolahan data menjadi informasi potensi dan informasi peluang, serta data profil investasi (potensi KPJU/Kecamatan) untuk kebutuhan entry pada SIPID untuk komunikasi dan peluang Pemasaran- investasi Kabupaten Tanah Laut. Aspek sajan terkait pada ruang lingkup peluang usaha, ketersediaan lahan, dan sarana prasarana penunjang investasi serta program pengembangan yang diunggulkan daerah yang akan dibuat peta potensi investasi dan peluang /sektor/wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Dalam pengumpulan data ini, koordinasi perlu dilakukan dengan lintas sektor terkait, koordinasi perlu dilakukan dengan lintas sektor terkait, untuk memperoleh data maupun klarifikasi informasi berbagai institusi terkait. Koordinasi terutama dilakukan dengan Institusi terkait Penanaman Modal daerah kajian untuk memperoleh data maupun klarifikasi informasi antara lain mengenai potensi, sebaran, waktu, kapasitas bahan baku, ketersediaan lahan dan infrastruktur investasi maupun pelaku usaha di wilayah kajian setempat. Menimbang kesulitan mendapatkan data terkini (sebagaimana diamanatkan dalam Kerangka Acuan Kerja), maka tim kajian mencoba merumuskan kuesioner dengan topik dan sasaran responden yang terstruktur.

### **3.7. Metode dan Teknik Analisis Data**

Sesuai tujuan penelitian yang ditetapkan, maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan ke dalam 2 (dua) klasifikasi analisis informasional, yaitu analisis statistik deskriptif, dan analisis informasional, interpretasi untuk implementasi rumusan terkait dokumen perencanaan RUPM. Teknik atau pendekatan analisis yang digunakan antara lain: (i) Analisis Situasi, dengan Analisis Stakeholders (*Stakeholder Analysis*), Analisis Masalah (*Problem Analysis*), Analisis Tujuan (*Objective Analysis*), dan Analisis Strategik : Solusi /Pemilihan Program/Kegiatan (*Filtering dan Priority*); (ii) "*Location Question (LQ)* atau LQi, (iii) *Analisis Growth Share*, (iv) *Analisis Linkage System*, dan (v) Analisis SWOT dan Analisis IFAS dan EFAS, Analisis AHP dan MPE.

Analisis potensi dan masalah diawali dengan pengkajian data dan informasi regulasi yang tersedia dan secara aktual dan masih berlaku secara sah di masing-masing sektoral. Melalui tahap ini, gambaran awal potensi nasional dan daerah dari Provinsi, sampai wilayah kajian tingkat Kabupaten, juga terkait acuan pada kebijakan yang ada pada saat ini yang menyangkut investasi (termasuk aspek, Teknik, Operasional, Legal, Skedul-waktu, aspek Ekonomi).

### **3.8. Pendekatan Pelaksanaan Kajian**

Investasi pada hakekatnya merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Investasi merupakan bentuk penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang. Manajemen investasi sebagai peran pemerintah pusat, termasuk pemerintah daerah, untuk potensi dan peluang bagi investor dalam menanamkan modalnya dalam berbagai bidang usaha. Oleh karena di

dalam pendekatan penyusunan peta potensi dan peluang investasi daerah perlu memperhatikan dengan seksama kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, ketersediaan potensi dan peluang investasi daerah, kesiapan infrastruktur pendukung, dan kesiapan dukungan masyarakatnya. Secara garis besar, dua pendekatan akan digabungkan dalam rangkaian pekerjaan Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah, yaitu pendekatan *bottom-up* dan pendekatan *top-down* terhadap usulan investasi.

### 3.8.1. Pendekatan Investasi Daerah

- (1) Pendekatan *bottom-up*, yaitu menampung aspirasi dan permintaan Pemerintah Daerah terkait dengan potensi penanaman modal (investasi) di daerah.
- (2) Pendekatan *top down*, yaitu penetapan potensi investasi berdasarkan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis setiap sektor atau kementerian yang terkait yang terkait dengan investasi daerah, khususnya dari BKPM.
- (3) Pendekatan partisipatif dan multistakeholder juga dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) di daerah untuk menumbuhkan komitmen dan dukungan daerah terhadap investasi yang akan dilakukan.
- (4) Pendekatan strategi promosi dilakukan untuk memudahkan calon investor mengidentifikasi dan memilih potensi dan peluang investasi daerah yang sesuai dengan tujuan investor, serta tindakan yang harus dilakukan dari investasi yang dipromosikan.

### 3.8.2. Strategi Promosi Investasi Daerah

Dilakukan dengan cara mengelompokkan potensi investasi daerah ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. **Kelompok Investasi yang Potensial untuk Dilakukan (*Potential Investment*)**. Kriteria investasi pada kelompok ini adalah:
  - a. Kesesuaian dengan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ataupun Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - b. Kesesuaian dengan Rencana Strategis (Renstra) sektor-sektor, baik nasional maupun daerah, khususnya bidang pangan, energi dan infrastruktur;
  - c. Kesesuaian lokasi investasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;

- d. Keterkaitan antara sektor pangan, energi dan infrastruktur dengan wilayah kabupaten/ provinsi;
  - e. Berpotensi untuk menutup biaya (*cost recovery*);
  - f. Studi pendahuluan (*preliminary study*).
2. **Kelompok Investasi yang Prioritas untuk Dilakukan (*Priority Investment*)**. Kriteria investasi pada kelompok ini, adalah:
- a. Usulan penanaman modal berasal dari Pemerintah Daerah atau investor yang benar-benar serius hendak menanamkan investasi di daerah;
  - b. Berdasarkan kajian pra-kelayakan (*pre-feasibility*) yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Pusat, kegiatan penanaman modal dinyatakan layak, baik dari segi hukum, teknis, dan finansial;
  - c. Resiko dan pengalokasian resiko telah teridentifikasi;
  - d. Termasuk dalam usulan prioritas program Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) dan bentuk KPS telah terdefiniskan;
  - e. Pemerintah membantu pengidentifikasian investasi untuk kegiatan pengentasan kemiskinan.
3. **Kelompok Investasi yang siap Ditawarkan (*Investment Ready for Offer*)**. Kriteria kelompok investasi ini, antara lain:
- a. Dokumen pendukung investasi sudah lengkap;
  - b. Dukungan pemerintah telah disetujui (jika diperlukan);
  - c. Apabila termasuk dalam program KPS yang ditawarkan oleh pemerintah, setidaknya sudah tersedia dokumen lelang, tim panitia pengadaan sudah terbentuk dan jadwal pelelangan sudah terdefinisi.

Kegiatan Kajian Potensi Investasi Unggulan Kabupaten Tanah Laut merupakan bagian dari program pembangunan Kabupaten Tanah Laut mengacu (omnibus regulation ) Peraturan Nasional bidang Penanaman Modal, regulasi BKPM dalam mempromosikan penanaman modal di Indonesia. Kegiatan kajian ini merupakan langkah strategis dalam menyediakan data dan informasi terkini, terutama berkaitan dengan potensi daerah, unggulan, serta peluang pengembangan investasi, dalam lingkup potensi dan peluang investasi yang ada. Data dan informasi yang diperoleh selanjutnya disusun dan dianalisis, serta dipetakan dalam bentuk verbal dan informasi interaktif (entry hasil kajian pada : SIPID dan Promosi Interaktif). Sesuai SIPID, dan interaksinya, Pemerintah

Kabupaten Tanah Laut perlu mendisain agar tidak acak dan terstruktur rencana investasi sesuai skala prioritasnya. Manajemen investasi membantu Pemerintah Daerah merumuskan skala prioritas berdasarkan pertimbangan kelayakan dan penilaian portofolio investasi daerah dalam mempertimbangkan prioritas promosi investasi. Pendekatan dalam manajemen informasi investasi menggunakan *Metode Pembobotan dan Skor (weighting and scoring)* terhadap KPJU/Sektoral dalam menganalisis skala prioritas terhadap usulan investasi yang diajukan.

Diperlukan pengelompokan data secara strategic dalam manajemen investasi daerah Kabupaten Tanah Laut. Sesuai SIPID data dan informasi ditampilkan dengan potensi dan peluang berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan. Kelompok promosi investasi tersebut adalah (1) Investasi potensial; (2) Investasi prioritas; dan (3) Investasi yang siap ditawarkan. Saat nilai investasi yang dibutuhkan dari investasi yang siap ditawarkan ataupun prioritas tidak sesuai dengan harapan BKPM Pusat. Guna mengatasi hal ini, kebijakan kewenangan promosi investasi juga perlu dipisahkan berdasarkan tingkat prioritasnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, kerangka pikir yang digunakan dalam kegiatan kajian ini adalah mengarah pada *Kerangka Pikir Strategi Promosi Investasi* Kabupaten Tanah Laut sesuai acuan di BKPM. Tujuannya adalah, agar kegiatan ini tidak terpisah atau berdiri sendiri dengan materi promosi investasi daerah yang telah terlebih dahulu ada.

**Tabel 3.2.**  
**Kerangka Pikir Kegiatan Pemetaan Investasi Daerah**

<i>Uraian</i>	<i>Indikator(OVI)</i>	<i>Verifikasi (MOV)</i>	<i>Asumsi</i>
GOAL <i>Meningkatnya Investasi di Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat</i>	Investasi (bidang pangan, energi dan infrastruktur) meningkat 10% - 15% dari tahun sebelumnya	Data perijinan dan nilai investasi yang akan ditanamkan	Potensi investasi yang ditawarkan sudah didukung dengan baik oleh hal-hal: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Infrastruktur fisik;</li> <li>- Kondisi sosial politik;</li> <li>- Institusi dan birokrasi daerah;</li> <li>- Peraturan dan kebijakan daerah;</li> </ul> Kondisi ekonomi daerah; dan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Produktivitas tenaga kerja daerah</li> </ul>
PURPOSE <i>Calon Investor mudah mendapatkan data yang akurat dan menentukan</i>	- Data dan informasi tersedia di SKPD terkait dan BKPM Pusat dan Daerah; - Peluang investasi dikelompokkan berdasarkan kesiapan untuk ditawarkan kepada	Buku Profil Investasi dan Peta Potensi Investasi daerah Kabupaten Tanah Laut	- Pemerintah daerah memberikan akses luas terhadap kemungkinan kerjasama: - SKPD dan Kementerian terkait memberikan kemudahan bagi Calon Investor untuk mendalami pilihan investasi.

<i>pilihan investasi</i>	swasta/ publik		
<b>OUTPUT</b> Tersedianya Data dan Informasi di Kabupaten Tanah Laut tentang: - Potensi Daerah - Peluang Investasi - Peta Potensi Investasi Kajian ttg lokasi, ketersediaan lahan, bahan baku, sarana prasarana, peluang pasar dan data lainnya.	Data terbaru tentang: - Potensi daerah - Peluang investasi bidang Pangan, Energi & Infrastruktur - Peta lokasi potensi investasi - Kajian awal terkait faktor penentu & pendukung investasi	RPJM Daerah: - RTRW daerah: - Renstra SKPD utama bidang Pangan, Energi & Infrastruktur: - Peta dasar Bakosurtanal: - Data-data pendukung lain (BPS, Litbang, lainnya)	Sumber-sumber data memberikan akses dan kualitas data yang dapat dipertanggung-jawabkan.
<b>AKTIVITAS</b> Identifikasi & kompilasi data/informasi potensi daerah: Melakukan Pemetaan Investasi di Kabupaten Tanah Laut	Kesepakatan kerjasama (Kontrak) antara PA dengan LPPM untuk pekerjaan Kajian Investasi	Kontrak kerja dan Data Gathering Kajian	Waktu dan prosedur yang ditentukan disepakati dan dipatuhi bersama

(Sumber, disajikan kembali, 2019)

Konsep pikir penyusunan potensi investasi dan peluang investasi daerah disajikan pada Gambar di bawah ini.

**Gambar 3.1.**  
**Alur Aktifitas Penyusunan Kajian**

Pendekatan	Kriteria Utama	Kelompok Investasi Daerah	Kreteria Pendukung
Top-Down	Kesesuaian dengan: RUPM RPJMD Renstra SKPD/Sektoral	Kelompok Investasi Potensial	Kriteria tambahan: Kesesuaian dengan RUPM (Pemrov/ dan Kab Tala) Kesesuaian dengan RPJMD
Buttom-Up	Diusulkan oleh: Pemda Kab/Kota Investor Faktual	Kelompok Investasi Prioritas	Kesesuaian dengan Renstra SKPD/Sektoral Kesesuaian lokasi investasi dengan Aturan RTRW
Partisipasi Multi stakeholders & Koordinatif	Komitmen dan dukungan multi stakeholders Hasil verifikasi Kajian	Kelompok investasi siap ditawarkan (ready for offering)	Keterikatan antar sektor Berpotensi menutup biaya (cost recovery) Studi pendahuluan (preliminary study)

Peta Potensi Investasi Daerah Kab Tanah Laut	Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)
LAPORAN HASIL KAJIAN: Potensi Investasi Daerah Kabupaten Tanah Laut (terpilih)	

### 3.9. Metode Pelaksanaan: Pelaporan

Sesuai TOR, pekerjaan kajian Potensi Investasi Unggulan Kabupaten Tanah Laut, mengacu pada pedoman dari Direktorat Pengembangan Potensi Daerah. Tahap penyelesaian untuk pelaporan hasil kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan pekerjaan, sebagai tahapan Pekerjaan inti dalam kegiatan ini yang secara ringkas dikemukakan berikut:

1. **Identifikasi dan formulasi potensi dan peluang investasi daerah**, meliputi kegiatan-kegiatan:
    - a. Kajian naskah akademik dengan metodis (observasi, wawancara dan Kajian dokumen sekunder/*Desk study*;
    - c. Diskusi dengan Leading sektor dan Bappeda dan SKPD terkait;
    - d. *Focused Group Discussion (FGD)*;
    - e. Acuan Kajian RUPM Kabupaten Tanah Laut
  2. **Formulasi dan organisasi data** yang akurat dan terkini menjadi data potensi dan peluang investasi Kabupaten Tanah Laut:
    - a. Penyusunan Draft Dokumen Kajian;

Pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan daftar peluang investasi di daerah, yaitu: (1) pendekatan *top-down*; dan (2) pendekatan *bottom up*. Pendekatan *top-down* dimaksudkan sebagai pendekatan penyusunan potensi dan peluang investasi daerah yang dilakukan oleh tim LPPM ULM dengan dukungan informasi kajian dan data sekunder terkait investasi nasional, Provinsi (deduktif). Pendekatan ini diimplementasikan dengan dasar acuan kebijakan investasi nasional. Sedangkan pendekatan *bottom-up* dimaksudkan sebagai upaya penyusunan daftar peluang investasi yang dilakukan atas dasar kebutuhan oleh pihak daerah sendiri. Pendekatan ini dilakukan dengan dukungan hasil kajian (induktif), didukung leading sektor Kabupaten, SKPD terkait.
    - b. Presentasi dan diskusi dengan Leading sektor dan SKPD terkait;
    - c. Finalisasi Dokumen Kajian.
- 3.9.1. **Pengolahan dan format penyajian data dan** potensi investasi dan peluang investasi daerah: a. Sinkronisasi data; b. Pengolahan data ke dalam Template (tabular dan deksriptif Per Sektor -KPJU/Kecamatan/Desa); c. Integrasi data ke dalam Database Potensi Investasi Kabupaten Tanah Laut.



d. Implementasi untuk Penyusunan Peraturan Bupati untuk Kajian Potensi dan peluang investasi Kabupaten Tanah Laut 2019.

### **3.9.2. Presentasi/Diskusi Tahap Pertama**

Melalui kegiatan Presentasi/ Diskusi Tahap Pertama ini, daftar potensi dan peluang investasi dari pendekatan *bottom-up* dan *top-down* dipertemukan untuk mendapatkan titik temu dan hasil akhir yang lebih realistis bagi Kabupaten Tanah Laut.

Kegiatan penunjang terkait dengan Presentasi/ Diskusi Tahap Pertama meliputi:

1. Identifikasi waktu, tempat dan peserta presentasi/diskusi
2. Penyusunan daftar acara presentasi/diskusi
3. Persiapan bahan-bahan, peralatan dan logistik presentasi/diskusi.
4. Output yang dihasilkan dari Presentasi/Diskusi Tahap Pertama ini berupa daftar peluang investasi unggulan akan disajikan sesuai kebutuhan per Kecamatan dari wilayah kajian di Kabupaten Tanah Laut.

### **3.9.3. Focus Group Discussion (FGD)**

Kebutuhan FGD untuk mengumpulkan pendapat dan kesepakatan-kesepakatan secara lebih terfokus dan tematik, terutama dengan *multi stakeholder* pengembangan investasi daerah. Dengan demikian, dalam FGD ini, terdapat dua hal yang dilaksanakan secara sekaligus: (1) pengumpulan pendapat dari peserta FGD tentang investasi daerah, dan (2) pengumpulan data menyangkut potensi. Pendekatan ini dikembangkan dari berbagai tahap ( 2/dua kajian sebelumnya) terkait pembangunan investasi di Kabupaten Tanah Laut

Topik yang telah digali, antara lain:

1. Faktor politik dan sosial budaya (meliputi sektor yang dominan, lahan/ tanah, keterbukaan masyarakat, kesiapan masyarakat dalam persaingan kerja, dukungan pimpinan/ kepala daerah dan pihak legislatif dalam investasi PMDN/ PMA);
2. Faktor ekonomi daerah (mencakup pertumbuhan ekonomi daerah, pertumbuhan investasi daerah, dan daya beli masyarakat);

3. Faktor infrastruktur fisik (antara lain ketersediaan infrastruktur fisik, dan kondisi infrastruktur fisik);
4. Faktor kelembagaan (meliputi kelembagaan pelayanan investasi PMDN/ PMA, dan pelayanan perijinan);
5. Faktor peraturan dan kebijakan (mencakup peraturan daerah terkait dengan investasi PMDN/ PMA, dan kebijakan daerah terkait dengan investasi PMDN/ PMA, serta dampak peraturan dan kebijakan daerah terhadap investasi PMDN/ PMA);
6. Faktor tenaga kerja (antara lain mencakup ketersediaan tenaga kerja, kualitas tenaga kerja, serta upah dan keselamatan tenaga kerja). Implementasi Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah dan Ijin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) di Kabupaten Tanah Laut.

Langkah-langkah dilakukan dalam pelaksanaan tahap kegiatan FGD terkait aktifitas:

1. Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion* - FGD). Diskusi ini bertujuan untuk melakukan pemetaan masalah. Dalam kegiatan ini, FGD akan diadakan dengan aparat pemerintah yang terkait dengan investasi dan potensi daerah, investor, tokoh masyarakat, asosiasi pengusaha/ kamar dagang dan industri, serta perwakilan dari perguruan tinggi.
2. Triangulasi (*crosscheck*). Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengecekan ulang kondisi riil potensi di tingkat lapangan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara peninjauan lapangan secara langsung terhadap obyek-obyek /sektoral/KPJU terkait.
3. Perumusan. Masing-masing kelompok mengajukan rumusan masalah yang terkait dengan potensi daerah dan investasi untuk ditanggapi oleh peserta lain.
4. *Focus Group Discussion* dilakukan di tingkat kabupaten Tanah Laut dalam wilayah kajian sebagai tindak lanjut atas daftar sementara peluang investasi yang dihasilkan dari Presentasi/ Diskusi tahap Pertama. FGD adalah suatu metode riset kualitatif, yang didefinisikan sebagai "suatu proses pengumpulan informasi mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok". FGD merupakan proses pengumpulan informasi bukan

melalui wawancara, bukan perorangan, dan bukan diskusi bebas tanpa topik spesifik. Kegiatan FGD dalam rangka perumusan peta potensi dan peluang investasi daerah diselenggarakan didukung kajian dan masukan dari leading sektor dan SKPD terkait dengan fokus masing-masing layanan sektoral /KPJU. Dari kegiatan FGD ini, selain didapatkan masukan dari multi-stakeholder daerah, juga diharapkan tercipta komitmen dan dukungan, baik teknis maupun politis terhadap rencana pengembangan investasi di Kabupaten Tanah Laut.

#### **3.9.4. Penyusunan Final Draft Dokumen Kajian**

Dokumen disusun berdasarkan outline yang mengacu pada kebijakan dan regulasi investasi nasional (ref: Direktorat Pengembangan Potensi Daerah).

Menuju SIPID : **“ Template cetak potensi dan peluang investasi daerah”**

Template cetak potensi dan peluang investasi daerah dihasilkan dari pembuatan layout SIPID, dengan data yang telah diinput/diintegrasikan dari hasil pengumpulan dan kajian analisis potensi daerah. Dari aplikasi ini, pengguna (users) dapat dengan mudah memodifikasi layout data yang diinginkan.

#### **3.9.5. Presentasi/ Diskusi Finalisasi Hasil : Sosialisasi**

Presentasi/ diskusi pada tahap ini dilakukan untuk mempresentasikan hasil kajian pada semua “stakeholders” untuk mendapatkan pengembangan ke depan.

## BAGIAN 4

### ANALISIS POTENSI, UNGGULAN DAN PELUANG INVESTASI

#### 4.1. Deskripsi Potensi Sektorai / KPJU Daerah

Potensi ekonomi daerah Kabupaten Tanah Laut sebagai kemampuan dasar yang dimiliki daerah, yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Potensi ekonomi daerah Tanah Laut terkait kemampuan daerah ini dalam mengelola secara strategik dan berkelanjutan setiap sektor terkait Komoditi Produk Jenis Usaha (KPJU) pada sistem perekonomian Kabupaten Tanah Laut. Potensi ekonomi daerah bersifat tersedia dan berkembang seiring dengan upaya pembangunan yang dilakukan. Potensi sektoral/KPJU dideskripsikan sesuai data klasifikasi sektor menurut Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI), yang dibagi dibagi ke dalam 9 (sembilan) klasifikasi:

1. Sektor pertanian:
2. Sektor Pertambangan :
3. Sektor Industri Pengolahan:
4. Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih:
5. Sektor Konstruksi:
6. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran:
7. Sektor Angkutan dan komunikasi:
8. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan:
9. Sektor jasa-jasa:

Format layanan usaha kemudian berkembang dengan lapangan usaha dari sektor pembangunan, sehingga menjadi 17 layanan/bidang usaha. Format penyajian data BPS, sektor sesuai KLUI tersebut dikemukakan :

**Tabel 4.1.**  
**Layanan Sesuai Lapangan Usaha**

LAPANGAN USAHA
1. Pertanian
2. Pertambangan & Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik, Gas
5. Pengadaan Air
6. Konstruksi
7. Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi

8. Transportasi dan Pergudangan
9. Akomodasi dan Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi
11. Jasa Keuangan
12. Real Estate
13. Jasa Perusahaan
14. Adm Pem., Pertahanan dan Jamsos
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17. Jasa Lainnya
Jumlah

(Diolah, 2019)

Penyajian lapangan usaha sesuai data BPS, masih belum menyajikan secara eksplisit seperti sub sector –KPJU Pariwisata. Dalam kajian ini sektoral- KPJU Pariwisata dinyatakan sebagai bagian dari layanan usaha nomor 9 (Akomodasi dan Makan Minum).

#### 4.2. Manajemen Investasi : Peran Pemerintah

##### 4.2.1. Peran Pemerintah Daerah

###### 1) Kerangka Regulasi

Berdasarkan RPJPN dan RPJMN dilakukan pembangunan nasional dan daerah otonom. Terdapat 2 (dua) pendekatan dalam implementasi pembangunan. Pertama, Pelaksanaan kerangka regulasi dan kedua, pelaksanaan kerangka anggaran.

Peran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dicapai melalui : (i) Kerangka Anggaran dan (ii) Kerangka Regulasi. Kebijakan tersebut dilaksanakan mengacu pada pola perencanaan yang diberlakukan secara nasional.

No	NASIONAL	DAERAH
1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
3	Rencana Strategis Kementerian / Lembaga	Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
4	Rencana Kerja Pemerintah	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
5	Rencana Kerja Kementerian / Lembaga	Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
	RKA-DPA (APBN)	RKA-DPA SKPD (APBD)

RPJM NASIONAL	RPJM DAERAH
Penjabaran visi, misi, Program Presiden (dan Kementerian); Berpedoman pada RPJP Nasional	Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah; Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional
Isi: 1. Strategi Pembangunan Nasional 2. Kebijakan Umum 3. Kerangka Ekonomi Makro 4. Program kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran	Isi: 1. Strategi Pembangunan Daerah 2. Kebijakan Umum 3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 4. Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam: Kerangka Regulasi Kerangka Anggaran

**Gambar 4.1.**  
**Kerangka Regulasi**

Kerangka Regulasi:

Sebagai kegiatan dalam Program dengan peran Investasi Masyarakat (Swasta)

Karakteristik : Meskipun ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), namun dalam kegiatan pembangunan yang dibiayai dan dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri tetap yang paling utama, dengan pertimbangan :

- Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan kegiatan pembangunan oleh masyarakat juga harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta berkeselamatan.
- Untuk itu, perlu pengaturan dari pemerintah;
- Pemerintah juga wajib memfasilitasi dan mendorong agar kegiatan masyarakat tersebut senantiasa dapat berkembang;
- Kegiatan pemerintah dalam mengatur, memfasilitasi, dan mendorong masyarakat selanjutnya dinamakan kegiatan pemerintah dalam “kerangka regulasi”.

Proses pemenuhannya mengacu pada konsep omnibus regulation untuk menetapkan ex ante dan ex post regulation.

Landasan Hukum

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan-Nasional.

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal  
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun-2012.

## **2) Kerangka Anggaran:**

Sebagai kegiatan dalam Program : Investasi / Layanan Umum dilakukan oleh Pemerintah dengan dana APBN/APBD. Sesuai karakteristik: Tidak semua barang dan jasa yang diperlukan dapat dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri;

- Pengadaan belanja modal untuk pertahanan dan keamanan; jalan umum; jembatan; fasilitas pengolah limbah; subsidi pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.
- Untuk barang dan jasa seperti itu, pemerintah wajib menyediakannya;

Kegiatan pemerintah menyediakan barang dan jasa seperti ini dinamakan “kerangka anggaran”. Proses dan mekanisme ditetapkan dalam menetapkan RKA SKPD dan DPA SKPD melalui tahap sebelumnya (KUA-PPAS).

Alasan perubahan Sistem Penganggaran :

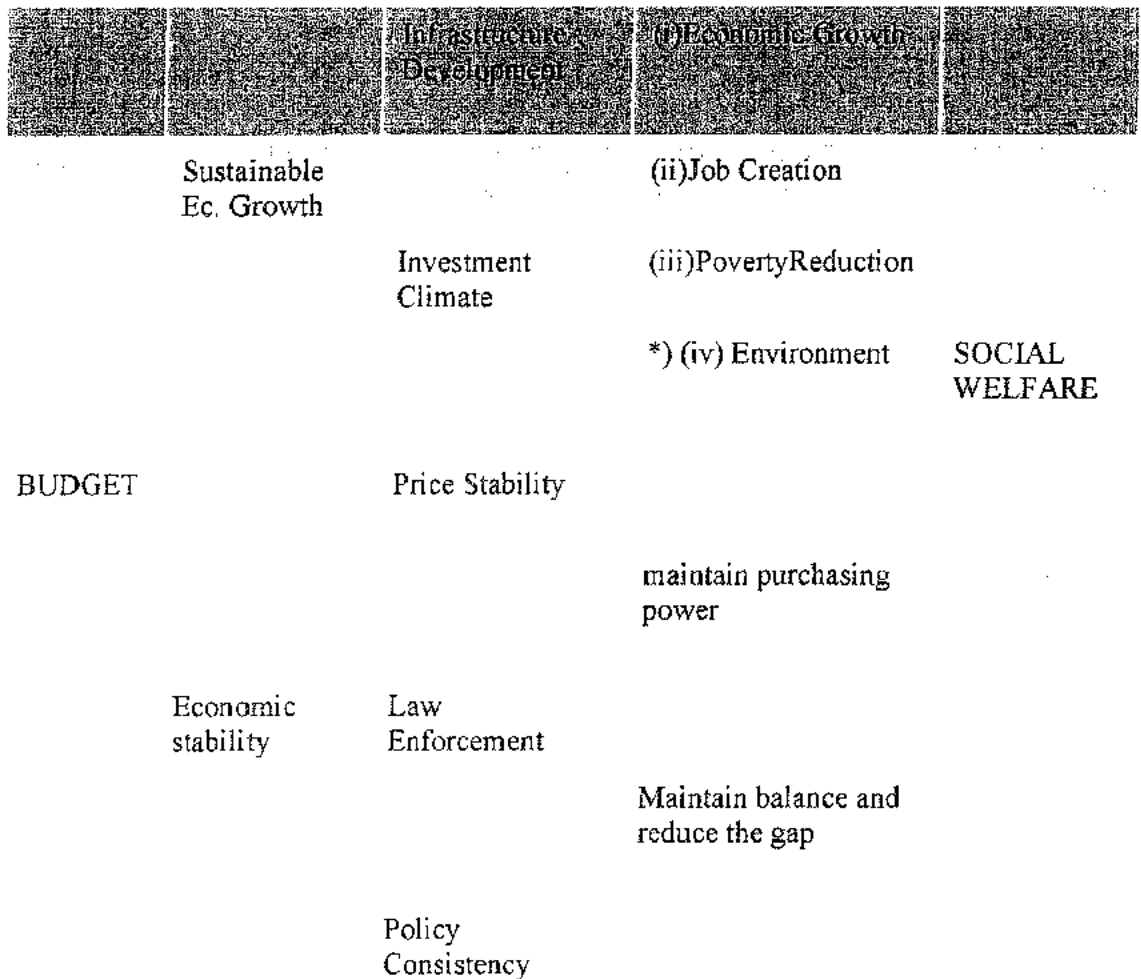
- (i) Kondisi infrastruktur dan pelayanan publik serta profil kegiatan/proyek APBN/APBD;
- (ii) Pelurusan tujuan dan fungsi anggaran pemerintah;
- (iii) Peningkatan peran dunia usaha;
- (iv) Peningkatan wewenang daerah;
- (v) Peningkatan peran dan akuntabilitas kementerian negara/lembaga;
- (vi) Peningkatan peran DPR/DPRD dan masyarakat;
- (vii) Perubahan sistem pemilihan Presiden/Gubernur/ Walikota;
- (viii) Respons terhadap pengaruh globalisasi.

Pendekatan penyusunan anggaran:

- (i) Menggunakan anggaran berbasis kinerja
- (ii) Menggunakan anggaran tunggal (unified budget)
- (iii) Menggunakan format anggaran defisit
- (iv) Klasifikasi menurut organisasi, fungsi dan ekonomi (jenis belanja)
- (v) Penggunaan Kerangka Pengeluaran Jangka menengah

**Instrumen APBD Sesuai APBN Untuk RUPM dan Investasi**

Dimensi APBD dan tujuan pembangunan:



**Gambar 4.2.**  
**APBD Sesuai APBN dan Tujuan Pembangunan**  
 (Sumber, Diolah kembali, 2019)



Berdasarkan ruang lingkup skema pembangunan dengan instrument APBD sebagai turunan dari APBN, maka penyusunan Aspek-aspek RUPM adalah sebagai investasi yang dilakukan pihak di luar Pemerintah dengan dukungan kerangka regulasi. Dari sisi Pemerintah juga dilakukan investasi melalui belanja langsung (capital expenditure) yang untuk tujuan penumbuhan iklim investasi dalam tujuan pembangunan. Prioritas RUPM/investasi di lingkungan Kabupaten Tanah Laut dilakukan dengan mempertimbangkan sector-sektor di mana: (i) terdapat kebutuhan pembangunan (dilakukan dengan investasi Pemerintah); (ii) terdapat prioritas unggulan (dilakukan dengan skema RUPM) melalui peran masyarakat dan swasta.

#### **4.2.2. Implementasi :Kerangka Regulasi dan kerangka Anggaran dan RUPM**

Penanaman modal di Kabupaten Tanah Laut dilakukan dengan sumber pembangunan berasal dari internal (pemerintah Kabupaten/APBD/Belanja Langsung/Belanja Barang Modal untuk publik); Pusat (APBN), dan sektor swasta dan masyarakat melalui PMDN dan PMA. Mekanisme belanja modal untuk publik dilakukan dalam upaya keberlanjutan atas pembangunan yang sudah dilaksanakan. Pemerintah bertanggungjawab melakukan fasilitasi Jalan, Komunikasi, utility (Listrik, Air bersih, Air minum). Juga peran Swasta dan masyarakat melalui fasilitas perhotelan atau akomodasi representatif di daerah. PMDN dan PMA dilakukan pada berbagai Komoditi /Produk/Tenis Usaha (KPJU) yang bersifat unggulan dan potensial, termasuk sebagai KPJU prioritas.

#### **4.2.3. Manajemen Investasi SKPD**

Setiap SKPD sebagai lintas sector bersama leading sector DPMPTSP memiliki fungsi dan peran dengan kerangka regulasi (mengacu pada aturan yang mengatur peran PMA dan PMDN), dan kerangka anggaran (realisasi belanja modal/investasi publik). Setiap penanaman Modal berdampak pada penerimaan (arus kas /penerimaan organisasi/SKPD).

**Tabel 4.2.**  
**Entitas SKPD : Fungsi dan Peran Investasi dan Keuangan Daerah**  
**Kabupaten Tanah Laut**

No	SKPD	Fungsi dan Peran
1	Sekretariat Daerah	Administrator Pembangunan
2	Sekretariat DPRD	Kerangka Regulasi
3	Inspektorat Kabupaten	Pengawasan Internal
4	Bappeda	Perencanaan Strategik
5	Badan Kepegawaian dan pengembangan SDM	Pengembangan SDM Layanan
	Layanan Wajib (W) dan Urusan/Layanan Pilihan (P)	
6	BPKAD	Entitas penunjang bidang keuangan terkait keuangan sesuai kewenangan daerah: Administrasi penerimaan Pajak Hotel, Losmen, Restoran, Hiburan, Reklame, Penerangan jalan, Peng Bhn, Galian Gol C, sarang Burung Walet, Restribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah Administrasi Penerimaan daerah dari Dana Pusat/Perimbangan
7	Badan Pendapatan Daerah	Pajak Daerah
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
11	Dinas Kesehatan	Restribusi layanan Kesehatan
12	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan	Kerangka Anggaran dan Kerangka Regulasi: Restribusi Layanan Sampah dan Kebersihan, Pemakaian KD, IMB, Ijin Usaha Js Konstruksi & Konsultansi
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Properti, Restribusi Ijin Gangguan (HO)
14	Dinas Sosial	Restribusi : Ijin Pengumpulan Uang , Atau Brg Undian
15	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (urusan pilihan)	Ketahanan Pangan: Ijin Usaha Perikanan, Pangutan Perikanan
19	Dinas Pariwisata	Restribusi: Ijin Usaha RM, Ijin Usaha Penggolongan Hotel, Ijin Usaha Rekreasi & Hiburan Umum
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BUMDES
21	DPMPTSP	Potensi Investasi Sektoral/KPJU dan PAD Leading Sektor Perijinan Manajemen Investasi: SIPID
22	Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Restribusi: Penggantian By KTP & Akte Capri, Js Umum
23	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan (Urusan Pilihan)	Restribusi Ijin Tempat Penjualan:- Kompensasi Ubah/Balk Nama Kios/Loko Milik Pemda, Materai Leges
24	Dinas Perhubungan	Restribusi Layanan Parkir

		Di Tepi Jln Umum, Restribusi Layanan Pelabuhan, Pengujian KB, PKD, Ternanal, Layanan Pelabuhan, Ijtn Trayek, Dok Kapal, Js Umum
25	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
26	Dinas Tanaman Pangan, Hortikulturadan Perkebunan (Urusan Pilihan)	Restribusi Ijin Pengambilan Hasil hutan
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Urusan Pilihan)	
28	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Urusan Pilihan)	Restribusi Layanan Ketenagakerjaan Iuran IMTA, Pajak.
29	Satpol PP PK	
30	KECAMATAN	
1	Peluhari	KPJU
2	Bati-Bati	KPJU
3	Takisung	KPJU
4	Batu Ampar	KPJU
5	Jorong	KPJU
6	Bajuin	KPJU
7	Kintap	KPJU
8	Bumi Makmur	KPJU
9	Kurau	KPJU
10	Tambang Utang	KPJU
11	Panyipatan	KPJU

(Sumber: Diolah Tahun 2019)

Manajemen investasi daerah memerlukan peran integrated dari semua SKPD. Leading sector DPMPTSP menjadi fungsi koordinasi data dan informasi dan pemenuhan perijinan terkait investasi sektoral di Kabupaten Tanah Laut. Berbasis standar pelayanan minimal setiap SKPD memberikan layanan bersifat fungsional dan administrative untuk manajemen investasi daerah. Sesuai tupoksi, fungsi dan peran SKPD secara langsung dan secara tidak langsung berada dalam pengembangan organisasi. Manajemen investasi memerlukan pengembangan secara strategic dengan implementasi secara teknis, administrative, sosial komunikasi. Diperlukan syarat jejaring internal dan eksternal dalam menopang manajemen investasi melalui fungsi dan peran setiap SKPD.

Secara strategic induk perencanaan dibangun berdasarkan pengendalian perencanaan dan pengendalian administrative. Standar layanan SKPD sesuai sector pembangunan berkaitan dengan pelayanan dalam manajemen investasi secara fungsional terkait KPJU. Hal ini memerlukan pendekatan pengelolaan didasarkan syarat pemenuhan jejaring internal lintas SKPD dengan Efisiensi operasi melalui spesialisasi, standardisasi, dan teknik-teknik yang memberikan perlu

penguatan manajemen. Perlunya penguatan integrasi operasi dengan penetapan target/sasaran, komunikasi formal, hirarki wewenang, peraturan, prosedur layanan, pengawasan dan pengendalian, entrepreneurship sektoral layanan investasi daerah. Secara administratif diperlukan jejaring eksternal dengan investor melalui kriteria layanan dengan penetapan standar capaian, penguatan pengendalian lingkungan, entrepreneurship sektoral-KPJU. Layanan investasi berada pada lingkungan geografis dan administrasi pemerintahan di tingkat Desa/Kelurahan pada sebaran Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut. Manajemen investasi memerlukan konfirmasi lokasi dengan daya dukung dan daya tampung aktifitas usaha bisnis sesuai karakteristik aktifitas operasional pada KPJU pilihan investor.

**Tabel 4.3.**  
**Pengembangan Investasi Daerah Sesuai Kawasan Pembangunan -Lokasi**  
**Administrasi Kecamatan Kabupaten Tanah Laut**

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Sektoral/KPJU
1	Panyipatan	10 Desa	Pertanian, Perikanan, Wisata
2	Takisung	12 Desa	Pertanian, Perikanan, Wisata
3	Kurau	11 Desa	Pertanian
4	Bumi Makmur	11 Desa	Pertanian
5	Bati-Bati	14 Desa	Industri
6	Tambang Ulang	9 Desa	
7	Pelaihari	5 Kelurahan 15 Desa	Wisata
8	Bajuin	9 Desa	Wisata
9	Batu Ampar	14 Desa	
10	Jorong	11 Desa	Industri, Pertanian, Perikanan, Pertambangan
11	Kintap	14 Desa	Pertanian, Perikanan, Pertambangan
		130 Desa 5 Kelurahan	

(Sumber, \*) Diolah, DPMD, RPJMD, RTRW, Tala, 2019)

Pendekatan manajemen investasi Leading sektor menggunakan Pola strategi:

**Strategi promosi dilakukan dengan cara mengelompokkan potensi investasi daerah ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:**

**1. Kelompok Investasi yang Potensial untuk Dilakukan (*Potential Investment*).**

Kriteria investasi pada kelompok ini adalah:

- a. Kesesuaian dengan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ataupun Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

- b. Kesesuaian dengan Rencana Strategis (Renstra) sektor-sektor, baik nasional maupun daerah, khususnya bidang pangan, energi dan infrastruktur;
- c. Kesesuaian lokasi investasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- d. Keterkaitan antara sektor pangan, energi dan infrastruktur dengan wilayah Kabupaten/ Provinsi;
- e. Berpotensi untuk menutup biaya (*cost recovery*);
- f. Studi pendahuluan (*preliminary study*).

**2. Kelompok Investasi yang Prioritas untuk Dilakukan (*Priority Investment*).**

Kriteria investasi pada kelompok ini, adalah:

- a. Usulan penanaman modal berasal dari Pemerintah Daerah atau investor yang benar-benar serius hendak menanamkan investasi di daerah;
- b. Berdasarkan kajian pra-kelayakan (*pre-feasibility*) yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Daerah ataupun Pemerintah Pusat, kegiatan penanaman modal dinyatakan layak, baik dari segi hukum, teknis, dan finansial;
- c. Resiko dan pengalokasian resiko telah teridentifikasi;
- d. Termasuk dalam usulan prioritas program Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) dan bentuk KPS telah terdefiniskan;
- e. Pemerintah membantu pengidentifikasian investasi untuk kegiatan pengentasan kemiskinan.

**3. Kelompok Investasi yang siap Ditawarkan (*Investment Ready for Offer*).**

Kriteria kelompok investasi ini, antara lain:

- a. Dokumen pendukung investasi sudah lengkap;
- b. Dukungan pemerintah telah disetujui (jika diperlukan);
- c. Apabila termasuk dalam program KPS yang ditawarkan oleh pemerintah, setidaknya sudah tersedia dokumen lelang, tim panitia pengadaan sudah terbentuk dan jadwal pelelangan sudah terdefinisi.

### 4.3. Deskripsi Layanan Usaha

#### 4.3.1. Pertanian

Sektor pertanian: sub sektor tanaman bahan makanan, sub sektor tanaman perkebunan, sub sektor peternakan, sub sektor kehutanan, sub sektor perikanan.

##### a. Pertanian Tanaman Pangan

Pembangunan pertanian dalam arti luas mencakup pertanian tanaman pangan, Tanaman Buah-Buahan, Tanaman Sayuran, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, peranan sektor pertanian adalah meningkatkan pendapatan sebagian besar masyarakat petani, meningkatkan produksi dan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, mengentaskan penduduk dari kemiskinan, mengurangi kesenjangan pendapatan antar daerah dan antar golongan masyarakat, serta dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan pertanian memegang peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi terutama untuk meningkatkan taraf hidup petani sebagai kelompok masyarakat yang terbesar, disamping mendukung pertumbuhan industri.

Areal pertanian di Kabupaten Tanah Laut sebagian besar digunakan untuk menanam padi, jagung, kedelai serta singkong dan umbi-umbian. Tanaman Padi dengan luas areal produksi (panen) 43.838 Ha, dengan jumlah produksi gabah 175.669 ton dan beras 103.114 ton dan jumlah konsumsi beras 41.228 ton/tahun, sedangkan jagung luas areal produksi (panen) sebesar 11.099 Ha, dengan jumlah produksi sebesar 62.467 ton dan jumlah konsumsinya sebesar 62.467 ton/tahun, tanaman kedelai dengan luas areal produksi (panen) sebesar 727 Ha, dengan jumlah produksi sebesar 1.080 ton dan jumlah konsumsi sebesar 1.080 ton, industri pengolahan hasil pertanian sebanyak 20 buah, untuk singkong dan umbi-umbian dengan luas areal produksi (panen) sebesar 2.703 ha, dengan jumlah produksi sebesar 47.152 ton. Luas kesesuaian lahan pertanian adalah lahan pasang surut/irigasi sebesar 24.552 Ha, lahan basah sebesar 76.143 Ha, lahan kering sebesar 177.069 Ha, lahan kelapa sebesar 1.179 Ha, lahan kelapa sawit sebesar 91.355 Ha, lahan karet sebesar 20.729 Ha, dan lahan kopi robusta sebesar 281 Ha.

**Tabel 4.4.**  
**Jenis Tanaman Pangan : Padi dan Palawija (Produksi/Ton)**

No	Jenis Tanaman	Tanam (Ha)	Rusak (Ha)	Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Padi Sawah	44.330	33	43.816	180.144
2	Padi Ladang	2.272	4	2.614	8.043
3	Jagung	14.301	1	14.045	80.108
4	Kacang Kedelai	1.776	18	1.629	2.276
5	Kacang Tanah	855	-	854	1.131
6	Kacang Hijau	122		120	142
7	Ubi Kayu	1.014		831	14.731
8	Ubi Jalar	152		180	2.756

(Sumber, Dinas PTP & P, Tala, 2015)

**Tabel 4.5.**  
**Jenis Tanaman :Buah-Buahan**

No	Jenis Tanaman	Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Alpukat	4	17
2	Belimbing	8	17
3	Blewah	0	79
4	Langsat	80	65
5	Durian	626	24
6	Jambu Biji	124	27
7	Jambu Air	24	75
8	Jeruk Siam	876	24
9	Jeruk Besar	11	66
10	Mangga	165	8
11	Manggis	1	10
12	Nangka-Cempedak	1.087	14
13	Nanas	207	
14	Pepaya	219	
15	Pisang	536	
16	Rambutan	1.545	
17	Salak	9	
18	Sawo	230	
19	Semangka	116	
20	Sukun	212	
21	Melinjo	230	
22	Petai	522	
23	Jengkol	12	

(Sumber, 2012, Dinas PTP da P, Tala, 2015)

**Tabel 4.6.**  
**Jenis Tanaman : Sayur-Sayuran**

No	Jenis Sayuran	Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1	Bawang Daun	4	17
2	Sawi	6	17
3	Kacang Panjang	30	79
4	Cabe Rawit	26	65
5	Cabe Merah	10	24
6	Tomat	9	27
7	Terung	29	75
8	Buncis	10	24
9	Keimun	21	66
10	Labu Siam	3	8
11	Kangkung	4	10
12	Bayam	6	14

(Sumber, 2012, Dinas PTP dan P, Tala, 2015)

#### 4.3.2. Perkebunan

Luas areal perkebunan di Kabupaten Tanah Laut mencapai 21.954,00 Ha, terdiri dari luas tanaman belum menghasilkan sebesar 12.715 Ha, luas tanaman menghasilkan sebesar 8.854,50 Ha, dan luas tanaman tua/rusak sebesar 384,50 Ha. Dengan produksi sebesar 60.714,76 ton. Jenis tanaman perkebunan yang potensial untuk menjadi tanaman andalan dewasa ini adalah tanaman kelapa sawit dan karet. Produksi tanaman kelapa sawit mencapai 35.117 ton dengan tingkat produktivitas sebesar 134 kw per hektar dan akan semakin besar di tahun-tahun mendatang mengingat luas lahan yang belum menghasilkan yang luasnya mencapai 5.444 Ha. Produksi tanaman karet mencapai 17.690 ton dengan tingkat produktivitas 41 Kw per hektar. Produksi karet ini juga masih mempunyai potensi yang cukup besar jika melihat luasnya lahan tanaman karet yang sudah ditanam tapi belum menghasilkan sebesar 6.942 Ha.

**Tabel 4.7.**  
**Perkebunan**

No	Tanaman	Luas Lahan (Ha)			Produksi (Ton)	Rata-Rata Produksi (Kg/Ha)
		Belum Menghasilkan	Menghasilkan	Rusak		
1	Karet	7.288	5.799	83	8.756.49	1.510
2	Kelapa Dalam	193	927	17	1.353.42	1.460
3	Kelapa Hibrida	-	-	-	-	-
4	Kelapa Sawit	5.920	5.438	30	130.512.00	24.000



5	Cengkeh	-	250	12	135.25	541
6	Kopi	3	159	1	206.70	1.304
7	Jarak					
8	Lada	4	18		16.58	921
9	Jambu Mete		40		32	800
10	Kapuk	1	15		5.25	350
11	Kemiri	5	139	2		
12	Aren	32	51		510	10.000
13	Pinang	4	9		3.60	400

(Sumber, Dinas PTP & P. Tala. 2015)

Komoditi Karet dan Kelapa Sawit adalah 2 (dua) komoditas utama yang terus bertumbuh.

- Tahun 2010, dengan luas tanam komoditi karet mencapai 15.374 Ha dengan produksi 11.626 ton, meningkat pada tahun 2010 produksi karet mencapai 18.126 Ha dan data produksi sampai September 2010 mencapai 9.656 ton. Dibandingkan data laporan tahun 2015 terjadi penurunan luas tanam dalam ha, serta produksi yang dicapai.

Tabel 4.8.

#### Deskripsi Perusahaan Karet

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Luas Areal (Ha)	Luas Tanam (Ha)
1	PT Kintap Jaua Wattindo	Pelaihari	1.729.44	2.000.44
2	PT Multi Raya Anugerah	Tambang Ulang	223.40	25.00
3	PT Bridgestone K. Plant	Bati-Bati	5.971.00	4.333.54
4	PT Malindo Jaya Diraja	Kintap	9.638.00	-
5	PT Pugug Raya	Bati-Bati		10.00
6	PT Daya Gawi		321.00	321.00

- Komoditi Kelapa sawit dalam tahun 2009 mmencapai luas lahan tanam 80.084 Ha, dengan produksi mencapai 71.148 ton, dalam tahun 2010 mencapai peningkatan luas lahan yanam menjadi 91.023 Ha dengan produksi mencapai 45.205 ton (sampai September 2010). Kondisi ini mengalami peningkatan dalam capaian produksi sesuai data dalam tabel.

Tabel 4.9

#### Perusahaan Swasta Kelapa Sawit

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Luas Areal (Ha)	Luas Tanam (Ha)
1	PT Gawi Makmur K	Batu Ampar. Jorong. Kintap	13.290.00	9.583.00
2	PT Kintap J Wattindo	Kintap. Pelaihari. Takisung. Kurau	6.033.40 1.760.06 4.794.76 945.18	5.887.00 1.760.10 4.794.80 945.20

3	PT Smart Corporation	Kintap	11.700,00	5.476,89
4	PT Pola K I S	Kintap	6.500,00	3.495,00
5	PT Candi A Batu Ampar	Batu Ampar	2.140,00	2.081,54
6	PT Lunik Anugerah	Batu Ampar	1.130,00	1.130,00
7	PT Indoraya Everlatex	Kintap	11.583,00	4.356,00
8	PT Sarana Subur A	Jorong	3.536,00	1.005,00
9	PT Emida	Jorong	683,00	683,00
10	Sinar Surya J	Batu Ampar	418,88	792,98
		Kandangan Lama	612,47	530,00
		Batu Tungku	126,00	
		Panyipatan	185,00	
11	PT Bangun Kalimantan	Sabuhur	805,00	397,00
12	PT Citra Putera K Asri	Jorong	2.332,4	796,34
13	PT Sentosa Sukses Utama		10.972,00	819,49

**Tabel 4.10**  
**. Luas Dan Produksi Tanaman Kelapa Sawit**

Tahun	Luas (ha)	Produksi
2015	93.790	144.739
2014	104.572	836.570
2013	84.935	175.045

**Tabel 4.11.**  
**Luas dan produksi Tanaman Karet**

Tahun	Luas (Ha)	Produksi (ton)
2015	21.817	13.741
2014	21.208	3.727
2013	20.828	15.446

(RPJMD Tala 2013-2018)

Pertumbuhan PDRB atas harga konstan Kabupaten Tanah Laut bertumbuh dari tahun 2013 (5,83), 2014 (18,14), dan 2015 (25,30/angka sementara).

#### 4.3.3. Peternakan

Menurut jenisnya usaha peternakan dibedakan atas ternak besar (sapi, kuda dan kerbau), ternak kecil (babi, kambing, domba) dan ternak unggas (ayam dan itik). Ternak sapi merupakan primadona komoditi peternakan Kabupaten Tanah Laut yang mengalami peningkatan populasi. Selain ternak sapi sebagai sumber suplai komoditas daging, Kabupaten Tanah Laut juga banyak memiliki jenis ternak Kerbau dan kambing.

**Tabel 4.12**  
**Populasi Ternak Ruminansia**

No	Kecamatan	Sapi Potong	Kerbau	Kuda	Kambing
1	Pelaihari	11.859	37	4	107
2	Bajuin	4.695	181	-	578
3	Takisung	10.720	160	-	5.618

4	Panyipatan	11.131	232	32	2.507
5	Jorong	3.690	1.461	-	2.652
6	Batu Ampar	7.995	480	-	2.164
7	Kintap	1.939	668	-	3.342
8	Tambang Ulang	2.030	27	-	2.223
9	Bati-Bati	2.243	65	-	557
10	Kurau	745	-	-	616
11	Bumi Makmur	62	-	-	534
		57.101	3.331	36	20.898

(Sumber, Dinas PTP dan P, Tala, 2015)

Tabel 4.13.

Populasi Ternak Unggas

No	Kecamatan	Ayam Buras	Ayam layer	Ayam Broiler	itik
1	Pelaihari	227.548	556.947	4.607.004	7.680
2	Bajun	136.470	9.166	1.833.953	197
3	Takisung	69.889	60.322	1.837.325	8.032
4	Panyipatan	75.425	16.273	402.965	30.931
5	Jorong	82.584	693.889	229.152	4.128
6	Batu Ampar	128.522	75.258	1.626.148	14.173
7	Kintap	96.235	37.551	125.175	31.400
8	Tambang Ulang	59.235	93.225	3.323.423	6.494
9	Bati-Bati	218.628	685.926	7.965.587	5.620
10	Kurau	49.391	8.207	12.920	48.643
11	Bumi Makmur	60.548	502	6.955	70.287
		1.205.061	2.777.266	21.970.607	

4.3.4. Kelautan Dan Perikanan

Pada tahun 2011 produksi perikanan laut tercatat sebanyak 37,483 ton dan produksi perikanan perairan umum tercatat sebanyak 4.708 ton. Jumlah kapal penangkap ikan tahun 2011 mencapai 1.929 unit. Guna mendukung armada penangkapan di laut perlu dukungan peralatan penangkapan bagi nelayan untuk dapat memanfaatkan potensi secara maksimal. Luas perikanan darat di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2011 adalah seluas 9.174,3 m<sup>3</sup> dengan jumlah rumah tangga produksi sebesar 231 ton. Produksi perikanan perairan umum sebesar 4.708 ton. (data akhir + an)

Tabel 4.14  
Produksi Ikan Laut

No	Jenis Ikan	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp)
1	Peperek	2.118,4	21.184.000,00
2	Mayung	3.984,9	91.652.700,00
3	Geret-geret	0,00	0,00
4	Bambangan	544,4	13.610.000,00

5	Kakap Putih	1.121,0	33.630.000,00
6	Gulamah	2.485,1	74.553.000,00
7	Cucur	0,00	0,00
8	Pari	2.595,6	46.720.800
9	Bawal Hitam	0,00	0,00
10	Bawal Putih	1.485,0	51.975.000,00
11	Selar	1.913,0	19.130.000,00
12	Belanak	3,2	48.000,00
13	Kuro/Senangin	42,1	631.500,00
14	Teri	719,6	8.635.200,00
15	Tembang	3,2	35.200,00
16	Golak-Golak/Perang	0,00	0,00
17	Tenggiri Papan	1.474,8	36.870.000,00
18	Tongkol	2.081,8	52.045.000,00
19	Tenggiri	1.480,6	44.418.000,00
20	Udang Windu	1.998,5	99.925.000,00
21	Udang Putih	4.980,2	99.6004.000,00
22	Udang Lain	0,00	0,00
23	Udang Rebon	3,6	64.800,00
24	Cumi-Cumi	3.221,5	80.537.500,00
25	Kembung	349,2	4.888.800,00
26	Ikan Lain	1.809,6	14.476.800,00
27	Ikan Sebelah	339,1	3.051.900,00
28	Rajungan	652,3	15.002.900
29	Ikan Layur	0,00	0,00

(Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, Tala, 2015)

#### 4.3.5. Kehutanan

Kabupaten Tanah Laut memiliki areal hutan seluas 156.291,97 Ha, yang terdiri dari hutan kawasan lindung dengan luas 15.861 Ha, hutan suaka alam dan wisata dengan luas 27.662 Ha, hutan produksi tetap dengan luas 71.658 Ha, hutan produksi terbatas dengan luas 5.290, hutan yang dapat dikonversi dengan luas 12.174 Ha, hutan bakau dengan luas 9.121,97 Ha, dan hutan rakyat dengan luas 14.525 Ha. Hutan di Kabupaten Tanah Laut menghasilkan kayu bulat rata-rata 13.346,10 m<sup>3</sup> dan kayu gergajian rata-rata 17.116,13 m<sup>3</sup>. Luas lahan kritis pada areal hutan di Kabupaten Tanah Laut sebesar 54.929 Ha dan sangat kritis sebesar 17.307 Ha. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius sehingga diharapkan lahan kritis di Kabupaten Tanah Laut tidak bertambah.

#### 4.3.6. Pertambangan dan Energi

**Sektor Pertambangan :** sub sektor pertambangan minyak dan gas bumi, sub sektor pertambangan non migas, sub sektor penggalan

**Batubara**

Sektor pertambangan, khususnya pertambangan batubara, beberapa tahun terakhir sudah mengambil peranan dalam perekonomian Tanah Laut. Berdasarkan data produksi tahun 2011 adalah Batubara sebanyak 7.574.553,547 MT, Bijih besi sebanyak 226.878,707 MT, dan Bijih Nikel sebanyak 11.341.219 MT. Sektor pertambangan mengambil peranan dalam perekonomian Tanah Laut, berdasarkan data yang diperoleh tercatat, yaitu :

- Batubara, berlokasi di Kecamatan Kintap, Jorong, Panyipatan, Batu Ampar, Bati-Bati dan Takisung, dengan luasan 185.134,17 Ha
- Batu Besi, berlokasi di Kecamatan Pelaihari dan Panyipatan, dengan luasan 479.814,87 Ha
- Emas, berlokasi di Kecamatan Pelaihari, Tambang Ulang, Bati-Bati dan Kurau, dengan luasan 587,05 Ha
- Nikel, berlokasi di Kecamatan Bati-Bati, dengan luasan 5.535,00 Ha
- Kromit, berlokasi di Kecamatan Pelaihari, dengan luasan 4.679,00 Ha
- Andesit, berlokasi di Kecamatan Pelaihari, dengan luasan 125,19 Ha
- Batu Gamping, berlokasi di Kecamatan Kintap, dengan luasan 2.246,48 Ha
- Intan, berlokasi di Kecamatan Bati-Bati dan Kurau, dengan luasan 190,43 Ha
- Mangan, berlokasi di Kecamatan Pelaihari dan Tambang Ulang, dengan luasan 3.009,96 Ha
- Marmer, berlokasi di Kecamatan Kintap, Jorong dan Pelaihari, dengan luasan 784,88 Ha
- Oker, berlokasi di Kecamatan Pelaihari dan Panyipatan, dengan luasan 556,32 Ha
- Pasir Kuarsa, berlokasi di Kecamatan Jorong dan Panyipatan, dengan luasan 3.802,17 Ha
- Peridotit, berlokasi di Kecamatan Panyipatan, dengan luasan 60,05 Ha
- Tanah Liat, berlokasi di Kecamatan Jorong, Panyipatan, Batu Ampar dan Pelaihari, dengan luasan 1.895,39 Ha

**Tabel 4.15.**  
**Perizinan Pertambangan**

No	Jenis Usaha	Jenis Ijin	Jumlah
1	Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi	Batu Bara Biji Besi Mangan	55 2 8

		Biji Nikel	5
		Batu Kromit	6
		Emas	2
2	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi	Batu Bara	76
		Biji Besi	13
		Mangaan	2
		Biji Nikel	2
		Batu Kromit	6
		Emas	3
3	Izin Usaha Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian Khusus	Biji Besi	1
		Batu Bara	0
4	Izin Usaha Jasa Pertambangan		1

(Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi, Tala, 2015)

**Tabel 4.16.**  
**Produksi Bahan Tambang Menurut Jenisnya 2013-2015**

No	Jenis Bahan Tambang	Produksi (MT)		
		2013	2014	2015
1	Batu bara	14.957.535,55	8.787.474,38	10.236.157.160
2	Bijih Besi	83.976,67	20.052,12	32.208.720
3	Mangaan	0	0	0
4	Baijih Nikel	0	0	0
5	Batu Kromik	0	0	0

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanah Laut (RPJMD Tala 2013-2018)

Dalam struktur perekonomian sector –KPJU pertambangan dan penggalian mencapai 24,41 dari struktur perekonomian tahun 2017.

#### 4.3.7. Industri Pengolahan

Dalam sector industri, industry pengolahan secara umum potensial bagi Kabupaten Tanah Laut dan juga menjadi unggulan, sesuai karakteristik manufaktur dan proses produksi atau pembuatannya, antara lain:

**Tabel 4.17**  
**Sektoral Industri Pengolahan**

Kelompok Industri Pangan (17.1)

No	Komoditi
1	Pentol bakso
2	Ikan Kering Asin, Ikan Asin Talang

3	Udang beku dan Kodok Seger
4	Ikan Rabuk/Abon haruan
5	Saos Tomat
6	Minyak kelapa/VCO
7	Ice Cream, Pudding
8	Tepung Beras
9	Kue kering/Roti/Sejenis
10	Pakan ikan ternak
11	Gula merah
12	Sirup/Glukose
13	Mie basah/macaroni
14	Pengolahan Kopi
15	Pembungkusan the
16	Es batu/Blok
17	Kecap
18	Tempe dan Tahu
19	Susu tahu/Susu kacang kedelai*)
20	Kacang-Kacangan
21	Kerupuk
22	Bumbu Masak
23	Kue basah/Scjenisnya
24	Telur Asin *)
25	Pengemasan garam (Yodium)
26	Petis kering
27	Pembungkusan asam Jawa
28	Pembungkusan Beras
29	Snack Jagung
30	Pembungkusan Kesumba
31	Pembungkusan Mentega
32	Pembungkusan Tepung Tapioka
33	Keripik Singkong
34	Minuman Air Mineral
35	Penggilingan Padi (Rice Milling)

(Sumber, Diolah, kembali, 2019)

#### Kelompok Industri Sandang (17.2)

No	Komoditi
1	Kain Sasirangan
2	Konveksi Gorden
3	Pembungkusan Kapas
4	Penjahitan Karung Goni
5	Pakaian Jadi Rajutan
6	Pembuatan Kasur, bantal, dll
7	Konveksi Pakaian Jadi
8	Jasa Binatu Pakaian, Karpel dll
9	<b>Jasa sandang lainnya</b>

(Sumber, Diolah, kembali, 2019)

Kelompok Industri Kimia dan Bahan Bangunan (17.3)

No	Komoditi
1	Panel kayu
2	Wood Working
3	Pintu, Moulding
4	Peti Kemas Kayu (Pallet)
5	Rekaman/Video Shoting
6	Penerbitan Tabloid
7	Pembuatan Photo
8	Percetakan
9	Pembuatan Lilin Lampu
10	Tepung Arak batok, Arang Kayu
11	Cat Untuk bahan bangunan
12	Bedak/Kosmetik Tradisional
13	Pembuatan Sabun
14	Tawas & Kaporit
15	Interior Rumah Tangga
16	Room Caster plastik, Riber glos
17	Lukisan dari Kaca
18	Gypsum
19	Tajau dari Semen
20	Batako/bata Press, Bata Merah
21	Furniture kayu/Kursi, Meja dll
22	Furniture dari Rotan
23	Sablon
24	Kasur Busa, Busa dari karet
25	Sablon
26	Moulding
27	

Sumber, Diolah, kembali, 2019)



Kelompok Industri Logam dan Elektronik (17.4)

No	Komoditi
1	Pengecoran Besi
2	Pagar, Pintu Teralis
3	Pembuatan Parang dll
4	Alat Pertanian dari Logam
5	Bengkel Las & Bubut
6	Alat dari Logam (Paku ) dll
7	Roda kapal, dll
8	Perabot Rumah tangga
9	Kawat Harmonika
10	Barang Logam Lainnya
11	Pembotolan Minyak K Putih
12	Pembotolan Air Accu
13	Pembotolan Spritus
14	Pompa Sedot Pasir
15	Balancing Turbo & Injection pump
16	Bengkel Gergaji
17	Pembuatan Sound Sistem
18	Perbaikan Dinamo & Strom Accu
19	Perakitan/perbaikan Dinamo
20	Las Listrik & panel Listrik
21	Chroom varnikel kendaraan
22	Pembuatan kapal/Speed Boat
23	Peralatan Kapal
24	Reparasi Kapal
25	Reparasi Sepeda
26	Furniture Logam (bed dll)
27	Alat Peraga Pendidikan
28	Perbaikan kapal/Tongkang
29	Furniture Logam (rak Piring)
30	Barang Logam Lainnya
31	Daur ulang barang dari logam
32	Docking Kapal
33	Js Perbaikan Mobil
34	Js Perbaikan Sepeda Motor
35	Service Barang Elektronik
36	Peralatan Berbahan Aluminium

### Kelompok Industri Kerajinan (17.5)

No	Komoditi
1	Pembersih Kaca dari bulu ayam
2	sapu Ijuk, Topi Purun
3	Anyaman Purun
4	Pembuatan sangkar burung
5	Figura dari Kayu
6	Merangkai bunga, Pakaian hias
7	Dekor huruf, Kaligrafi
8	Daur Ulang barang bukan logam
9	Daur Ulang barang plastik
10	Barang Perhiasan Logam Mulia
11	Konveksi/Sulam Bordir
12	Aneka Anyaman

KPJU Unggulan : \*Industri Pengolahan: KPJU Agro, Pengolahan Daging Sapi, Pengolahan Kulit, Pengolahan Karet, Pengolahan Kelapa Sawit, Pengolahan Jagung, Industri Hasil Perikanan/ Sentra Pengolahan hasil Laut, Pengalengan Ikan, Industri Logam, Industri Tersier: Sentra Industri, Kawasan Industri Jorong

Dalam tahun 2017, sub sector industri pengolahan mencapai 12,85 % dari struktur perekonomian 2017.

#### 4.3.8. Potensi Sektor Industri

Pembangunan sektor industri Tanah Laut dititik beratkan pada pengembangan industri kecil dan menengah yang didalamnya termasuk industri kecil dan kerajinan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan sumber daya yang tersedia baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia disamping dalam rangka menumbuhkan kembangkan ekonomi kerakyatan. Industri kecil dan menengah mempunyai peranan penting dalam mendukung berlangsungnya pertumbuhan industri, produktivitas tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan peranana ekspor non-migas dalam perekonomian Tanah Laut. Sektor industri merupakan salah satu sektor andalan dalam menopang perekonomian di daerah.

Jumlah perusahaan industri formal (berizin) dan jumlah tenaga kerja menurut jenis kelompok industri yaitu : Industri hasil pertanian dan kehutanan (IHPK) sebanyak 1 buah dengan tenaga kerja sebanyak 60 orang. Industri logam

mesin dan kimia (ILMK) sebanyak 1 buah dengan tenaga kerja sebanyak 10 orang. Jumlah perusahaan industri non formal dan jumlah tenaga kerja menurut jenis kelompok industri yaitu: Industri hasil pertanian dan kehutanan (IHPK) sebanyak 212 buah dengan tenaga kerja sebanyak 835 orang, Industri logam mesin dan kimia (ILMK) sebanyak 101 buah dengan tenaga kerja sebanyak 232 orang, Industri Aneka (IA) sebanyak 77 buah dengan tenaga kerja sebanyak 233 orang. Kabupaten Tanah Laut memiliki beberapa kawasan industri yang tersebar di Wilayah Kabupaten Tanah Laut, diantaranya Kecamatan Pelaihari, Kecamatan Bati Bati, Kecamatan Jorong dan Kecamatan Kintap.

**Daya Dukung Kawasan Industri : KPJU Unggulan : Basis "Agro Industri"**

**Deskripsi**

Tujuan agar entitas bisnis yang ada dalam kawasan industri dapat meningkatkan produk hasil pertanian yang masih sebagai bahan setengah jadi, untuk ditingkatkan nilai tambahnya, baik secara teknis/fisik dan secara ekonomis. Kawasan Industri mengelola entitas usaha yang bergerak dari hulu ke hilir untuk mengolah hasil pertanian sampai pemasaran produk, dengan nilai tambah bisnis i (added values), dan menjaga mata rantai nilai (value chains).

**4.3.8.1. Analisis Situasi / Analisis Stakeholders Pilar I MEA:**

Kawasan Industri " Agro Industri" : Pasar tunggal dan basis produksi dengan 5 (lima) elemen : (i) aliran bebas barang (*free flow of goods*).

Kawasan Industri: Agro Industri

Stakeholders	Bagaimana pengaruh dari problem	Kapasitas berhubungan dengan problem	Motivasi untuk problem solving
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut			
Leading Sektor SKPD dan UPTD (BUMD)	Risiko relevansi regulasi dan kerangka anggaran dalam pemberdayaan sub sektor agro industri. Regulasi proteksi DN	Keterbatasan mengacu kesesuaian regulasi Pemerintah Pusat, Regional. Blueprint MEA	Positif dan tinggi untuk penempatan kerangka anggaran dan untuk relevansi regulasi menuju pengembangan kualitas produk agro industri
Private Sektors			
Industri Jasa (Skala Besar, menengah, Kecil) Perdagangan Jasa	Hambatan dalam persaingan kualitas dan syarat penyerahan produk	Keterbatasan infrastruktur dan suprastruktur	Adanya kebutuhan pengembangan kompetensi SDM agro industri.

/Layanan	dengan standar kualitas/sertifikasi produk -Kompetensi SDM industri		pengembangan kuantitas dan kualitas produk agro industri
Society			
Masyarakat Profesi/Asosiasi Konsumen (Gov't. Private. Socio)	Psikologi pilihan kualitas dan nilai tambah perekonomian regional/nasional-agro industri	Terbatas terhadap ketersediaan dan kualitas teknologi proses agro industri	Adanya komunikasi, bidang agro industri, kebutuhan sentra agro industri sesuai komoditi unggulan Kabupaten

Gambar 4.3. : Analisis Masalah ( Problem Analysis)

4.3.8.2. Analisis Problem Agro Industri (free flow of goods),

EFFECT (DAMPAK -)

Administrasi	Adanya disharmoni acuan Regulasi Nasional, Regional, Lokal dan Global dalam memenuhi fasilitas Agro Industri, sentra agro industri sesuai komoditi unggulan
Teknik	Hambatan dalam memenuhi kapasitas proses produksi dalam agro industri yang kompetitif "kepariwisataan". Efisiensi waktu dan kejelasan proses
Sosial	In efektifitas komunikasi SDM Agro Industri jasa, Asosiasi dengan dukungan sistem regulasi, kompetensi proses produksi, marketing agro industri
Strategik	Inefektifitas dalam memenuhi kompetisi untuk MEA (liberalisasi produk agro industri ). belum terintegrasi komoditi agro industri dalam sentra industri, Zona Industri

Problem: Agro Industri (free flow of products),

Casues : penyebab

Administrasi	Belum dipenuhi omnibus regulation dari regulasi lokal dengan Regulasi Nasional, dan regulasi MEA (Global) yang belum harmoni terkait agro industri
Teknik	Kapasitas proses layanan "agro industri" yang kurang kompetitif
Sosial	Lemahnya hubungan SDM agro Industri, dukungan ental practioners, dengan sistem regulasi, kompetensi layanan, marketing agro industri
Strategik	Lemahnya disain strategi yang kompetitif untuk MEA (Strategi untuk pemenuhan mutu/sertifikasi produk) agro terkait fasilitas pergerakan antar region, belum terintegrasinya dokumen perencanaan lini industri.

(1) Leading Sektor : SKPD Terkait Sektoral-KPJU

4.3.8.3. Analisis Tujuan (Objective Analysis);

Setelah menetapkan problem analysis, lakukan objective analysis sebagai titikbalik dari kondisi yang dihadapi). Objective analysis: merubah hal negatif (pada dampak menjadi sesuatu yang positif dan ingin dituju); Core problem dijadikan sebagai benefit atau peranan dan menyatakan sebagai nama kegiatan dari main bussiness investor. Causes atau penyebab dijadikan positif sebagai Main Bussiness yang akan dilakukan sesuai nama program/kegiatan) pembangunan

yang dipertimbangkan akan dinyatakan ke dalam rencana bisnis (Business Plan) perusahaan (investor).

Agro Industri (*free flow of goods*) : Goal/Ends/Objectives

Merubah hal negatif dari Dampak menjadi Tujuan peluang investasi Investor pada Industri Agro Industri.

Administrasi	Mencapai harmoni acuan Regulasi Nasional, Regional, Lokal dan Global dalam fasilitasi Agro Industri.
Teknik	Memenuhi kapasitas proses layanan yang kompetitif, Efisiensi waktu dan kejelasan proses jasa profesional
Sosial	efektifitas komunikasi, SDM Industri, Asosiasi Profesional dengan sistem regulasi, kompetensi proses, marketing
Strategik	Menuju kemampuan kompetisi untuk MEA (liberalisasi produk agro industri sesuai MEA, pemenuhan dokumen perencanaan lini industri agro bisnis.

Komoditi agro industry (*free flow of goods*),

Means (Cara)

Administrasi	Program/Kegiatan/proyek Regulatory Impact Assessment (RIA) terhadap Regulasi Nasional, Regional, Lokal dan Global
Teknik	Program/kegiatan/proyek peningkatan kapasitas proses layanan jasa yang kurang kompetitif jasa profesional
Sosial	Program/Kegiatan/Proyek dalam strategi hubungan SDM Industri jasa, Asosiasi profesional: Arsitektur, akuntan, surveyor, medical practioners, dental practioners, dengan sistem regulasi, kompetensi layanan, marketing
Strategik	Program/Kegiatan/proyek Disain strategi untuk kompetitif nasional dengan penunnuhan dokumen RIPIDA Kabupaten sesuai Provinsi dan sesuai RIPIN, program penguatan untuk MEA (Strategi untuk pengakuan dari kualifikasi profesional terkait fasilitasi pergerakan antar region, pelengkapan Mutual Recognition Arrangements (MRAs)

**Gambar 4.4. Analisis Tujuan**

Analisis situasi (stakeholders, analisis problem, dan analisis tujuan) dikemukakan untuk menempatkan setiap fungsi dan peran stakeholders yang memiliki kerkaitan dengan Kawasan industry yang dikelola. Potensi yang dikembangkan dihubungkan dengan berbagai aspek terstruktur, proses, bersifat infra dan suprastruktur kawasan industry. Lingkup industri primer, sekunder dan tersier direncanakan dalam Kawasan Industri. Industri agro adalah industri sekunder dengan hulu komoditi agro. Sebagai hilir dari kegiatan industry adanya batas wilayah

pertumbuhan menjadi suprastruktur pengembangan sektor industry. Karena luasnya wilayah Indonesia, dan juga untuk Kabupaten Tanah Laut, maka pembangunan industry menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan (i) sektoral dan (ii) regional.

**Tabel 4.18**

**Karakteristik untuk Pengembangan Investasi "KPJU: Agro Industri"**

Kriteria	Uraian	Bobot
Direct Backward (jumlah industri hulu)	5	1
Direct forward (jumlah industri hilir)	5	2
Financial Benefit	3	3
Economic Benefit	3	2
Potensial Market Domestic	2	1
Local	2	1
Regional	3	2
National	3	3
Potential market Import Substitution	4	2
Potensial Market Foreign Export	4	3
Tantangan Utama: (0...5)		1
Income Multiplier Effect- IM (EB/FB)	2	2
Employment Multiplier Effect (< IM; > IM)	2	2
Ketersediaan Infrastruktur Dasar	2	2
Gov Intervention (RPJPN, RPJMN, RPJPD, RPJMD)	4	1
Environment Effect (the lower cost better)	2	1
Kesesuaian Lahan	4	1
LQ Regional	>1	3
LQ National	2	2
Ketersediaan Input	4	
Besarnya Pasar (lokal; Regional, Nasional; Substitusi Import, dan Ekspor)	4	
Daya Tarik Investasi	5	
Besarnya Investasi	2	
Cukup (1-2) baik; baik (3); baik sekali (4-5)		

kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan hilir industri agro.

#### 4.4. Tujuan Pembangunan Industri

- Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya.
- Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha nasional.
- Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri.
- Memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri.
- Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional yang bermutu, disamping penghematan devisa melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan kepada luar negeri.
- Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah dalam rangka pewujudan Wawasan Nusantara.

Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka me  
Aspek-aspek yang menjadi kelolaan suatu upaya pembangunan sektor industri adalah kondisi dan posisi suatu daerah. Aspek-aspek berikut diperlukan dalam manajemen investasi, yaitu setiap aspek terkait syarat daya tarik investasi:

Tabel 4.19.

## Klasifikasi dan Aspek Industri: Daya Tarik Investasi

No	Aspek	Uraian
1	Sumber Daya Ekonomi-SDM	SDA: minyak, batu bara, emas, dll; SDM: tenaga kerja murah (labor), tenaga kerja berpendidikan (knowledge worker), penduduk
2	Lokasi (jaringan logistik, Hinterland)	kedekatan dengan bahan baku dan tenaga kerja, akses ke pusat, kedekatan dengan pusat industri, perdagangan dan pemerintahan
3	Layanan Publik/ Peran Pemerintah	Layanan surat ijin investasi, layanan keamanan, layanan pendidikan
4	Infrastruktur industri (hulu dan hilir)	Jalan, perumahan, suplai air, listrik, gas, kawasan industri, pelabuhan dan bandara, gedung konvensi, dan pameran dagang, dll
5	Suprastruktur	Economic clustering, jaringan pengetahuan, CBISs
6	Atraksi	Wisata alam, wisata budaya, event festival dan olah raga, pertunjukkan, pameran, monumen, dll

(Sumber, Diolah, 2019)

## 4.4.1. Pertumbuhan Industri

Lingkup industri direncanakan dalam lingkungan industri. Pengembangan sektor industri terkait batas wilayah pertumbuhan. Sebagai hilir dari kegiatan industri adanya batas wilayah pertumbuhan menjadi suprastruktur pengembangan sektor industri. Karena luasnya wilayah Indonesia maka pembangunan industri menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan (i) sektoral dan (ii) regional. Berdasarkan potensi sumber daya yang terbesar di wilayah Indonesia (sektoral), pemerintah membentuk kesatuan wilayah industri (regional) dengan lingkup sebagai berikut:

Tabel 4.20

## Tingkatan Pertumbuhan Lingkungan Industri

No	Tingkatan	Keterangan
1	WPPI	Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), yaitu suatu benteng alam yang terdiri atas beberapa daerah yang berpotensi untuk tumbuh dan berkembangnya kegiatan industri dan memiliki keterkaitan ekonomi yang bersifat dinamis karena didukung oleh sistem perhubungan yang mantap.
2	Zona Industri	Zona industri, ialah wilayah di dalam WPPI yang memiliki daya ikat



		spesial dalam kegiatan ekonomi pada umumnya dan kegiatan industri khususnya dalam batasan jarak tertentu.
3	Kawasan Industri	Kawasan industri, ialah kompleks tertentu bagi berbagai industri dasar yang berperan sebagai pendorong pertumbuhan zona industri. Kegiatan industri kecil terdapat di dalam dan di luar kawasan industri.
4	Lingkungan/ Pemukiman Industry Kecil	Lingkungan/pemukiman industri kecil, yaitu wilayah atau tempat berlangsungnya kegiatan industri kecil.
5	Sentra Industri	Sentral industri kecil, yaitu tempat pusat dalam kegiatan industri kecil.
6	Unit Usaha (UKM)	Entitas usaha yang mengelola komoditi dalam produksi dan pemasaran (dalam fase pertumbuhan: Penerimaan, breakthrough, maturity)

(Sumber, diolah kembali, 2019)

Dalam skala nasional, Kawasan Industri dalam daerah otonom menjadi bagian dari kebijakan pusat pertumbuhan.

Tabel 4.21

**Regional Pusat Pertumbuhan (Industri) di Indonesia**

No	Regional	Pusat Pertumbuhan	Wilayah	Region/Daerah
	A	Medan	I, II	
	B	Jakarta	III, IV, V	
	C	Surabaya	VI, VII	Tanah Laut, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan. Pusat di Balikpapan dan Samarinda
	D	Makasar	VIII, IX, X	

(Sumber, Diolah Kembali, 2019)

Kalimantan Selatan ada pada regional C, Pusat pertumbuhan Kota Surabaya ((Wilayah VII). Kota Banjarmasin merupakan bagian dari regional pusat pertumbuhan tersebut.

Potensi ekonomi yang diidentifikasi pada daerah otonom memberikan dasar manajemen investasi daerah. Tanah Laut menjadi bagian dari identifikasi potensi faktor-faktor produksi dalam lingkup industri di daerah Kalimantan Selatan. Suatu daerah dengan posisi geografis tertentu dapat menjadi hinterland bagi daerah lainnya.

Suatu Kabupaten /Kota memberikan fungsi sebagai pemasok "sumber daya" pada daerah pertumbuhan lainnya dalam geografis Kalimantan Selatan.

**Tabel 4.22**  
**Potensi Daerah otonom sebagai *Hinterland* Sumber Daya –Sektoral KPIJU**  
**Bagi Daerah Lainnya**

Daerah	Potensi Ekonomi
Banjarmasin	Industri sekunder, Kota Perdagangan, sentra sasirangan, Kota Jasa (industry sekunder) dan tersier (hilirisasi industry sekunder)
Banjar	Pusat Industri permata, sentra komoditas tanaman pangan, budi daya perikanan air tawar, potensi tambang biji besi, chromite,
Barito Kuala	Sentra pengembangan komoditas padi, dan hortikultura, perkebunan kelapa, jeruk, dan industri perkayuan
Tanah Laut	Sentra pengembangan ternak besar, komoditi jagung, budi daya tambak, zona industri dan pariwisata, potensi tambang biji besi, mangan, chromite,
Tapin	Sentra komoditas jeruk, dan padi, serta perkebunan dan industri kerajinan
HSS	Kawasan industri kecil rumah tangga, serta wisata alam
HST	Pusat perdagangan dan jasa, potensi tambang mangan, biji besi
HSU	Sentra industri kerajinan dan pengembangan ternak khususnya, yakni ternak itik, kerbau rawa, serta sentra kedelai
Tabalong	Pengembangan Perkebunan karet, kelapa sawit, potensi pertambangan biji besi,
Kotabaru	Pengembangan kehutanan, perkebunan, perikanan laut, dan industri berbasis pertanian dan pertambangan serta wisata alam, potensi pertambangan laterit-titanium, biji besi
Balangan	Potensi pertambangan biji besi, batubara
Tanah Bumbu	Potensi pertambangan biji besi- laterit, laterit titanium, nikel,
Banjarbaru	Pendulangan, dan mekanisasi batu intan, platinum

(Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2019)

Dalam memenuhi daya saing daerah Tanah Laut, diperlukan serangkaian aspek sebagai indikator daya saing menuju pengembangannya. Aspek-aspek berikut dikelola suatu daerah untuk meyakinkan dipenuhinya kondisi kekinian, adaptasi dan pengembangan daerah. Hal ini terkait manajemen investasi daerah yang memerlukan daya dukung investasi.

Tabel 4.23.

## Aspek-Aspek Daya Saing Daerah

No	Aspek	Indikator	Orientasi
1	Persyaratan dasar	Kualitas Instansi Pemerintah & GGG Infrastuktur (fisik) Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi makro Kesehatan dan pendidikan dasar (IPM)	Daya saing, Social welfare, Lingkungan
2	Faktor Penguat Efisiensi	Pendidikan tinggi dan pelatihan Efisiensi pasar (komoditi) Efisiensi pasar Tenaga kerja Kecanggihan pasar keuangan Kesiapan teknologi Ukuran pasar (volume transaksi, price. margin/Industri)	Daya saing Social welfare
3	Faktor Inovasi dan Kecanggihan	Kecanggihan bisnis Inovasi dan hak	Daya saing. lingkungan

(Sumber, Diolah, 2019)

4.4.2. Investasi Pada BUMDES: Model OVOP (*One Village One Product*)

Pengembangan OVOP dimaksudkan untuk mengangkat citra produk budaya lokal menjadi produk yang memiliki daya saing global. Hal tersebut dilakukan Mengacu kepada Inpres No. 6 tahun 2007 dan Permen Perindustrian No. 78 tahun 2007 tentang Pengembangan Produk melalui OVOP. Peran BUMDES diberdayakan dengan pendekatan PMP Desa, didukung:

1. Kompetensi Daerah ; 2. Pembinaan Teknis; 3. Stratifikasi; 4. Pasar Lokal dan Ekspor  
Langkah – langkah yang dilakukan :

1. Sosialisasi Petunjuk Teknis (Juknis) Pengembangan OVOP.

2. Peningkatan kompetensi SDM IKM melalui berbagai pelatihan teknis produksi dan manajemen

3. Peningkatan teknologi, mutu, desain produk melalui bantuan mesin peralatan, perbaikan kemasan dan desain, fasilitasi SNI dan HKI.

4. Intensifikasi bantuan tenaga ahli/ pendampingan BUMDES

#### 4.4.3. Pengembangan Industri Kreatif IKM

Komoditi Industri Kreatif yang dikembangkan adalah Industri Fesyen dan Industri Kerajinan. Pengembangan Industri Fesyen dan Industri Kerajinan diarahkan kepada bagaimana kedua komoditi tersebut dapat menjadi industri andalan Indonesia. Langkah – langkah yang dilakukan :

1. Melakukan pembinaan SDM Industri Fesyen (*fashion*) dan Industri Kerajinan Sasiranga khas daerah (Tanah Laut: Si Arek Jangkung) di berbagai daerah Kecamatan melalui Pelatihan Teknis Produksi, Desain, dan Manajemen Mutu. 2. Menugaskan para Desainer untuk memberi bimbingan dan melakukan modifikasi, serta diversifikasi produk Fesyen dan Kerajinan. 3. Memfasilitasi pemberian Hak Cipta (Merk dan Desain) bagi produk Fesyen dan Kerajinan. 4. Mempertemukan IKM Fesyen dan Kerajinan dengan pengusaha yang memiliki outlet Fesyen diberbagai daerah dan mancanegara. 5. Melakukan promosi terhadap produk Fesyen dan Kerajinan yang berkualitas baik melalui pameran didalam dan luar negeri.

#### 4.4.4. Pengembangan Klaster IKM

Pengembangan Klaster IKM merupakan amanat dari Perpres No. 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. Dalam Perpres tersebut 5 (lima) komoditi IKM Yang dikembangkan yaitu : Makanan Ringan; Minyak Atsiri; Gerabah/Keramik Hias; Batu Mulia dan Perhiasan; Garam Rakyat.

Langkah – langkah yang dilakukan :

- Perkuatan Klaster IKM melalui keterlibatan stakeholders di daerah dalam Forum FGD
- Melakukan Temu Usaha Bisnis dalam rantai nilai Klaster IKM
- Memfasilitasi Pendampingan Tenaga Ahli dalam menata pengembangan Klaster IKM
- Memfasilitasi Pemasaran Produk Klaster IKM

#### 4.4.5. Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih: sub sektor listrik, sub sektor gas kota, sub sektor air bersih,

Penggunaan tenaga listrik dewasa ini semakin luas. Tidak hanya sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, melainkan juga sebagai sarana produksi. Tenaga listrik di Kabupaten semakin banyak digunakan untuk mendorong pertumbuhan sektor industri. Sebagai sarana produksi, tersedianya tenaga listrik dalam jumlah dan kualitas yang memadai serta terjamin kontinuitasnya akan dapat

mendorong laju pertumbuhan ekonomi khususnya sektor industri maupun bidang lainnya. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas terpasang dan perluasan jangkauan pelayanan menjadi sasaran penting bagi pengembangan sumber energy tersebut. Faktor layanan juga merupakan hal penting untuk menjamin kesinambungan suplai aliran listrik secara kontinyu. Sebagian besar kebutuhan tenaga listrik di Tanah Laut dipenuhi oleh Perusahaan Umum Listrik Negara Wilayah VI Banjarmasin.

#### 4.4.6. Energi : Potensi Kelayakan Pengelolaan PLTBGs-POME (Jasa Kelistrikan)

Ide pengembangan perluasan pada *core main business* dikemukakan melalui ide pengelolaan bisnis pada jasa kelistrikan dengan POME melalui Kementerian Energi dan SDM, dengan dana APBN . Hal ini dikaji terkait adanya fasilitas hibah dari pembangunan PLT Biogas berbasis limbah cair kelapa sawit di lokasi PT Citra Putra Kebun Asri Kecamatan Jorong yang sudah mencapai 93% (2017), Dalam bulan Mei 2017 direncanakan serta diserahkan terimakan dari Pemerintah Pusat (Kementerian) kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Dalam tahun 2018 sebagai tahap penyelesaian fasilitas PLTBG-POME, namun terdapat kendala teknis untuk dapat memulai operasionalisasi PLTBG POEME Hambatan juga karena aspek administrasi yang belum terpenuhi untuk syarat penyerahan fasilitas PLTBG POME.

Main Bussiness “Pengelolaan Jasa Kelistrikan” (Ketenagaan Listrikan dan Energi). Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBGS) adalah pembangkit listrik yang dihasilkan oleh energi yang berasal dari biogas. Pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBGs, biogas generator) dengan memanfaatkan limbah cair sawit, dengan biaya produksi listrik lebih murah ketimbang pembangkit listrik diesel. PLTBGs mengolah limbah cair sawit POME (Palm Oil Mill Effluent) menjadi energi listrik. Listrik dari biogas ini dapat menaikkan rasio elektrifikasi sekaligus mengurangi subsidi energi energi fosil yang masih banyak digunakan di Indonesia. PLTBGs memanfaatkan gas metan dari limbah sawit dengan biaya produksi listrik lebih murah ketimbang pembangkit listrik diesel PLN. Perencanaan PLTBGs sangat dipengaruhi oleh wilayah yang bersangkutan terutama kesinambungan bahan baku. Di mana gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik cair. Kandungan utama dalam biogas adalah metana dan karbon dioksida. Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan maupun untuk menghasilkan energi listrik.

Salah satu sumber bahan baku biogas yang potensial untuk dimanfaatkan adalah limbah cair sawit.

Beberapa kondisi terkait PLTBGs- POME:

(i) Peningkatan permintaan energi dan menipisnya sumber cadangan minyak dunia serta permasalahan emisi dari bahan bakar fosil memberikan tekanan kepada setiap negara untuk segera memproduksi dan menggunakan energi terbarukan. Salah satu energi terbarukan yang berpotensi untuk dikembangkan di Indonesia adalah biogas, khususnya yang berasal dari limbah cair kelapa sawit. (ii) Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik. Dengan bahan bakar biogas, akan menghasilkan biaya produksi listrik yang lebih murah dan ramah terhadap lingkungan.

Analisis biaya untuk memproduksi listrik per kWh dengan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan biogas limbah cair kelapa sawit sebagai bahan bakar, memperhitungkan biaya modal, biaya bahan bakar serta biaya operasional dan perawatan. Dapat diacu data biaya produksi listrik per kWh (berdasarkan kondisi tingkat suku bunga 6%, 9%, 12%) adalah Rp 569,13/kWh, Rp 659,34/kWh, Rp 770,89/kWh dan biaya produksi listrik per kWh tanpa memperhitungkan biaya pengembalian modal adalah Rp 250/kWh.

PT PLN (Persero) membeli listrik yang dihasilkan dari energi biomassa dan biogas. Harga jual listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Sawit (PLTBGs) lebih mahal dengan direvisinya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM ) No 4 Tahun 2012 menjadi Permen No 27 Tahun 2014. Peraturan Menteri tersebut mengatur tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PLTBGs. Direktur Jenderal Kelistrikan Kementerian ESDM menerbitkan Permen ESDM No 4 Tahun 2012 pada Februari, di mana minat swasta untuk berinvestasi pada PLTBGs masih minim. Penyebab utamanya adalah depresiasi nilai rupiah terhadap dolar AS dan meningkatnya harga biomassa. "Permen No 27 Tahun 2014 diterbitkan dengan harga menarik bagi investor,". Penyediaan energi listrik dari PLTBGS didominasi dengan skema penjualan kelebihan tenaga listrik (excess power) dan bukan merupakan pembangunan pembangkit listrik baru yang bertujuan untuk penyediaan listrik swasta ke jaringan PLN.

Peraturan Menteri ESDM itu pada prinsipnya untuk mengurangi pemanfaatan energi fosil, khususnya bahan bakar minyak (BBM) pada daerah-daerah yang memiliki ketergantungan terhadap BBM dan wilayah kepulauan yang masih memiliki rasio

elektrifikasi rendah. Harga dasar jual listrik (feed in tariff) dasar jual PLTBGs Rp 1.050 per kwh jika terinterkoneksi pada jaringan tegangan menengah atau Rp 1.400 per kwh jika terinterkoneksi pada jaringan tegangan rendah. Sesuai data, terdapat tambahan harga melalui pemberian insentif wilayah berupa faktor regional 'F' (faktor pengali harga dasar) berkisar antara 1 sampai dengan 1,6. "Artinya, setiap daerah bisa berbeda faktor pengalinya," . Sebelumnya untuk tarif listrik PLTBGs Rp 975 dikali F per kwh untuk tegangan menengah dan Rp 1.325 dikali F untuk tegangan rendah. Untuk nilai F sebelumnya, 1 untuk Jawa Bali dan Sumatra, 1,2 untuk Sulawesi Kalimantan dan Nusa Tenggara, 1,3 untuk Maluku dan Papua. Terdapat insentif terhadap PLTBGs yang digunakan mengikuti kebutuhan beban pada sistem ketenagalistrikan setempat (load follower) dengan perhitungan tiap kwh. Dengan perubahan beleid itu, diberikan kesempatan kepada perusahaan yang telah berjalan atau telah membangun pembangkit listrik untuk melakukan renegotiasi dengan PLN menggunakan harga jual listrik menjadi acuan tertinggi. PLN memiliki mekanisme membeli listrik biomassa dan biogas dengan harga yang lebih mahal. Alasannya, kedua jenis pembangkit ini mampu menjangkau daerah pelosok dan terpencil di Indonesia.

Divisi Energi Baru Terbarukan PLN, mendeskripsikan bahwa di pelosok daerah yang masih belum menikmati listrik lebih relevan bila membangun pembangkit listrik dengan kapasitas kecil. "Memang menggunakan batu bara lebih murah, namun harus membangun dengan kapasitas besar." Kelemahan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya harus dibangun dengan kapasitas besar hingga 100 megawatt (MW). Karenanya, keberadaan PLTBGs yang berkapasitas kecil menjadi solusi efektif untuk memasok listrik ke daerah pelosok. Tarif listrik PLTBGs walaupun lebih mahal dari batu bara namun lebih murah dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Pemerintah menetapkan harga pembelian tenaga listrik dari pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBGs) oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN persero) sesuai lokasi layanan/Region. Penetapan harga ini tertuang dalam peraturan menteri (Permen) nomor 27 tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBGs) oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Peraturan Menteri (Permen) tersebut merupakan revisi dari Permen sebelumnya yaitu Permen No. 4 Tahun 2012, sebagai bentuk insentif untuk mendorong minat investor dalam pengembangan pembangkit listrik berbasis biomassa dan biogas.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Rida Mulyana mengatakan ditetapkannya harga tersebut sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam upaya penyediaan listrik kepada masyarakat terutama listrik dari energi baru terbarukan. "Kita memiliki potensi energi baru terbarukan yang besar terutama biomassa, sementara disisi lain masih banyak saudara kita yang belum mendapatkan listrik, dengan adanya permen ini dapat menambah kapasitas listrik yang sudah ada dan menyediakan akses yang belum dapat listrik. Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 tahun 2014 di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu, 22 Oktober 2014, di mana Peraturan Menteri ini memberikan kesempatan kepada Badan Usaha yang telah berjalan (dengan pengelolaan PLT eksisting) untuk dapat melakukan negosiasi dengan PT PLN (Persero) menggunakan besaran FiT sebagai harga acuan tertinggi.

#### 4.4.7. Gas

Layanan ini meliputi antara lain, jenis usaha bahan bakar minyak Tertentu. Dalam hal ini jenis BBM tertentu terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*), Bensin (*Gasoline*) RON 88 dan Minyak Solar (*Gas Oil*), *LPG* atau *Elpiji* atau dengan nama lain yang sejenis dengan 'standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Pasal 2). Layanan ini sesuai fungsi layanan, terdapat hulu dari unit layanan SPDN, yaitu adanya terminal BBM Depot/Penyalur yang menjadi tempat penimbunan dan penyaluran BBM yang dimiliki atau dikuasai PT Pertamina {Persero dan/atau badan usaha lainnya yang mendapat penugasan' Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu. Dalam Pasal 1ayat 3, dikemukakan: " Badan Pengatur adalah badan pengatur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Layanan

#### 4.4.8. Air Bersih

Layanan air bersih dilakukan melalui BUMD PDAM. Sistem pelayanan air bersih dilakukan sebagai sistem suplai air bersih dengan pemenuhan sumber air baku, unit pengolahan, serta layanan sistem distribusi untuk konsumen. Investasi pada layanan sumber daya air dilakukan pihak swasta dengan mengacu mekanisme dan regulasi. Potensi layanan air bersih menjadi fungsi dan peran Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, sementara secara nasional untuk layanan air minum sudah dikelola pihak investor (PMDN, PMA).



#### 4.4.9. Sektor Konstruksi:

Sub sektor ini menjadi bagian dari aktifitas pembangunan infrastruktur. Sub sektor ini potensial bagi investor, namun sebagian masih menjadi tanggungjawab belanja modal atau pembangunan Pemerintah. Meliputi antara lain: Jalan raya, Jembatan, infrastruktur layanan umum. Sebagai struktur perekonomian, sektor ini mencapai 7,23 % dari sektor perekonomian 2017.

#### 4.4.10. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran

Sub sektor perdagangan besar, dan eceran, sub sektor hotel, sub sektor restoran, serta termasuk sub sektor Pariwisata.

##### 1. Perdagangan

Layanan perdagangan berkembang dari fungsi pasar tradisional-pasar modern dengan berbagai bentuk. Peran Pemerintah dominan pada layanan pasar tradisional, dan pasar modern dengan peran pihak swasta. Sarana perdagangan didominasi bentuk warung (60 %). Jumlah pedagang besar 23 unit, pedagang menengah 290 unit, dan pedagang kecil 9.554 unit (BPS, 2018). Unit Koperasi 146 unit (2017), dengan komposisi 38 unit KUD dan 108 unit Non KUD. Perdagangan di Kabupaten Tanah Laut berkembang dari sisi pasar tradisional dan pasar Modern (Alfamart, Indomart). Pasar modern dan pasar tradisional mengisi segmen dan pangsa pasar masing-masing. Potensi pasar melalui peran BUMDesa Kabupaten Tanah Laut berkembang sejak pembangunan Desa menjadi fokus dengan dukungan APBDesa.

##### 2. Hotel

Layanan Hotel dipenuhi dengan tingkat Hotel Berbintang, Losmen –Penginapan level Melati. Peran swasta dominan dalam layanan hotel dan penginapan Di Kabupaten Tanah Laut. Jumlah hotel 17 unit dengan 225 kamar dan 254 tempat tidur (BPS, 2018)

##### 3. Restoran

Layanan restoran dipenuhi melalui investasi swasta. Layanan ada pada restoran berskala besar, sedang, sampai warung –warung dalam skala kecil.

#### 4.4.11. Kepariwisataan

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut yang diimplementasikan dalam Rencana Strategis SKPD tahun 2013-2018 telah mengakomodasi Renstra Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dengan 4 (empat) program Strategis Nasional di bidang Kepariwisataan, yaitu:

1. Pengembangan destinasi pariwisata.
2. Pengembangan pemasaran pariwisata.
3. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya.
4. Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif

Program Strategis kepariwisataan Nasional diharapkan dapat mengembangkan destinasi kepariwisataan dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah, meningkatnya investasi di sector pariwisata serta dapat memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja di sector pariwisata.

#### **Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Nasional Tahun 2015 – 2019**

Tujuan Pembangunan Pariwisata Tahun 2015 - 2019 :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional.
2. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional sehingga Indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya.
3. Memasarkan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif sehingga kinerja pemasaran pariwisata mencapai produktifitas maksimal.
4. Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien, dan mencapai produktifitas maksimal.

Adapun sasaran strategis untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan pariwisata nasional, yaitu :

- 1) Sasaran Pertumbuhan

Tabel 4.24.

## Sasaran Pembangunan Pariwisata Nasional

Uraian Sasaran		Baseline 2014 (%)	2019
1	Kontribusi terhadap PDB Nasional	4,0 %	9,2 %
2	Wisatawan Mancanegara (Orang)	9,3 juta	20,0 juta
3	Wisatawan Nusantara (Kunjungan)	251 juta	275 juta
4	Devisa (Milliar USD)	10,69	20

## 2) Sasaran Pembangunan Inklusif

Tabel 4.25.

## Tujuan Strategis Pembangunan Pariwisata Tahun 2015 – 2019

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata	1. Meningkatkan kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem destinasi pariwisata	1. Jumlah daerah yang difasilitasi untuk pengembangan infrastruktur dan ekosistem (provinsi) 2. Jumlah fasilitasi peningkatan destinasi wisata budaya, alam dan buatan (lokasi) 3. Jumlah fasilitasi peningkatan tata kelola destinasi dan pemerdayaan masyarakat.
2	Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional	2. Meningkatkan investasi di sektor pariwisata	4. Kontribusi investasi sektor pariwisata terhadap total investasi nasional
		3. Meningkatkan kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional	5. Jumlah tenaga kerja langsung, tidak langsung, dan ikutan sektor pariwisata (juta orang)
3	Memasarkan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif	4. Meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional 5. Meningkatkan jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) 6. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) 7. Meningkatkan jumlah penerimaan devisa	6. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB nasional (persentase) 7. Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (juta perjalanan) 8. Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia (juta orang) 9. Jumlah penerimaan devisa (triliun Rp)
4	Mengembangkan	8. Meningkatkan	10. Jumlah tenaga kerja disektor

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
	kelembagaan kepariwisataan dengan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien	kapasitas kompetensi dan profesionalisme tenaga kerja pariwisata 9. Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi pariwisata 10. Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi 11. Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan keuangan	pariwisata yang disertifikasi (orang) 11. Jumlah lulusan pendidikan tinggi yang terserap di pasar kerja (orang) 12. Nilai quality assurance (QA) reformasi birokrasi (nilai) 13. Opini keuangan kemenpar (predikat)

Sejarah perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Tanah Laut sudah berlangsung sejak lama. Sektor ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk dapat dikembangkan. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut maupun masyarakat berupaya untuk membangun pariwisata dikarenakan potensi wilayah Tanah Laut di sektor pertambangan atau energy mulai berkurang. Perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Tanah Laut terus meningkat. Jumlah wisatawan domestik dalam tahun 2017 sejumlah 272.635 orang. Pengunjung terbanyak pada Pantai Takisung 84.286 orang (BPS, 2018).

#### **Deskripsi Potensi Pariwisata: Telaahan RTRW dan KLHS**

Berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2033 disebutkan bahwa kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas :

- a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya yang meliputi ;
  - ✓ Kebudayaan, meliputi desa Riam Adungan Kecamatan Kintap
  - ✓ Kawasan situs sejarah terdiri atas :
    - Benteng Tabanio, Desa Tabanio Kecamatan Takisung
    - Bunker Jepang, di kawasan Bajuin, Desa Sungai Bakar Kec. Bajuin
- b. Kawasan peruntukan pariwisata alam terdiri atas :
  - ✓ Kawasan Pelestarian alam, meliputi :
    - Kawasan TWA (Taman Wisata Alam) Pantai Batakan
    - Kawasan Hutan Lindung Bajuin di desa sungai bakar kec. Bajuin , kawasan hutan kota, dan wisata gunung khayangan di kecamatan Pelaihari.

- ✓ Air terjun Bajuin di kecamatan Bajuin
- ✓ Kawasan Gua, meliputi;
  - Gua marmer
  - Gua Semprong
  - Gua Liang Bebau
- ✓ Pantai Batakan di kecamatan Panyipatan
- ✓ Pantai Takisung di kecamatan Takisung
- ✓ Pantai Swarangan di kecamatan Jorong

Selain kawasan di atas ada pula wisata kuliner yang tiap tahun dilaksanakan Dinas Pariwisata Tanah Laut yang mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat yaitu pasar ramadhan, adapun tempatnya menyesuaikan dengan kondisi dan permintaan/usulan dari panitia pasar ramadhan dan masyarakat/pedagang. Sedangkan untuk kawasan wisata religi seperti makam keramat: Datu Insad, Abdul Wahab, Abdul Gaus dan Syek.H Abdul Ghani, Guru KH Anang Ramli di lokasi Ponpes Ubudiyah, terdapat di Kecamatan Bati Bati, makam keramat istana, datu Nafis, Datu Ahmad Lokbatu, KH. Ahmad Nawawi dan makam keramat datu panjang di Kecamatan Pelaihari, makam keramat datu pamulutan di Kecamatan Panyipatan, makam keramat Datu Bungur dan Datu Timang di Kecamatan Jorong, makam keramat Ahmad Syamhudi di Kecamatan Kurau, makam keramat KH, Abdussamad Khairi di Kecamatan Takisung. Untuk makam-makam keramat ini sejak tahun 2017 di kelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.

**Tabel 4.26**

**Jenis pelayanan yang diselenggarakan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut**

No	Jenis Pelayanan	Obyek Pelayanan	Kelompok Sasaran	Pendanaan
1.	Informasi dan Data kebutuhan perjalanan wisatawan	Obyek wisata, Hotel, Restoran, biro perjalanan, transportasi, aksesibilitas	Wisatawan (Wismandan Wisnus)	APBD
2.	Rekomendasi Perijinan	Obyek wisata, Hotel, Restoran, biro perjalanan, transportasi, aksesibilitas	Pelaku usaha Jasa, pengguna jasa usaha kepariwisataan	APBD

3.	Penyuluhan, sosialisasi. Bimtek	SDM kepariwisataan	Masyarakat, pokdarwis, pelaku usaha jasa Pemandu wisata	APBD
4.	Monitoring, evaluasi. Pelaporan	Obyekwisata, Hotel, Restoran, biro perjalanan, transportasi, aksesibilitas	Obyekwisata, pengunjung/wisat awan, pelakudanpenggu nausahajasakepari wisataan	APBD

#### 4.4.12. Sektor Angkutan dan komunikasi

Sub sektor angkutan jalan raya, sub sektor angkutan laut, sub sektor penyeberangan, sub sektor jasa penunjang angkutan, sub sektor pos dan telekomunikasi, sub sektor jasa penunjang komunikasi. Sarana jalan mendukung sektor angkutan darat dengan panjang jalan 2 215 Km. Jalan yang dikelola Pemerintah Kabupaten sepanjang 1.826, serta panjang jalan yang dikelola Pemerintah Provinsi dan Pusat 389 Km. Jenis permukaan jalan 42 % kerikil, 4 % tanah, dan beraspal 54%. Kondisi jalan rusak hingga rusak berat 38 % dan kondisi baik 62%. (BPS, 2018). Dukungan sektor angkutan laut dengan panjang pantai lebih dari 200 Km dan sarana pelabuhan. Sarana komunikasi didukung peran PT Posindo (Persero) yang memiliki fasilitas di Kabupaten Tanah Laut, yaitu 7 Kantor Pos, 3 Rumah Pos, dan 5 Agen Pos. Komunikasi didukung PT Telkom dengan telepon dan jaringan internet speedy dan warung internet.

#### 4.4.13. Potensi Kepelabuhan

Potensi dengan penyelesaian pembangunan pelabuhan Pelaihari/Swarangan berlokasi di Kecamatan Jorong. Layanan Kepelabuhan menjadi dasar dalam sarana mobilisasi – transportasi laut dari dan menuju Kabupaten Tanah Laut. Pelabuhan Swarangan dibangun di lokasi salah satu kecamatan- Jorong, yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Lokasi Kecamatan ini memiliki batas batas kecamatan, jorong utara berbatasan dengan kecamatan Batu Ampar, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kintap, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Panyipatan, sebelah selatan dengan laut Jawa Secara geografis posisi Kecamatan Jorong berada pada : 114o73'8"-115o16'7" Bujur Selatan, dan pada: 3o68'058"- 4o10'942" Lintang Timur Lintang Luas Kecamatan Jorong 628 Km2 dengan ketinggian rata-rata 9 meter dari permukaan laut. Kecamatan Jorong terdiri dari:

1. Desa Sabuhur = 235 Km (37,44 %)
2. Desa Swarangan = 175 Km (22,88 %)
3. Desa Atur = 4,75 Km ( 0,76 %)
4. Desa Jorong = 26,22 Km ( 4,18 %)
5. Desa Karang Rejo = 15 Km (2,39 %)
6. Desa Muara Asam-Asam = 10 Km (1,59 %)
7. Desa asam Jaya = 9 Km (1,43 %)
8. Desa Asri Mulya = 9 Km (1,43 %)
9. Desa Asam-Asam = 56 Km (8,92 %)
10. Batalang = 23 Km (3,64 %)
11. Simpang Empat Sei. Baru = 65 Km (10,35 %)

Layanan Jasa Kepelabuhanan terkait dengan potensi peluang dan tantangan. hal ini menjadi bagian dari RPJMD Kabupaten Tanah Laut. Pembangunan ini sesuai dengan peluang dan tantangan nasional dan global yaitu Pilar 1 MEA, tentang : (1) Pasar tunggal dan basis produksi dengan elemen. Pilar ini terkait dengan aliran bebas barang (*free flow of goods*). Hal ini menimbulkan peran Jasa Kepelabuhanan. Awal pemberlakuan MEA di akhir tahun 2016 meliputi 7 (tujuh) sektor produk, yaitu : (1) Produk pertanian, (2) Perikanan, (3) Karet, (4) Kayu, (5) Otomotif, (6) Elektronik, dan (7) Tekstil. Suprastruktur layanan jasa kepelabuhanan meliputi pemenuhan pertimbangan tentang masalah-masalah teknis kemaritiman di Daerah, dengan membentuk Dewan Maritim Kabupaten. Anggota Dewan Maritim Kabupaten terdiri atas : Unsur Pemerintah Daerah; Unsur Asosiasi Pelabuhan dan Dermaga Industri; Unsur APBMI, INSA DAN GAPENSI; Unsur Akademisi dan/atau Praktisi Kemaritiman.

**4.4.14. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan:** sub sektor bank, sub sektor lembaga keuangan non bank, sub sektor jasa penunjang keuangan, sub sektor sewa bangunan, sub sektor jasa perusahaan. Sektor keuangan pemerintah daerah dengan APBD untuk realisasi pendapatan mencapai Rp.1,195 Trilyun (2014), 1.357 Trilyun (2015), 1.449 Trilyun (2016), 1.364 Trilyun (2017). Realisasi belanja pemerintah mencapai 1,565 Trilyun (2017). Rata-rata pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah mencapai Rp. 231.633 dari pengeluaran individu –keluarga (53 %) dari pengeluaran non makanan.

**4.4.15. Sektor jasa-jasa:** sub sektor administrasi pemerintahan dan pertahanan, sub sektor jasa pemerintahan lainnya, sub sektor jasa sosial kemasyarakatan, sub sektor jasa hiburan dan rekreasi, sub sektor jasa perorangan dan rumah tangga.

**Potensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).**

Eksistensi BUMDesa di Kabupaten Tanah Laut secara formal rata-rata dibentuk di periode tahun 2015. Bahkan ada yang baru dibentuk pada tahun 2018. Karena, pembentukan BUMDesa juga tidak harus dilakukan secara proporsional mengikuti jumlah Desa. Karena prinsip dasar pembangunan BUMDesa tidak menyatakan adanya pola alokasi dalam memenuhi organisasi, di mana tidak ada keharusan untuk setiap Desa membentuk BUMDesa. Hal ini lebih bersifat "atributif", di mana BUMDesa dibentuk atas dasar syarat potensi Desa, dan kelayakan usaha yang ada. Karena juga, BUMDesa dapat dibentuk dengan pola jejaring, sehingga dapat memberikan kinerja atas dasar *economic scope* dan *economic scale* organisasi BUMDesa.

Tabel 4.27.  
Potensi BUMDesa Kabupaten Tanah Laut  
Per Agustus 2018

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah BUMDesa	Pengembangan Organisasi*)
1	Panyipatan	10 Desa	3	S/T/S/A
2	Takisung	12 Desa	3	1 (+)
3	Kurau	11 Desa	1	
4	Bumi Makmur	11 Desa	3	2 (+)
5	Bati-Bati	14 Desa	7	3 (+)
6	Tambang Ulang	9 Desa	1	1 (+)
7	Pelaihari	5 Kelurahan 15 Desa	5	4 (+)
8	Bajuin	9 Desa	3	
9	Batu Ampar	14 Desa	4	4 (+)
10	Jorong	11 Desa	4	2 (+)
11	Kintap	14 Desa	14	2 (+)
		130 Desa 5 Kelurahan	48*)	19 (+) (aktif)

(Sumber, \*) Diolah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Tala. 2018)

Upaya untuk pengembangan jejaring BUMDesa secara internal diperlukan, agar dapat menempuh level jejaring BUMDesa secara eksternal. Pemenuhan jejaring internal bermakna dipenuhinya syarat pengembangan organisasi BUMDesa dengan Penyertaan Modal Desa (PMD) dari APBD. Secara strategic, kebutuhan PMD memerlukan kajian untuk kelayakan atas usaha (layanan unit usaha) yang ada. Kemudian penyusunan *Business Plan* diperlukan setelah adanya capaian kelayakan bisnis BUMDesa. Secara administrative, dokumen *Business Plan* menjadi syarat dalam mekanisme Penyertaan Modal Desa oleh Pemerintah Desa melalui APBD.



Perkembangan organisasi BUMDesa sesuai data awal menunjukkan adanya efektifitas dan in-efektifitas eksistensi organisasi. Dari data yang ada menunjukkan:

- (i) 19 BUMDesa dengan katagori aktif
- (ii) 29 BUMDesa dengan katagori tidak aktif

Ditinjau dari kurva siklus pertumbuhan organisasi, BUMDesa dengan kondisi tidak aktif menunjukkan belum mencapai tahap pertumbuhan penerimaan (acceptance stages) pada lingkungan bisnis. Sementara BUMDesa dengan katagori aktif telah dapat mencapai "acceptance stages" dan tahap bertumbuh- "Breakthrough stages", namun masih memerlukan syarat pengembangan organisasi menuju "maturity stages".

- Hambatan strategis, terkait penetapan tujuan Pemerintah Desa (APBD) yang belum "congruence" dengan tujuan BUMDesa terkait pengelolaan Aset Desa;
- Hambatan administrative (regulasi) belum dipenuhinya peran Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, yaitu: dukungan Penanaman Modal (PMD) pada BUMDesa (hambatan jejaring internal);
- Hambatan teknis, terkait kapasitas manajemen dan teknologi layanan unit usaha
- Hambatan sosio dan relasi bangun kemitraan untuk jejaring eksternal, karena faktor bawaan hambatan jejaring internal (Pemdes dan BUMDesa)

Kelengkapan identifikasi masalah pada aspek Strategik, aspek teknis, aspek socio dan aspek administratif, menjadi dasar dalam menetapkan tujuan pengembangan BUMDesa dari tataran aspek-aspek tersebut.

Pengendalian atas hambatan aktifitas BUMDesa Kabupaten Tanah Laut didekati dengan tataran pengembangan organisasi. Identifikasi masalah yang dihadapi BUMDesa di Kabupaten Tanah Laut penting didckati dengan model "Decision Tree Analysis", model ini menggunakan analisis "Stakeholders" dalam menetapkan suatu tujuan (Objectives) pembangunan ekonomi, sosio dan lingkungan natural (sustainable development) dari BUMDesa di Kabupaten Tanah Laut.

Peran Kepala Daerah dengan penguatan regulasi, menjadi dasar menindaklanjuti upaya pengembangan BUMDesa kabupaten Tanah Laut. Leading sector dan Pemerintah Desa mmemberikan peran dalam langkah pengembangan melalui prosedur melembaga. Berdasarkan deskripsi data dan uraian diatas pendekatan pengembangan organisasi (strategic sosio, teknis, dan administrative) diberlakukan untuk BUMDesa Kabupaten Tanah Laut. Dalam pembangunan BUMDesa sesuai kondisi kekinian, memerlukan taat asas pada pembangunan

berkelanjutan (sustainable development). Pertama, focus pada aspek ekonomi – mencapai profit, kedua focus pada planet (natural)-keberlanjutan lingkungan, dan ketiga focus pada aspek social (keberlanjutan social)-social welfare.

#### 4.5. Daya Dukung Untuk Sektoral -KPJU

##### 4.5.1. Daya Dukung Logistik

Manajemen investasi daerah memerlukan dukungan setiap sektoral melalui pengelolaan sistem logistik daerah, nasional. Hal ini menjadi bagian dari koneksi pada tataran lingkungan eksternal, seperti dalam upaya mencapai integrasi logistik komoditi untuk pasar bersama ASEAN pasca pemberlakuan kesepakatan MEA Tahun 2015, menuju integrasi pasar global tahun 2020-2025. Lingkup kebijakan dijelaskan melalui komitmen untuk mengintegrasikan sektor logistik dan konektivitas negara ASEAN dalam MEA. Manajemen investasi juga terkait komitmen menurunkan biaya, waktu, dan meningkatkan transparansi *supply chain* dalam kerjasama global. Keharusan untuk meningkatkan peringkat logistik Indonesia dalam upaya menarik investor asing dan domestik. Serta, target konektivitas terkait sistem logistik nasional dan lokal (Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa). sesuai Visi dan Misi serta Tujuan Sistem Logistik nasional. Sistem logistik Kabupaten Tanah Laut dibangun dengan dukungan layanan jasa kepelabuhanan untuk menuju integrasi lokal, koneksi nasional, untuk daya saing nasional, regional, dan global.

Jasa layanan diperlukan untuk kaji tindak :

- Memperlancar arus barang secara efektif dan efisien untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing produk di pasar domestik, regional dan global;
- Membangun simpul logistik (pelaku logistik dan konsumen di daerah) dan konektivitas mulai dari Perdesaan, Kabupaten/Kota, Desa, antar wilayah/regional dan antar pulau dan untuk AEC melalui (pelabuhan laut, udara) dengan pelabuhan internasional.
- Penguatan rantai logistik melalui rantai distribusi, rantai transportasi, rantai informasi dan rantai keuangan.

Implikasi tujuan sistem logistik Kabupaten Tanah Laut:

- o Menurunkan biaya logistik, memperlancar arus barang dan meningkatkan layanan logistik sehingga meningkatkan daya saing produk (KPJU), lokal/regional/nasional di pasar nasional, ASEAN, dan global
- o Menjamin ketersediaan komoditas pokok dan strategis dengan harga terkendali,
- o Mempersiapkan Kabupaten Tanah Laut menuju target integrasi logistik ASEAN, integrasi pasar ASEAN (2015) dan integrasi pasar global 2020-2025.

Jaringan Sistem Logistik Nasional dan Koneksi Jaringan Global

Ide pengembangan : Produk dalam jaringan Desa-Desa dari Kabupaten Tanah Laut (Jejaring Rural Logistik Antar Desa/Perkab Tanah Laut: Darat, Lokal Transportasi Massal; ) menuju distribusi antar Pulau (Nasional Logistik antar Provinsi: Darat, Laut, Udara: Nasional, Inter Island Transportation) menuju Pelabuhan pada klasifikasi /level nasional, atau dukungan awal menuju hubungan Pelabuhan internasional ASIA (Global Logistik antar negara: Laut, Global Hubungan Pelabuhan internasional) dan Global (Afrika, Eropa, Amerika, Australia).

Layanan kepelabuhanan di Tanah Laut melanjutkan fasilitasi model nasional. Model nasional dijabarkan sebagai: (i) One Gate Management Services: Lahan (Land), Perijinan (Permit), Konstruksi (Construction), Infrastructure (Estate Development Services); (ii) Business & Trade, Superstore, Grocery Logistics (Forwarding, Warehousing & Transport), Export & Import (Business Services); (iii) Immigration, Custom, Foreign Employer Affairs, Government Relation (Administration service); (iv) Immigration, Custom, Foreign Employer Affairs, Banking & Insurance, Training, (Supporting Services); (v) Raw material, utility (water, electricity, gas), waste management (Industrial Services).

Layanan logistik di Tanah Laut bagian dari Logistik regional Kalimantan Selatan-Indonesia.

#### **4.5.2. Acuan lini bisnis dengan kesepakatan MEA**

Ketentuan Standar ASEAN:

Working Group: membahas aspek teknis: ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality (ACCSQ):

ACCSQ (forum kerjasama tentang permasalahan MSTQ (Measurement, Standar, Testing and Quality))

Keanggotaan diwakili oleh masing-masing National Standar Bodies (NBSs) ASEAN Indonesia (Badan Standar Nasional/BSN).

Working Group; Implementing Bodies dan Product Working Groups (PWG):

Working Groups 1 (WG1) on standards and Mutual Recognition Arrangements (MRAs): (i) MRA untuk Wood Based Product dan (ii) Building and Construction

Working Groups 2 (WG2) on Conformity Assessment: kompetensi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)

WG3 on Legal Metrology

Rubber Based Product Working Group (RBPWG): menurunkan/menekan hambatan teknis terkait standar dan penilaian kesesuaian bidang produk karet di ASEAN;

Prepared Foodstuff Produk Working Group: menurunkan/menghilangkan hambatan teknis terkait standar dan penilaian kesesuaian bidang pangan olahan di ASEAN;

(<http://www.asean.org/> )

**Indikator Kinerja:** Penurunan biaya logistik daerah/nasional, terkait pasar global, peningkatan *human capital* sektor logistik (pengembangan SDM, Pengembangan Usaha, Pengembangan produk): KPJU/Sektoral.

#### 4.5.3. Dukungan Layanan Kawasan Industri

##### - PP Nomor 24 tahun 2009 Tentang Kawasan Industri (KI)

Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2009, pengertian Kawasan Industri adalah “Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. Pembangunan Kawasan Industri bertujuan untuk: (1) Mengendalikan pemanfaatan ruang; (2) Meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan; (3) Mempercepat pertumbuhan industri di daerah; (4) Meningkatkan daya saing industri; (5) Meningkatkan daya saing investasi; dan (6) Memberikan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur, yang terkoordinasi antar sektor terkait.

Pembangunan Kawasan Industri di wilayah lintas kabupaten/kota dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Pembangunan Kawasan Industri di wilayah Kabupaten/Kota dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri setelah Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, wajib berlokasi di Kawasan Industri. Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud yaitu:

1. Perusahaan Industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus;
2. Industri mikro, kecil, dan menengah;
3. Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri dan berlokasi di daerah Kabupaten/Kota yang belum memiliki Kawasan Industri atau yang telah memiliki Kawasan Industri namun seluruh kavling industri dalam kawasan industrinya memerlukan lokasi khusus, serta industri mikro, kecil, dan menengah.

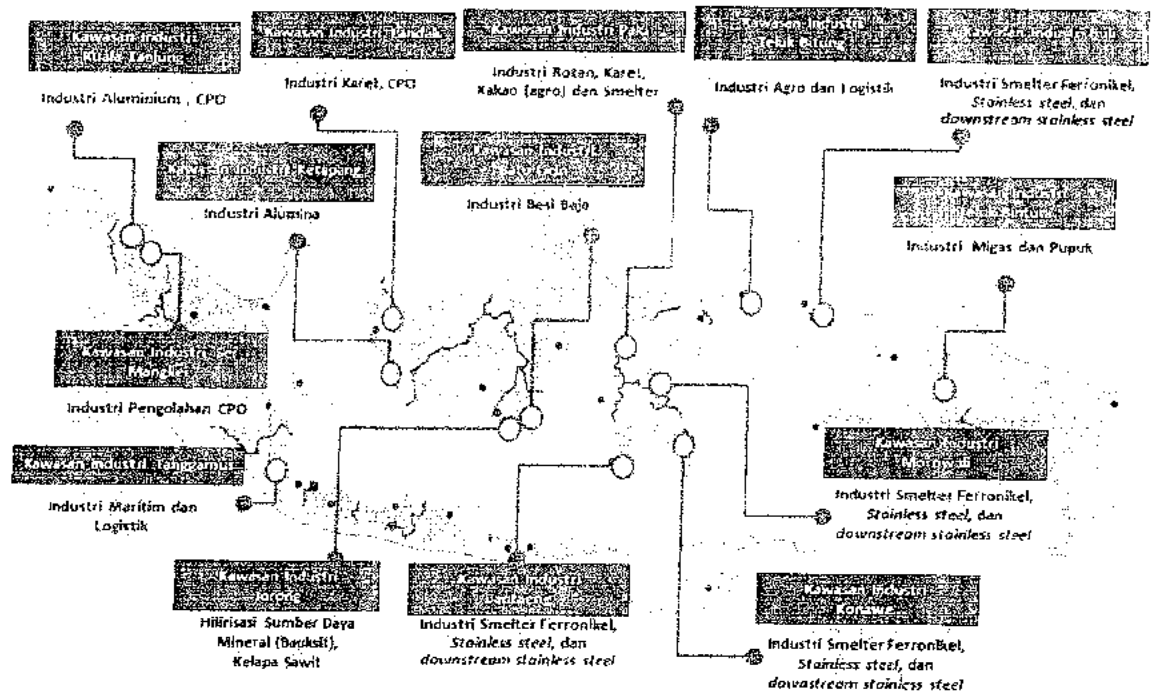
Perusahaan Industri yang akan melakukan perluasan dengan menambah lahan melebihi ketersediaan lahan Kawasan Peruntukan Industri, wajib berlokasi di Kawasan Industri.

1. Selain kegiatan Industri setiap Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri dapat melakukan kegiatan penyimpanan barang;
2. Kegiatan penyimpanan barang dapat pula dilakukan oleh perusahaan jasa penyimpanan barang. Kegiatan Industri dan/atau penyimpanan barang dilakukan sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan;
3. Perusahaan Industri sebagaimana memiliki Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri;
4. Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri diterbitkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RJPMN Tahun 2015-2019, Kementerian Perindustrian diamanatkan untuk membangun 14 Kawasan Industri di Jawa. Kawasan Industri Jorong yang berlokasi di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu Kawasan Industri nasional. Terdapat pertimbangan untuk pembangunan, karena daya dukung lahan kawasan industri telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan di kawasan ini telah ada *anchor* industri yakni PT Gunung Prima dan PT Delta Prima Steel yang bergerak di bidang industri baja dan turunannya. Juga dukungan agro industry yang sudah ada. Penguatan terakhir memerlukan kajian mengacu pada Master Plan Kawasan Industri yang ada. Hal ini untuk menjadi pedoman perencanaan pembangunan Kawasan Industri Jorong yang efisien dan efektif dengan hasil yang optimum serta menciptakan

prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), dan menjadi kelolaan PT Jorong Food Developmnet.

Lingkup Nasional dalam Perencanaan dan implementasi kawasan Industri :



Gambar 4.5.

### Lingkup Kawasan Industri Nasional

Kabupaten Tanah Laut dengan Ibukota Kecamatan Pelabuhan dibatasi: Sebelah Barat dan Sebelah Selatan oleh Laut Jawa, Sebelah Timur oleh Kabupaten Tanah Bumbu dan Sebelah Utara oleh Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Secara letak geografis, Kabupaten Tanah Laut terletak di antara 114°30'20" Bujur Timur–115°23'31" Bujur Timur dan 3°30'33" Lintang Selatan - 411'38" Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah 3.631,35 km<sup>2</sup> atau hanya 9,71% dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Tanah Laut meliputi 11 Kecamatan. Daerah yang paling luas adalah Kecamatan Jorong dengan luas 628,00 km<sup>2</sup>, kemudian Kecamatan Batu Ampar seluas 548,10 km<sup>2</sup> dan Kecamatan Kintap dengan luas 537,00 km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan yang luas daerahnya paling kecil adalah Kecamatan Kurau dengan luas hanya 127,00 km<sup>2</sup>dengan batas–batas administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru;
- Sebelah Selatan : Laut Jawa;
- Sebelah Barat : Laut Jawa;
- Sebelah Timur : Kabupaten Tanah Bumbu.

Berdasarkan tingkat kelandaiannya wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, yaitu meliputi wilayah datar (kemiringan 0-2%) sebesar 290.147 Ha, wilayah bergelombang (kemiringan 2-15%) sebesar 43.060 ha, wilayah curam (kemiringan 15-40%) sebesar 26.833 ha dan wilayah sangat curam (kemiringan >40%) sebesar 12.890 Hektar.

Sedangkan Kecamatan Jorong itu sendiri adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Indonesia. Kecamatan Jorong adalah bagian dari wilayah Kabupaten Tanah Laut, yang terletak pada: 114,738° - 115,167° Bujur Timur, dan 3,68058° - 4,10942° Lintang Selatan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kecamatan Batu Ampar;
- Sebelah Timur : Kecamatan Kintap;
- Sebelah Barat : Kecamatan Panyipatan;
- Sebelah Selatan : Laut Jawa.

**Tabel 4.28.**

**Luas Dacrah Menurut Desa Di Kecamatan Jorong**

No	Desa	Luas Dacrah (Ha)	Luas Dacrah (%)
1	Sabuhur	235,00	37,44
2	Swarangan	175,00	27,88
3	Alur	4,78	0,76
4	Jorong	26,22	4,18
5	Karang Rejo	15,00	2,39
6	Muara Asam-Asam	10,00	1,59
7	Asam Jaya	9,00	1,43
8	Asri Mulya	9,00	1,43
9	Asam-Asam	56,00	8,92
10	Batalang	23,00	3,64
11	Simpang Empat Sei. Baru	65,00	10,35
<b>Jumlah</b>		<b>628,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Kecamatan Jorong Dalam Angka 2014

#### 4.6. Assessment : Identifikasi Komoditi /Produk/Jenis Usaha (KPJU)

KPJU Kabupaten Tanah Laut sesuai hasil kajian dalam RUPM ini dijadikan bagian penting analisis, untuk menetapkan program/kegiatan prioritas bagi penanaman modal bagi PMDN dan PMA, termasuk belanja modal Pemerintah melalui APBD/sektoral.

##### 4.6.1. Identifikasi Komoditi /Produk/Jenis Usaha (KPJU)

Penetapan KPJU unggulan dilakukan dengan pendekatan analisis yang meliputi berbagai teknik penilaian dan evaluasi. KPJU unggulan yang ditetapkan dapat menjadi Program dan/ atau proyek/kegiatan prioritas, sehingga menjadi dasar dalam kebijakan penanaman modal. Meskipun kebijakan pembangunan lainnya juga hadir dalam upaya melekatkan pengembangan potensi daerah. Penetapan KPJU unggulan adalah memiliki prioritas tujuan pembangunan. Setiap tujuan KPJU unggulan dibobot dalam kriteria masing-masing. Hal ini dirumuskan dalam tujuan pembangunan lintas sektoral secara terintegrasi.

Tabel 4.29

**Bobot Kepentingan Tujuan Penetapan KPJU Unggulan**

No	Tujuan KPJU Unggulan	Bobot
1	Pertumbuhan ekonomi	0,437
2	Peningkatan daya saing produk	0,308
3	Penciptaan lapangan kerja	0,255

(Sumber, BI, 2012).

Interpretasi tujuan terkait sektoral pembangunan, dapat diperluas dari 3 (tiga) aspek di atas. Bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, hal tersebut penting dikaitkan dengan RPJP/RPJMD, Renstra yang ditetapkan. Deskripsi tujuan KPJU unggulan Kabupaten Tanah Laut dalam RUPM ini dikaitkan, yaitu: (i) Kesesuaian KPJU dengan RTRW dan strategi keberlanjutan lingkungan pembangunan, (ii) Pengembangan aspek daya saing produk ke dalam aspek daya saing daerah, dan penciptaan lapangan kerja dengan kualitas IPM.

Sesuai RTRW, sesuai geografis lokasi pembangunan sektoral, maka bobot untuk kriteria KPJU unggulan diletakkan pada lokasi tingkat Kecamatan. Kriteria ditetapkan:



Jumlah unit usaha/rumah tangga dengan bobot 2,540  
Ketersediaan bahan baku dengan bobot 2,540  
Kontribusi terhadap perekonomian lokal dengan bobot 2,540  
Jangkauan pemasaran dengan bobot 2,381

Untuk tujuan penerapan analisis untuk memberikan bobot kepentingan KPJU, didukung analisis *linkage system* sebagai alat dan cara yang mempelajari adanya hubungan/keterkaitan antara *forward linkage* dan *backward linkage* sector /KPJU ekonomi. Keterkaitan tersebut meliputi :

1. Keterkaitan ke belakang (*backward linkage*), yaitu keterkaitan ekonomi kerakyatan dengan penyedia input produksi (keterkaitan penyerapan tenaga kerja dan keterkaitan dengan penyediaan bahan baku dan peralatan produksi) beserta sektor pendukung ekonomi kerakyatan.
2. Keterkaitan ke depan (*forward linkage*), yaitu keterkaitan masyarakat dengan pengguna output produksi (keterkaitan pemasaran produk ekonomi kerakyatan) beserta wilayah tujuan pemasaran.

#### **4.6.2. Deskripsi KPJU Unggulan Lintas Sektoral**

Mengacu pada arah Pembangunan sesuai RPJMD (2013-2018) Kabupaten Tanah Laut dan implementasi Visi Misi Pembangunan Tanah Laut 2018-2023 (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi: BERINTERAKSI. Pembangunan investasi daerah Tanah Laut dikelola dengan potensi yang dimiliki, yang memerlukan :

##### **Misi 1 (Berkarya)**

- Meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- Meningkatkan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi

##### **Misi 2 (Inovasi)**

- Menciptakan inovasi disegala sendi kehidupan masyarakat
- Melahirkan industri kreatif

##### **Misi 3 (Tata Kelola)**

- Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)
- Menerapkan prinsip-prinsip orang yang tepat dan cerdas pada jabatan yang selaras dalam pemerintahan

#### **Misi 4 (Religius)**

- Religius dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas kehidupan beragama

#### **Misi 5 (Sinergi)**

- Membangun sinergi yang baik dengan Pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
- Meningkatkan sinergisitas dengan Pemerintahan Desa, Kelurahan dan Kecamatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai Misi Pembangunan, kebutuhan manajemen investasi memerlukan dukungan dalam:

- 1) Perbaiki infrastruktur terutama jalan  
Perbaiki infrastruktur menjadi prasyarat untuk peningkatan perekonomian masyarakat serta untuk pengembangan wilayah. Infrastruktur penting untuk pengembangan wilayah.
- 2) Pariwisata Tanah Laut  
Salah satu ikon Kabupaten Tanah Laut yang selama ini belum secara optimal dimanfaatkan adalah daerah pariwisata. Secara komparatif, Tanah Laut unggul dalam hal pariwisata ini. Hanya saja belum banyak promosi yang terstruktur dan belum banyak event yang mampu menarik wisatawan. Pariwisata yang maju memberikan dampak multiplier yang sangat besar terhadap kemajuan daerah.
- 3) Potensi dan peningkatan produksi padi, jagung dan kedele (Upsus Pajale) (Kawasan Industri)
- 4) Peningkatan nilai tambah KPJU produk unggulan yang sudah ada (KPJU Pertanian, KPJU industry Pengolahan)
- 5) Pengembangan investasi pada Kawasan industri Jorong

Beberapa situasi yang mendeskripsikan KPJU Unggulan Tanah Laut:

- Pemerintah Kabupaten Tanah Laut mendukung pengembangan Pelabuhan Pelaihari/ Swarangan dengan memberikan lahan untuk pengembangan pelabuhan seluas 6 Ha kepada Kemeterian Perhubungan;
- Areal pengembangan kawasan sekitar Pelabuhan Pelaihari/ Swarangan memiliki luasan 1037 Ha (termasuk 6 Ha yang diberikan untuk pengembangan pelabuhan);

- Investasi pada industri hulu dan hilir dari KPJU yang didistribusikan dan diolah kembali, termasuk perlu memasukan produksi sektor perkebunanterkait (sawit, karet) dan perikanan laut (udang, kepiting, ikan patin). Hal ini potensi perikanan besar dengan panjang pantai Kabupaten Tanah Laut mencapai 200 km.
- Produksi batubara cenderung menurun sehingga perlu kajian komoditas (Moratorium), termasuk daftar negatif investasi untuk KPJU Kelapa Sawit karena pertimbangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Penilaian KPJU lintas sektoral di Kabupaten Tanah Laut (sisi pemerintah dan investor), perlu mempertimbangkan hal, antara lain:

- Tingkatan tenaga kerja di Kabupaten Tanah Laut yang memiliki karakteristik dengan tenaga kerja dalam lingkup nasional Indonesia. Ada karakteristik yang bersifat lokal dan ini tidak sama dalam konteks budaya, motive, dan atribut lain, namun dalam produktifitas dan pengembangan peran SDM ini menjadi bagian dari pengembangan
- Dalam keterkaitan dengan produk yang memasuki pasar, ada karakteristik dan pola sebagai kecenderungan membelanjakan pendapatan rata-rata yang beragam. Hal ini menjadi bagian dari bertumbuhnya suatu komoditi yang dihasilkan IKM, yang di Indonesia masih memiliki keragaman.
- Berdasarkan kecenderungan dan laju perkembangan tiap daerah di Indonesia tidak sama, terkait pertumbuhan dalam ekonomi, pendidikan, gaya hidup masyarakat dengan pola yang berbeda terkait disposable income mereka.

Besaran lain yang dapat dipakai sebagai ukuran dasar ialah pendapatan, nilai tambah, jumlah penduduk, luas tanah. Karena sector –sector pembangunan terkait KPJU dan KPJU unggulan dan potensial di Kabupaten Tanah Laut, dikelola dengan daya dukung industry primer, sekunder dan tersier. Terkait hal ini, maka dapat digunakan besaran tersebut, sebagai ukuran yang mempunyai nilai penafsiran yang berbeda-beda terkait KPJU unggulan dan potensial, yaitu:

1. Pendapatan merupakan besaran yang digunakan bila kita ingin mengetahui hubungan lokasi industri dengan pasaran umum produksi

2. Nilai tambah, digunakan bila kita tertarik pada satuan industri daerah berbanding dengan daya produksi buruh secara keseluruhan
3. Penduduk, digunakan bila yang dipersoalkan adalah keadaan dan kriteria kesejahteraan dan keseimbangan pembagian per kapita
4. Area/ kawasan (luas tanah), digunakan bila yang menjadi perhatian adalah persolan kemampuan perubahan guna tanah
5. Tenaga kerja pada industri sekunder, digunakan bila kita ingin menguji hipotesis orientasi suatu industri, atau mengetahui ada tidaknya faktor dalam suatu daerah yang diselidiki yang memperkuat atau memperlemah satuan industri, mengetahui lebih jauh daripada sekedar analisis orientasi, atau mengadakan studi kaitan geograsi yang ada dengan industri sekunder.

Sektor unggulan terkait ekonomi daerah adalah setiap sector yang paling efektif erperan. Sektor unggulan terkait ekonomi daerah adalah suatu sektor yang paling efektif untuk berperan sebagai "engine of development" dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan yang mengacu pada kemampuan sektor tersebut untuk mendorong dan menopang pertumbuhan maupun pembangunan seluruh sektor perekonomian (Mudzakir, 2003). Sektor unggulan sebagai sektor yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah tidak hanya mengacu pada lokasi secara geografis saja melainkan merupakan suatu sektor yang menyebar dalam berbagai saluran ekonomi sehingga mampu menggerakkan ekonomi secara keseluruhan. Berdasarkan Sambodo (2002), ciri-ciri sektor /KPJU yang memiliki keunggulan adalah : (i) Sektor/KPJU tersebut memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi; (ii) Sektor /KPJU tersebut memiliki angka penyebaran tenaga kerja yang relatif besar; (iii) Sektor /KPJU tersebut memiliki keterkaitan antar sektor yang tinggi baik keterkaitan ke depan ataupun kebelakang, dan (iv) Sektor /KPJU tersebut mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi.

Berdasarkan nilai tambah yang tercipta pada masing-masing sektor dan subsektor ekonomi, dapat ditentukan struktur perekonomian suatu wilayah. Struktur ini menunjukkan sektor-sektor unggulan dan sektor-sektor yang kurang berkembang dalam wilayah tersebut. Dalam jangka waktu yang tidak panjang dan dalam kondisi normal, biasanya struktur perekonomian suatu wilayah tidak mengalami pergeseran yang signifikan. Penentuan sektor ekonomi unggulan pada suatu daerah merupakan langkah awal menuju pembangunan yang berpijak pada konsep efisiensi untuk meraih

keunggulan komparatif dan kompetitif dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi yang dimiliki setiap daerah. Sehingga dengan demikian, fokus investasi pembangunan di daerah nantinya dapat lebih diarahkan untuk optimalisasi pemanfaatan potensi sektor-sektor ekonomi unggulan tersebut.

#### 4.7. Deskripsi KPJU Unggulan Kabupaten Tanah Laut

##### 4.7.1. Acuan Sektoral-KPJU Potensial dan KPJU Unggulan (Acuan Kajian BI (2012)

Komoditi Produk Jenis Usaha (KPJU) yang potensial menjadi cikal bakal KPJU unggulan suatu daerah. KPJU yang eksis dan berkembang perlu mendapat dukungan Pemerintah dalam melakukan manajemen investasi. Pemerintah melakukan pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan natural dengan keberlanjutan lingkungan. Kabupaten Tanah Laut memiliki KPJU dalam kelompok industri primer, sekunder dan tersier yang dikelola signifikan, dan memerlukan pengelolaan untuk penanaman modal secara terpadu.

Penetapan KPJU Unggulan dan KPJU potensial berkaitan dengan bentuk penawaran investasi daerah ini, yang akan dikategorikan ke dalam: Penawaran investasi yang potensial (Potential investment), prioritas (priority investment), dan siap ditawarkan (Investmen ready for offer).

Penetapan KPJU Kabupaten Tanah Laut didasarkan pada referensi :

**Tabel 4.30.**  
**Bobot Setiap Sektor sesuai Capaian KPJU- Kabupaten Tanah Laut**

No	Sektor Usaha	Skor AHP	KPJU
1	Pertanian/Perkebunan	0,149	4
2	Pertambangan/Penggalian	0,138	5
3	Pertanian/Tanaman Pangan	0,137	5
4	Perdagangan	0,102	5
5	Perindustrian	0,086	5
6	Pertanian/Hortikultura	0,076	5
7	Perikanan	0,076	5
8	Peternakan	0,070	5
9	Transportasi	0,051	5
10	Pariwisata, Hotel dan Restoran	0,042	5
11	Jasa	0,041	5
12	Kehutanan (non kayu)	0,033	

(Diolah Kembali dari Sumber, BI, (2012)

AHP atau Analisis Hirarki Proses menunjukkan interaksi sektor usaha dalam potensi dan peluang berkembang ke depan. Pengambilan keputusan manajemen investasi dengan menggunakan AHP dalam manajemen investasi yang mengandung unsur tingkat kepastian dari hasil yang dapat dicapai (payoff-outcome), meliputi: (i) Pengambilan keputusan bagi Investor dan pemerintah berada di bawah ketidakpastian; (ii) pengambilan keputusan dengan konteks hadirnya resiko; dan (iii) Keputusan di bawah kondisi (mendekati) kepastian berbasis regulasi. AHP (Thomas Saaty) dipenuhi dengan upaya memecahkan masalah ke dalam bagian – bagian komponennya dan mengelola setiap bagian ke dalam suatu susunan hirarki.

Proses hirarki analisis untuk manajemen investasi Kabupaten Tanah Laut didekati dengan pendekatan situasi (analisis stakeholders):

- (i) Menyusun secara hirarki (memecahkan problem menjadi unsur – unsur terpisah: fokus masalah, kriteria, alternatif.

Fokus masalah sebagai masalah utama yang perlu dicari solusinya dan dibentuk ke dalam satu elemen tujuan dan sasaran secara menyeluruh.

Kriteria (sub kriteria) sebagai aspek-aspek penting yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan atas fokus masalah (dapat dalam format lebih dari satu tingkat hirarki).

Alternatif sebagai berbagai tindakan akhir dari pilihan keputusan atas masalah dalam tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

H1: Fokus Tujuan dan sasaran : Pemilihan KPJU untuk Manajemen Investasi

H2: Kriteria : Regulasi-TOLSE (Regulasi dan Kerangka Konseptual)

H3: Pilihan : Penawaran Investasi untuk Potential Investment (PI); Prioritas Investasi dan Investasi yang siap ditawarkan.

- (ii) Menetapkan prioritas : sebagai pendekatan dalam hal menentukan peringkat elemen – elemen menurut relatif pentingnya. Mana elemen yang penting – memungkinkan. berapa kali lebih penting – memungkinkan. (dari terendah 1 sampai tertinggi 9 ). Dilakukan dengan perbandingan (MPE: Metode Perbandingan Eksponensial) antara setiap elemen yang dinilai. Untuk hal ini

diberlakukan prinsip "timbang balik", di mana jika A dinilai 4, maka B adalah 1/4. Perluanya pembobotan dan penjumlahan untuk menghasilkan satu bifangan tunggal yang menunjukkan prioritas setiap elemen. Elemen dengan skor tertinggi sebagai alternatif /rencana yang patut atau layak dipertimbangkan untuk atau layak dipertimbangkan untuk dipilih.

(iii) Mengukur konsistensi logis: sebagai jaminan bahwa semua elemen dikelompokkan secara logis dan diperingkatkan secara konsisten sesuai kriteria logis;

#### 4.7.2. Acuan Analisis Situasi (Analisis Stakeholders)

Pengambilan keputusan manajemen investasi tidak hanya karena relevansi informasi, tetapi juga karena adanya masalah yang kompleks yang dihadapi dalam pengelolaan investasi daerah.

##### Acuan Analisis Situasi (Stakeholders)

Pendekatan ini menekankan aspek manajemen investasi dengan berbagai pertimbangan untuk memenuhi hirarkhi dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini didukung diskusi, wawancara serta FGD terkait manajemen investasi.

##### (1) Analisis Potensi, Prioritas KPJU Unggulan

Stakeholders	Bagaimana pengaruh dari problem	Kapasitas berhubungan dengan problem	Motivasi untuk problem solving
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut			
Leading Sektor SKPD dan UPTD Pemerintah Desa BUMD	-Relevansi regulasi -Kerangka anggaran -Pemberdayaan Sektor /KPJU Unggulan lintas sektoral	Keterbatasan kesesuaian regulasi -Daya dukung RKA-DPA/TA -Dukungan APBD -Relevansi strategi pemberdayaan Layanan unit usaha (KPJU)	Positif dan tinggi Kajian Kelayakan Usaha dan Kajian Business /sektoral
Private Sektors			
Industri KM (Sekunder dan Tersier)	Posisi dalam bisnis	Keterbatasan infrastruktur dan suprastruktur manajemen Problem input, proses, dan output (kualitas)	Adanya kebutuhan pengembangan sistem manajemen bisnis
Society			

Masyarakat Profesi/Asosiasi Konsumen (Gov't, Private, Socio)	Psikologi pilihan kualitas dan nilai tambah perekonomian regional/nasional/ Global	Penerimaan komoditi (pasar) KPJU potensial	Demanding (kualitas, ketersediaan, harga jual) KPJU Unggulan
--	--	--	--

(Sumber: Diolah, 2019)

### Potensi, dan Prioritas KPJU Unggulan

Effect (Dampak - )

Administrasi	Hambatan koordinasi --relevansi regulasi terkait sektoral (lintas Kementerian)
Teknik	Hambatan Teknologi Jejaring internal dan eksternal sektoral
Sosial	Hambatan dalam upaya Relasi jejaring investasi
Strategi	Hambatan dalam Pengembangan Visi dan Misi, Tujuan dan sasaran, Kebijakan Rencana Program pembangunan /sektoral

Problem: Potensi dan Prioritas KPJU (unggulan)

Causes: Penyebab

Administratif	Regulasi Nasional, Regional, Lokal dan Global belum harmoni terkait KPJU Unggulan lintas sektoral, KPJU potensial
Teknik	Kapasitas proses produksi yang kurang kompetitif, Komoditi /Produk kalah dalam kemasan, labeling, sertikasi produk berbasis proses mutu ... pola manajerial pembangunan sektoral... jejaring investasi
Sosial	Hubungan SDM Produsen, Trader, dengan sistem regulasi, kualitas, marketing..
Strategik	Disain strategi (Renstra) yang belum kompetitif untuk tabap pertumbuhan lintas sektoral untuk KPJU unggulan- KPJU potensial

Leading Sektor : DPMPSTP dan SKPD terkait

### Gambar 4.6. Analisis Potensi-KPJU Unggulan

#### 4.7.3. Analisis Tujuan (Objective Analysis);

Analisis ini sebagai pedekatan yang digunakan untuk: (i) Menggambarkan situasi di masa depan begitu masalah telah diatasi dengan partisipasi pihak perwakilan (peran Pemerintah/leading sektor); (ii) memverifikasi khirarki dari tujuan; (iii) Menetapkan suatu hubungan cara dengan akhir yang dituju (means-ends). Merubah situasi negatif dari pohon masalah untuk dirubah ke dalam solusi, yang menunjukkan kondisi pencapaian yang positif dalam pengelolaan KPJU /sektoral dan investasi dalam layanan sektoral pembangunan.

**Kegunaan :** Untuk membantu dalam analisis dan menghadirkan idea-ide dan ringkasan situasi yang diinginkan.



**Output:** Pohon tujuan (objective tree) dengan cara-cara (means) dan tujuan (ends)

Pendekatan dalam analisis tujuan :

- ⊕ Merubah *the problem tree* ke dalam satu *objectives tree* melalui pernyataan kembali the problems sebagai objectives.
- ⊕ Pernyataan masalah (Problem statement) dirubah ke dalam pernyataan positif (positive statements)
- ⊕ Bagian atas analisis adalah tujuan yang ingin dicapai
- ⊕ Bagian bawah analisis adalah cara (means) dalam mencapai tujuan

Setelah menetapkan problem analysis, kemudian ditetapkan objective analysis sebagai titik balik dari kondisi yang dihadapi). Objective analysis: merubah hal negatif (pada dampak menjadi sesuatu yang positif dan ingin dituju); Core problem dijadikan sebagai benefit atau peranan dan menyatakan sebagai Nama program/kegiatan investasi; Causes atau penyebab dijadikan positif sebagai aktifitas yang akan dilakukan sesuai nama program/kegiatan) pembangunan yang dipertimbangkan akan dinyatakan ke dalam dokumen SIPID untuk akses Kabupaten Tanah Laut.

#### Potensi dan Prioritas KPJU Unggulan dan Pertumbuhan

##### GOAL /ENDS/OBJECTIVES

Merubah hal negatif dari dampak menjadi tujuan (goals) pengelolaan investasi KPJU /Sektoral

Peranan Program : Potensi dan Prioritas KPJU /Sektoral dan Pertumbuhan

MEANS (CARA) : Penyajian informasi potensi dan peluang (manajemen investasi)

Administratif	Manajemen investasi Program/Kegiatan/Proyek disain "Regulatory Impact Assessment" (RIA) pada keselarasan Regulasi Nasional, Regional, Lokal dan Global terkait KPJU/Sektoral (unggulan dan potensial)
Teknik	Manajemen investasi Program/Kegiatan/Proyek peningkatan Kapasitas proses produksi yang kurang kompetitif, kemasan produk/lebaling, sertifikasi KPJU/sektoral
Sosial	Manajemen investasi Program/kegiatan/proyek dalam pengembangan hubungan SDM KPJU unggulan, Trader, dengan sistem regulasi terkait RPJP-RPJM, RENSTRA, Isu MEA, Provinsi-Kabupaten (RUPM – RPIP/K) kualitas, marketing: Sektoral
Strategik	Rencana strategik dan manajemen investasi Program/kegiatan/proyek penyusunan Disain strategi yang kompetitif untuk pengelolaan KPJU unggulan dan investasi, untuk Desa, lokal, nasional, dan MEA/global (sesuai existing condition KPJU Unggulan dan pertumbuhannya dari KPJU potensial) :

**Gambar 4.7.**

**Potensi dan Prioritas KPJU Unggulan dan Pertumbuhan (Goal/Ends/Sasaran)**

Manajemen Investasi: Metode /Program/Kegiatan/Proyek: yang akan dilakukan /telah dilakukan/ditingkatkan dari adanya Penyebab (causes)

Leading Sektor : DPMPPTSP dan SKPD terkait

#### 4.7.4. Analisis Manajemen Investasi: Solusi /Pemilihan Program/Kegiatan:

##### 1. Perspektif Analisis Strategik

Analisis Strategik adalah suatu alat yang membantu untuk mengevaluasi alternative strategi untuk menetapkan satu atau lebih tujuan (goals). Analisis strategic juga disebut *Alternative Analysis Tool* dan *Strategic Options Analysis*. Tujuan dari strategy analysis adalah pembagian dari *objectives tree* ke dalam sub unit yang lebih kecil dengan lebih konsisten, yang bisa, menyusun inti dari Kegiatan/proyek. Setiap sub-units dari *objective tree* dapat menghadirkan suatu alternative strategy untuk proyek ke depan. Sasaran-sasaran proyek menyusun kerangka kerja untuk strategi dari Program dan/proyek/kegiatan terkait penanaman modal pada KPJU/sektoral.

Tahap analisis strategic ini lebih sulit dan memiliki tantangan, ini meliputi sejumlah rumusan yang bermakna dari informasi lalu membuat pertimbangan kompleks tentang strategi implementasi terbaik yang akan dituju. Penyesuaian sering dimiliki dan dibuat untuk menyeimbangkan kepentingan stakeholders yang berbeda, permintaan politik dan hambatan praktis seperti ketersediaan sumber daya pada organisasi. Tugas dibuat lebih mudah jika terdapat susunan yang disetujui dari criteria yang berlawanan di mana untuk menilai urutan atau *merits* dari pilihan-pilihan intervensi yang berbeda pada alternatif kegiatan/proyek dari suatu program.

Kriteria kunci investor untuk pemilihan strategi dapat meliputi:

- Ekspektasi kontribusi untuk key policy objectives, seperti poverty reduction atau economic integration
- Manfaat (Benefits) untuk target groups dari stakeholders –termasuk: women and men, young and old, disabled and able, dll
- Kelengkapan dengan program atau proyek yang direncanakan atau dengan program atau proyek dan yang “on going”
- Implikasi Capital dan operating cost, dan kemampuan local untuk berhadapan dengan “recurrent costs”
- Biaya dan manfaat (cost-benefit) ekonomi dan keuangan
- Kontribusi untuk institutional capacity building

- Kelayakan Teknis (Technical feasibility)
- Environmental impact

Kriteria rencana strategic investasi untuk pemilihan program/kegiatan/proyek KPJU/sektoral didukung Leading Sektor dan SKPD terkait, yaitu:

1. Relevansi: strategi berkorespondensi dengan kebutuhan stakeholders dalam pemenuhan benefit;
2. Efektifitas: level terendah dari tujuan pada strategi akan memberikan kontribusi untuk pencapaian project purpose (feasible)
3. Efisiensi: *cost-effectiveness* dari strategy dalam merubah (transforming) cara/"means" ke dalam pencapaian "results".
4. Konsistensi: kesesuaian dengan kebijakan pengembangan (development policies)
5. Sustainability: Program/Proyek berhubungan dengan apakah manfaat proyek akan berkelanjutan setelah bantuan /dukungan eksternal berakhir.

Matrik kelayakan (Feasibility) dapat digunakan untuk memilih strategi investasi untuk dimasukan/dibentuk dalam/menjadi suatu program/projek/kegiatan (didukung potensi dan peluang investasi). Kriteria berikut dipertimbangkan dalam memilih alternative strategi investasi untuk pengembangan KPJU/sektoral.

**Tabel 4.31**

**Kriteria Kelayakan Strategi Investasi untuk Program/Kegiatan**

Kriteria	Strategy 1	Strategy 2	Strategy 3
Kontribusi untuk membangun kapasitas kelembagaan	High	Low	Medium
Kelayakan Teknis	Low	High	Medium
Capital dan implikasi beban operasional dan kemampuan local untuk memenuhi <i>recurrent costs</i> .	Low	Medium	Medium
Social acceptability	High	High	High
Benefits to target group	High	Low	Low

Kriteria yang digunakan di atas hanya sebagai acuan dalam memenuhi fungsi dan peran dari leading sektor dalam pembangunan didukung manajemen investasi KPJU/sektoral. Kriteria dipilih harus spesifik dengan konteks pengembangan KPJU/sektoral, lintas sektoral yang berkaitan dengan komoditi dan unit usaha dalam pertumbuhannya. Suatu matrik kelayakan atau "feasibility" dapat digunakan untuk memilih strategi atau strategi-strategi untuk dimasukan/dibetuk dalam/menjadi suatu Program/proyek/kegiatan, dengan memenuhi investasi pada kelayakan keragaman kriteria, antara lain:

Tabel 4.32.

**Kriteria Kinerja untuk Pilihan Strategi Program Pengembangan KPJU/Sektoral**

Kriteria	Strategy 1	Strategy 2	Strategy 3
IMPACT	High	Low	Medium
FEASIBILITY	Low	High	Medium
COST	Low	Medium	Medium
ACCEPTANCE	High	Medium	Medium
SUSTAINABILITY	High	High	High
TIME	High	Low	Low

**Factors Penjamin Sustainability**

- Dukungan kebijakan (Policy Support);
- Kesesuaian teknologi (Appropriate technology);
- Perlindungan ;lingkungan (Environmental protection);
- Aspek socio-cultural aspects/gender issues;
- Kapasitas kelembagaan dan manajemen;
- Keberlangsungan hidup keuangan dan ekonomi.

## 2. Acuan SWOT "KPJU" Lintas Sektoral Kabupaten Tanah Laut

### Kelapa Sawit:

<p>Peluang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Banyak investor</li> <li>Banyak Kelompok Tani</li> <li>Banyak Menyerap tenaga kerja</li> <li>Kebutuhan pasar tinggi (demanding)</li> <li>Investasi jangka panjang</li> <li>Membuka industry hilir</li> <li>Kesinambungan usaha</li> <li>Serikat Petani Kelapa Sawit</li> </ul>	<p>Tantangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pasar ditentukan harga industry (bukan harga pasar)</li> <li>Pasar terbatas</li> <li>Persaingan tinggi</li> </ul>
<p>Kekuatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lahan tersedia</li> <li>Relatif aman dari gangguan hama, penyakit</li> <li>SDM cukup tersedia</li> <li>Peralatan tersedia</li> <li>Pasar tersedia</li> <li>Ketersediaan pasar input</li> </ul>	<p>Kelemahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bibit yang asli dan palsu sulit diidentifikasi saat pembibitan</li> <li>Kebutuhan modal besar</li> <li>Keterkaitan /ketergantungan pada perusahaan (pembeli Tandan Buah Segar/TBS)</li> </ul>

### Batubara

<p>Peluang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Banyak investor</li> <li>Pasar cukup</li> <li>Investasi jangka panjang</li> <li>Membuka industry hilir</li> </ul>	<p>Tantangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perijinan</li> <li>Keberlanjutan lingkungan (Reklamasi)</li> </ul>
<p>Kekuatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lahan tersedia cukup luas</li> <li>SDM cukup tersedia</li> <li>Peralatan teknis tersedia</li> <li>Adanya pelabuhan khusus</li> </ul>	<p>Kelemahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kebutuhan modal besar</li> <li>Bahan baku tidak dapat diperbaharui</li> <li>Ketersediaan expert</li> </ul>

### Karet PB 260

<p>Peluang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Investasi perspective potensial-</li> <li>Dapat diusahakan petani dan kelolaan bersama</li> <li>Adanya kelompok tani</li> <li>Adaya kebutuhan pasar</li> </ul>	<p>Tantangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Investasi padat modal</li> <li>Harga jual berfluktuasi</li> <li>Masa panen tergantung cuaca</li> </ul>
<p>Kekuatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lahan tersedia cukup luas</li> <li>Mudah tumbuh di dataran rendah dan/tinggi</li> <li>Ketersediaan bibit unggul</li> <li>Bibit asli benih unggul mudah dikenali</li> <li>Peralatan teknis tersedia</li> <li>Adanya pelabuhan khusus</li> </ul>	<p>Kelemahan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Resiko pemeliharaan tinggi</li> <li>Kebutuhan tenaga kerja dalam jumlah besar</li> <li>Aspek gangguan teknis (mudah terbakar)</li> <li>Musim hujan usah panen</li> </ul>

Sapi Bali

<b>Peluang:</b> Budidaya untuk agribisnis Pemeliharaan mudah Pasar terbuka Lokasi dan geografis mendukung Adanya kelompok tani	<b>Tantangan:</b> Musim kemarau /sulit mendapatkan pakan rumput hijau Belum ada produk olahan bentuk mentah
<b>Kekuatan:</b> Pasar bibit sapi terbuka Mudah dalam pemeliharaan Ketersediaan bibit unggul	<b>Kelemahan:</b> Musim tertentu /sulit memenuhi bibit sapi Mudah terserang penyakit Tantangan modal

Karet Jenis IR

<b>Peluang:</b> Potensi investasi Bisa difakukan secara mandiri dan dengan pengelolaan bersama Dukungan kelompok tani Kebutuhan pasar	<b>Tantangan:</b> Padat modal Masa panen tergantung cuaca
<b>Kekuatan:</b> Dukungan modal Ada bibit unggul Pemasaran potensial Bibit asli benih unggul mudah dikenali Dapat tumbuh di dataran tinggi atau rendah	<b>Kelemahan:</b> Resiko pemeliharaan tinggi Musim panen tergantung cuaca Musim hujan (sulit panen) Bibit didaangkan dari luar Proses produksi tradisional Perlu jumlah tenaga kerja yang banyak Mudah terbakar

**Gambar 4.8**  
**Analisis SWOT KPJU**  
**Tanah Laut**

### 3. Acuan KPJU: Deskripsi LQ Tanah Laut

**Tabel 4.33.**  
**LQ Kabupaten Tanah Laut**

LAPANGAN USAHA	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata LQ
1. Pertanian	1.28	1.29	1.32	1.32	1.30
2. Pertambangan & Penggalian	1.21	1.23	1.20	1.18	1.20
3. Industri Pengolahan	0.83	0.84	0.86	0.89	0.86
4. Pengadaan Listrik, Gas	0.65	0.66	0.67	0.66	0.66
5. Pengadaan Air	0.43	0.44	0.44	0.44	0.44
6. Konstruksi	0.86	0.88	0.88	0.91	0.88
7. Perdag Besar dan Eceran dan Reparasi	1.07	1.08	1.11	1.11	1.09
8. Transportasi dan Pergudangan	0.89	0.91	0.93	0.92	0.92
9. Akomodasi dan Makan Minum	0.73	0.74	0.75	0.76	0.74

10. Informasi dan Komunikasi	0.82	0.83	0.83	0.84	0.83
11. Jasa Keuangan	0.40	0.40	0.40	0.41	0.40
12. Real Estate	0.87	0.87	0.89	0.89	0.88
13. Jasa Perusahaan	0.49	0.49	0.50	0.50	0.50
14. Adm Pem., Pertahanan dan Jamsos	0.88	0.89	0.90	0.51	0.90
15. Jasa Pendidikan	0.81	0.85	0.88	0.85	0.85
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.52	0.52	0.53	0.53	0.53
17. Jasa Lainnya	0.60	0.61	0.62	0.62	0.61
Jumlah					

(Sumber, diolah kembali, 2019)

$LQ > 1$  : menunjukkan sub wilayah yang diamati memiliki potensi surplus

$LQ < 1$  : menunjukkan sub wilayah yang diamati memiliki kecenderungan impor dari wilayah lain

$LQ = 1$  : menunjukkan sub wilayah yang diamati telah mencukupi dalam lapangan usaha tertentu

Berdasarkan hasil perhitungan LQ, secara umum dapat digambarkan bahwa Kabupaten Tanah Laut memiliki keunggulan secara komparatif pada sektor pertanian, pertambangan dan penggalian. Keunggulan dari sektor-sektor tersebut ditunjukkan dengan nilai LQ yang selalu berada diatas 1,00 dalam periode tahun yang dianalisis. Nilai LQ-nya berada pada angka di atas 1,50. Meskipun demikian sub-sektor Pariwisata disepakati sebagai sector potensial yang perlu diprioritaskan. Sub-sektor pariwisata dalam format sektoral (17 bidang lapangan usaha), ada di lapangan usaha akomodasi dan makan minum atau sebagai jasa usaha lainnya.

#### 4.8. Analisis Potensi, Unggulan, Prioritas, Dan Peluang Investasi Daerah

Data potensi, unggulan untuk prioritas investasi dikemukakan setelah menelaah hasil kajian dengan dukungan upaya menjangring informasi, masukan, dan tanggapan dari manajemen daerah yang sesuai dengan konsep pendekatan *bottom up*, dan pada acuan top Down Perumusan data dan informasi ke dalam template KPJU potensi, KPJU unggulan dan peluang investasi daerah dikemukakan sesuai juga dengan hasil *Focuss Group Discussion*.

Deskripsi uraian topik bahasan yang dapat dirumuskan dan disimpulkan dari hasil kajian dan diskusi terarah, didukung pendekatan analisis Hirarki Proses (AHP), dikemukakan dengan data berikut ini.

#### 4.8.1. Penyebaran KPJU Potensial Di Tanah Laut

**Tabel 4.34.**  
**KPJU Potensial**  
**Kabupaten Tanah Laut**  
**(Dasar LQ dan AHP)**

LAPANGAN USAHA	Rata-Rata	Nilai	Bobot Nilai	MPE:Bobot Nilai	MPE: Rank
1. Pertanian	1.30	9	4	6.561	2
2. Pertambangan & Penggalian	1.20	8	2	64	9
3. Industri Pengolahan	0.86	6	5	7.776	1
4. Pengadaan Listrik, Gas	0.66	5	4	625	6
5. Pengadaan Air	0.44	4	4	256	7
6. Konstruksi	0.88	6	4	1.296	5
7. Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi	1.09	7	4	2.401	4
8. Transportasi dan Pergudangan	0.91	6	4	1.296	5
9. Akomodasi dan Makau Minim (Pariwisata)	0.74	5	5	3.125	3
10. Informasi dan Komunikasi	0.83	6	4	1.296	5
11. Jasa Keuangan	0.40	4	4	256	7
12. Real Estate	0.88	6	4	1.296	5
13. Jasa Perusahaan	0.50	4	4	256	7
14. Adm Pcm. Pertahanan dan Jamsos	0.90	6	4	1.296	5
15. Jasa Pendidikan	0.85	6	4	1.296	5
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.53	4	4	256	7
17. Jasa Lainnya	0.61	6	3	216	8
Jumlah					

(Diolah, sesuai rumusan AHP/MPE)

KPJU sesuai lapangan usaha di atas, adalah potensial untuk dikembangkan, telah memberikan kontribusi dalam pembangunan PDRB. MPE : rank dari 1 sampai dengan 9 adalah KPJU Potensial Kabupaten Tanah Laut.



#### 4.8.2. Penyebaran KPJU Unggulan Di Tanah Laut

**Tabel 4.35**  
**KPJU Unggulan**  
**Kabupaten Tanah Laut**  
**(Dasar LQ dan AHP)**

LAPANGAN USAHA	Rata-Rata	Nilai	Bobot Nilai	MPE:Bobot Nilai	MPE; Rank
1. Pertanian	1.30	9	4	6.552	2
2. Pertambangan & Penggalian	1.20	8	2	64	9
3. Industri Pengolahan	0.85	6	5	7.776	1
4. Pengadaan Listrik, Gas	0.66	5	4	625	6
5. Pengadaan Air	0.44	4	4	256	7
6. Konstruksi	0.88	6	4	1.296	5
7. Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi	1.09	7	4	2.401	4
8. Transportasi dan Pergudangan	0.91	6	4	1.296	5
9. Akomodasi dan Makan Minum (Pariwisata)	0.74	5	5	3.125	3
10. Informasi dan Komunikasi	0.83	6	4	1.296	5
11. Jasa Keuangan	0.40	4	4	256	7
12. Real Estate	0.88	6	4	1.296	5
13. Jasa Perusahaan	0.50	4	4	256	7
14. Adm Pem., Pertahanan dan Jamsos	0.90	6	4	1.296	5
15. Jasa Pendidikan	0.85	6	4	1.296	5
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.53	4	4	256	7
17. Jasa Lainnya	0.61	6	3	216	8
Jumlah					

(Diolah, sesuai rumusan AHP/MPE)

KPJU unggulan Kabupaten Tanah Laut sesuai deskripsi KPJU potensial, adalah yang dipertimbangkan bernilai MPE: Bobot nilai di atas nilai 2.000. Hal ini didasarkan juga sector/KPJU tersebut (Pertanian : peternakan, perikanan laut, usaha tambak ), Industri pengoahan, yang memiliki :

**Faktor Pendukung :**

1. Lokasi tempat (Desa-Kecamatan) kaya bahan mentah
2. Jumlah tenaga kerja tersedia cukup banyak
3. Tersedia pasar yang potensial
4. Iklim usaha yang menguntungkan untuk orientasi kegiatan industry, dagang dan jasa
5. Tersedia berbagai sarana maupun prasarana untuk aktifitas industri
6. Stabilitas kewan yang kondusif

7. Mendukung untuk melakukan berbagai kerjasama dengan jejaring eksternal seperti dalam hal permodalan, alih teknologi, dll.
8. Letak geografis Desa-Kecamatan yang menguntungkan
9. Kebijakan pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang mendukung BUMDesa
10. Tersedia sumber tenaga listrik yang cukup.

**Faktor Penghambat Pembangunan Investasi antara lain:**

1. Penguasaan teknologi masih perlu ditingkatkan
2. Mutu barang yang dihasilkan masih kalah bersaing dengan pihak produsen lain
3. Promosi di pasaran masih sangat sedikit dilakukan
4. Jenis-jenis barang tertentu bahan bakunya masih sangat tergantung dari daerah lain
5. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan belum merata di wilayah Kabupaten Tanah Laut;
6. Modal entitas bisnis yang dimiliki masih relatif kecil

**Dampak Negatif Pembangunan Investasi**

Perlunya “filtering” pada kebijakan investasi secara berkelanjutan untuk mengantisipasi:

1. Terjadi pencemaran lingkungan (mengabaikan AMDAL)
2. Konsumerisme
3. Hilangnya kepribadian masyarakat yang sarat dengan local content
4. Terjadinya peralihan karena hilangnya kegiatan (persaingan)
5. Terjadinya urbanisasi di kota-kota
6. Terjadinya permukiman kumuh di kota-kota yang mengabaikan RTRW

**KPJU unggulan tersebut memiliki dampak Positif Pembangunan dengan penguatan investasi**

1. Terbukanya lapangan kerja pada sector pertanian, industry pengolahan
2. Terpenuhinya berbagai kebutuhan masyarakat yang bersifat primer
3. Pendapatan/kesejahteraan masyarakat meningkat selaras dengan aktifitas bisnis
4. Mendorong untuk berfikir maju bagi masyarakat yang bercorak agraris menuju industri
5. Terbukanya usaha-usaha lain di luar bidang industri

Potensi dan peluang investasi Kabupaten Tanah Laut terkait setiap kebijakan pemasaran investasi dan perijinan sesuai kawasan pembangunan berbasis RTRW dikemukakan sesuai pembagian administrasi pemerintahan kecamatan.

4.9. KPJU untuk Potential Investment / Prioritas Investasi dan Siap Ditawarkan

Tabel 4.36

List KPJU Unggulan/Sektor Usaha Kabupaten Tanah Laut

Tabel 4.36.1  
Sektoral Pertanian (1)  
Pertanian /Tanaman Pangan (1.1)

No	KPIU	Skor Terbobot	Prospek PM
	Pertanian/Tanaman Pangan		1/2/3
1	Jagung Pakan Ternak	0,174	
2	Padi Unggul IR 42	0,172	
3	Padi Sibuyung	0,164	
4	Padi Siam Unus	0,151	
5	Jagung Tongkol 2	0,098	
6	Pada Varetas Pontianak		
7	Ubi Kayu		
8	Jagung Manis		
9	Kacang Tanah		
10	Kacang Hijau		

Pertanian/Hortikultura (1.2)

No	KPIU	Skor Terbobot	Prospek PM
	Pertanian/Hortikultura		1/2/3
1	Semangka	0,235	
2	Cabai Rawit	0,130	
3	Pisang Manurun	0,130	
4	Seledri	0,095	
5	Jeruk Manis	0,086	
6	Bayam		
7	Durian Lokal Siwaluh		
8	Pisang Mas		
9	Wortel		
10	Kencur		

Perkebunan (1.3)

No	KPIU	Skor Terbobot	Prospek PM
	Perkebunan		1/2/3/
1	Kelapa Sawit	0,387	Negatif List
2	Karet PB 260	0,281	
3	Karet Jenis IR	0,263	
4	Kelapa	0,059	

Peternakan (1.4)

No	KPIU	Skor Terbobot	Prospek PM
	Peternakan		1/2/3
1	Sapi Bali	0,225	
2	Ayam Ras (Pedaging)	0,162	
3	Kerbau	0,106	

4	Sapi Perah (Ongole)	0,092	
5	Itik Alabio Petelur	0,088	
6	Kambing		
7	Sapi Limosin		
8	Ayam Buras Petelur		
9	Ayam Buras Pedaging		
10	Kambing kacang		

Peternakan (1.5)

No	KPJU	Skor Terbobot	Prospek PM
	Perikanan		1/2/3
1	Ikan Nila (tambak/kolam)	0,225	
2	Ikan Patin (tambak/kolam)	0,207	
3	Ikan Nila (keramba)	0,201	
4	Ikan Mas (keramba)	0,173	
5	Ikan Patin (keramba)	0,089	
6	Ikan Nila (tangkap sawah)		
7	Ikan Otek (tangkap)		
8	Ikan Pedas (tagkap)		
9	Ikan Gabus (tangkap)		
10	Ikan Tongkol		

Kehutanan (1.6)

No	KPJU	Skor Terbobot	Prospek PM
	Kehutanan		1/2/3
1	Kayu Galam	0,500	
2	Kayu Ulin	0,500	
3			

Tabel 4.36.2  
Sektoral Industri (2)

Kelompok Industri Pangan (2.1.)

No	Komoditi	Potensial	PM
1	Pentol bakso		
2	Ikan Kering Asin, Ikan Asin Talang		
3	Udang beku dan Kodok Seger		
4	Ikan Rabuk/Abon haruan		
5	Saos Tomat		
6	Minyak kelapa/VCO		
7	Ice Cream, Pudding		
8	Tepung Beras		
9	Kue kering/Roti/Sejenis		
10	Pakan ikan ternak		
11	Gula merah		
12	Sirup/Glukose		
13	Mie basah/macaroni		
14	Pengolahan Kopi		
15	Pembungkusan the		

16	Es batu/Blok		
17	Kecap		
18	Tempe dan Tahu		
19	Susu tahu/Susu kacang kedelai*)		
20	Kacang-Kacangan		
21	Kerupuk		
22	Bumbu Masak		
23	Kue basah/Sejenisnya		
24	Telur Asin *)		
25	Pengemasan garam (Yodium)		
26	Petis kering		
27	Pembungkusan asam Jawa		
28	Pembungkusan Beras		
29	Snack Jagung		
30	Pembungkusan Kesumba		
31	Pembungkusan Mentega		
32	Pembungkusan Tepung Tapioka		
33	Keripik Singkong		
34	Minuman Air Mineral		
35	Penggilingan Padi (Rice Milling)		

(Sumber, Diolah, kembali, 2019)

#### Kelompok Industri Sandang (2.2)

No	Komoditi	Potensial	PM:Jlh Investasi
1	Kain Sasirangan “ Si Arek Jangkung”		
2	Konveksi Gorden		
3	Pembungkusan Kapas		
4	Penjahitan Karung Goni		
5	Pakaian Jadi Rajutan		
6	Pembuatan Kasur, bantal, dll		
7	Konveksi Pakaian Jadi		
8	Jasa Binatu Pakaian, Karpas dll		
9	Jasa sandang lainnya		

(Sumber, Diolah, kembali, 2019)

#### Kelompok Industri Kimia dan Bahan Bangunan (2.3.)

Potensial:

No	Komoditi	Potensial	PM:Jlh Investasi
1	Cat Untuk bahan bangunan		
2	Bedak/Kosmetik Tradisional		
3	Pembuatan Sabun		
4	Tawas & Kaporit		
5	Interior Rumah Tangga		
6	Room Caster plastik, Riber glos		
7	Lukisan dari Kaca		

8	Gypsum		
9	Tajau dari Semen		
10	Batako/bata Press, Bata Merah		

Kelompok Industri Logam dan Elektronik (2.4)

No	Komoditi	Potensial	PM Jlh Investasi
1	Pengecoran Besi		
2	Pagar, Pintu Teralis		
3	Pembuatan Parang dll		
4	Alat Pertanian dari Logam		
5	Bengkel Las & Bubut		
6	Alat dari Logam (Paku ) dll		
7	Roda kapal, dll		
8	Perabot Rumah tangga		
9	Kawat Harmonika		
10	Barang Logam Lainnya		
11	Pompa Sedot Pasir		
12	Balancing Turbo & Injection pump		
13	Bengkel Gergaji		
14	Pembuatan Sound Sistem		
15	Perbaikan Dinamo & Strom Accu		
16	Perakitan/perbaikan Dinamo		
17	Las Listrik & panel Listrik		
18	Chroom varnikel kendaraan		
19	Pembuatan kapal/Speed Boat		
20	Peralatan Kapal		
21	Reparasi Kapal		
22	Reparasi Sepeda		
23	Furniture Logam (bed dll)		
24	Alat Peraga Pendidikan		
25	Perbaikan kapal/Tongkang		
26	Furniture Logam (rak Piring)		
27	Barang Logam Lainnya		
28	Daur ulang barang dari logam		
29	Docking Kapal		
30	Js Perbaikan Mobil		
31	Js Perbaikan Sepeda Motor		
32	Service Barang Elektronik		
33	Peralatan Berbahan Aluminium		

Kelompok Industri Kerajinan (2.5)

No	Komoditi	Potensial	PM: Jlh Investasi
1	Pembersih Kaca dari bulu ayam		
2	sapu Ijuk, Topi Purun		
3	Anyaman Purun		
4	Pembuatan sangkar burung		
5	Figura dari Kayu		
6	Merangkai bunga, Pakaian hias		
7	Dekor huruf, Kaligrafi		
8	Daur Ulang barang bukan logam		
9	Daur Ulang barang plastik		
10	Barang Perhiasan Logam Mulia		
11	Konveksi/Sulam Bordir		
12	Aneka Anyaman		
13	Panel kayu		
14	Wood Working		
15	Pintu, Moulding		
16	Peti Kemas Kayu (Pallet)		
17	Rekaman/Video Shooting		
18	Penerbitan Tabloid		
19	Pembuatan Photo		
20	Percetakan		
21	Pembuatan Lilin Lampu		
22	Tepung Arak batok, Arang Kayu		
23	Furniture kayu/Kursi, Meja dll		
24	Furniture dari Rotan		
25	Moulding		

KPJU Unggulan : \*Industri Pengolahan: KPJU Agro.

Pengolahan Daging Sapi,

Pengolahan Kulit, Pengolahan Karet.

Pengolahan Kelapa Sawit,

Pengolahan Jagung,

Industri Hasil Perikanan/ Sentra Pengolahan hasil Laut.

Pengalengan Ikan.

Industri Logam,

Industri Tersier: Sentra Industri, Kawasan Industri Jorong

Tabel 4.36.3  
Sektoral Perdagangan (3)

No	KPJU	Skor Terbobot	Prospek PM
	Perdagangan		1/2/3/
1	Perdagangan Kelapa Sawit	0.155	
2	Toko Sembako	0.150	
3	Perdagangan Karet	0.138	
4	Kios Rokok	0.109	
5	Toko Klontong	0.091	
6	Jual Beli Ikan Segar		
7	Toko Pakaian Jadi		
8	Souvenir Khas Pantai		

9	Jual Beli Ikan Kering		
10	Kuliner Jagung		

Tabel 4.36.4  
Sektoral Hotel dan Restoran dan Pariwisata, (4)

No	KPJU	Skor Terbobot	Prospek PM
	Sektor Pariwisata, Hotel, Restoran		1/2/3/
1	Rumah Makan Banjar	0.184	
2	Warung Banjar	0.165	
3	Wisma	0.106	
4	Wisata Alam Pantai (Takisung, Batuimas, Swarangan, Muara Asam)	0.100	
5	Rumah Makan Lauk Pauk Ramadhan	0.094	
6	Rumah Makan Ikan		
7	Cottage		
8	Warung Angkringan		
9	Warung Kopi		
10	Wisata Alam Air Terjun		

Tabel 4.36.5

Objek Wisata Kabupaten Tanah Laut

No	Objek Wisata	Lokasi	Jenis Wisata	Akses dari Pusat Kota (Km)
1	Pantai Takisung	Kec. Takisung	Alam/Pantai	22
2	Pantai Batakan	Kec. Panyipatan	Alam/Pantai	40
3	Pantai Swarangan	Kc. Jorong	Alam/Pantai	41
4	Pantai Batu Lima	Kuala Tambangan, Takisung	Alam/Pantai	42
5	Air Terjun Bajuin	Sungai Bakar, Pelaihari	Alam	10
6	Air Terjun Balangdaras	Tanjung, Pelaihari	Alam	25
7	Air Terjun Hanindrai	Tanjung, Pelaihari	Alam	17
8	Air Terjun Habulu	Tanjung, Pelaihari	Alam	18
9	Gunung Kayangan	Ambungan, Pelaihari	Alam	6
10	Kawasan Goa Marmer	Sungai Bakar, Pelaihari	Alam	10
11	Goa Macan/Liang Babau	Tanjung, Pelaihari	Alam	19
12	Mina Tirta	Pusat Kota, Pelaihari	Alam	1
13	Tanjung Dewa	Kec. Panyipatan	Alam	40
14	Kerbau Rawa	Banua Raya, Bati-Bati	Alam	26
15	Benteng Belanda	Tabanio, Takisung	Sejarah	25
16	Pulau Datu Pamulutan	Tanjung Dewa, Panyipatan	Ziarah	38
17	Datu Insad	Sambangan, Bati-Bati	Ziarah	33
18	Taman Mina Tirta	Angsau, Pelaihari	Buatan	1
19	Taman Hutan Kota	Pelaihari	Buatan	1
20	Air Terjun Lalaran	Pemalangan, Bajuin	Alam	14
21	Bekantan	Swarangan, Jorong	Sungai	39
22	Bekantan	Panjaratan, Pelaihari	Sungai	15
23	Makam Keramat Istana	Karang Taruna, Pelaihari	Ziarah	6
24	Taman Kijang Kencana	Pelaihari	Buatan	1
25	Bumi Perkemahan	Sungai Jelai, Tambang Ulang	Agrowisata	9

(Sumber, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Tala, 2015)



Tabel 4.36.6  
Transportasi

No	KPJU	Skor Terbobot	Prospek PM
	Transportasi		1/2/3/
1	Truk Angkutan Barang (Ts 120)	0,196	
2	Angkutan Desa	0,155	
3	Angkutan Desa Pick Up	0,152	
4	Taksi antar Daerah Dalam Provinsi	0,141	
5	Gerobak Pasar	0,122	
6	Ojek Motor		
7	Mini Bus		
8	Transportasi Laut		

Tabel 4.36.7 Jasa Lain-Lain

No	KPJU	Skor Terbobot	Prospek PM
	Jasa		1/2/3/
1	Jasa Angkutan Sawit	0,178	
2	Jasa Angkutan Karet	0,129	
3	Jasa Angkutan Hasil Laut	0,116	
4	Bidan	0,110	
5	Bengkel Motor	0,097	
6	Tukang Bangunan		
7	Rental Mobil		
8	Salon Kecantikan		
9	Bengkel Mobil		
10	Tukang Kayu		

#### 4.10. KPJU Tidak Siap Ditawarkan

Tabel 4.37.  
Pertambangan

No	KPJU	Skor Terbobot	Prospek PM
	Pertambangan		Moratorium
1	Batubara	0,281	
2	Batu Gunung	0,180	
3	Biji Besi	0,166	
4	Emas	0,126	Belum siap ditawarkan
5	Galian Tanah Latrit	0,094	
6	Tanah Urug (Sirtu)		
7	Pasir		

(Dukungan Legal Opinion)

4.11. Deskripsi Manajemen Investasi : Data Eksisting Dan Rencana Data Perencanaan

4.11.1. Data Eksisting : Deskripsi PMDN dan PMA – Lintas Sektor

Investasi di Kabupaten Tanah Laut bertumbuh pada sektor primer, sekunder dan tersier.

**Tabel 4.38.**  
**Daftar PMDN**  
**Di Kabupaten Tanah Laut**

No	Investor/Jenis Usaha	Tahun Perijinan & Tahun Usaha	Rencana & Realisasi (Jt Rp)	Rencana dan Ralisasi Tenaga Kerja	Kategori
1	PT Cahaya Borneo SA/ Perkebunan Singkong/Ubi Kayu (Banjarbaru)	2005 & 2008	127.994,00 123.500,00	570 177	Produksi
2	PT Karya Batubara K Perdagangan, Distributor Utama Ekspor, Pembangunan Terminal & Pelabuhan Batubara (Jakarta)	2005	171.143,27		Konstruksi
3	PT Tantra Mining D Js Penunjang Pertambangan Umum & Perdagangan Ekspor (Banjarmasin)	2005	9.000	44	Konstruksi
	Rencana		308.137,00	948	
	Realisasi		123.500,00	177	

No	Investor/Jenis Usaha	Tahun Perijinan & Tahun Usaha	Rencana & Realisasi (Jt Rp)	Rencana dan Ralisasi Tenaga Kerja	Kategori
4	PT First International Gloves Industri pengolahan Karet (Medan)	2006 & 2010	701.000,00 527.416,95	6.035 105	Konstruksi
	Rencana		701.000,00	6.305	
	Realisasi		527.416,95	105	

No	Investor/Jenis Usaha	Tahun Perijinan & Tahun Usaha	Rencana & Realisasi (Jt Rp)	Rencana dan Ralisasi Tenaga Kerja	Kategori
5	PT CIS Resources Js penunjang Pertambangan Utama (batu Licin)	2007	18.000,00	12	Konstruksi
6	PT JAPFA Comfeed Industri pakan ternak (Jakarta)	2007	90.731,00 247.236,01	104 115	Produksi SP Perluasan
7	PT Semen Semeru K Industri Besi dan Baja (Jakarta)	2007	100.000,00 53.946,16	520 89	Konstruksi

8	PT Gawi Makmur K Perkebunan Kelapa Sawit Terpadu dengan Industri Minyak nabati dari nabati (Banjarmasin)	2007	550.000,00	182	Produksi
		2008	164.905,98	3.800	
	Rencana		738.731,00	818	
	Realisasi		446.088,15	4.000	

No	Investor/Jenis Usaha	Tahun Perijinan & Tahun Usaha	Rencana & Realisasi (Jt Rp)	Rencana dan Ralisasi Tenaga Kerja	Kategori
9	PT Haaparau Bumi A Jasa Pertambangan Umum (Banjbaru)	2011	58.000,00	70	Konstruksi
10	PT Sicrad Produce Tbk Pembibitan dan budidaya ayam ras pedaging dan petelor serta kegiatan rumah potong dan pengepakan daging ayam (Jakarta)	2011	850.094,00	168	Produksi Ijin Usaha Perluasan
11	PT Jakarta Jetset PS Js Penyewaan alat berat u pertambangan (Jakarta)	2011	155.000,00	15	Konstruksi
	Rencana		1.063.094,00	253	
	Realisasi				

No	Investor/Jenis Usaha	Tahun Perijinan & Tahun Usaha	Rencana & Realisasi (Jt Rp)	Rencana dan Ralisasi Tenaga Kerja	Kategori
12	PT Kalimantan PS Angkutan Laut domestik u barang. (Jakarta)	2012	141.966,54	155	Konstruksi
13	PT Indofood Sukses Makmur Industri Mie dan Produk sejenis . Bumbu masak & Penyedap masakan, produk Roti, dan kue, serta mesin u keperluan umum lainnya (Jakarta)	2012	234.332,77	50	Konstruksi
	Rencana		376.299,31	205	
	Realisasi				

No	Investor/Jenis Usaha	Tahun Perijinan & Tahun Usaha	Rencana & Realisasi (Jt Rp)	Rencana dan Ralisasi Tenaga Kerja	Kategori
14	PT Maritim Barito P Angkutan laut domestik khusus u barang (Banjarmasin)	2013	2.200.287	468	Konstruksi
15	PT maju Perkasa Indonesia Angkutan laut domestik khusus u barang ( Banjarmasin)	2013	35.000,00		Konstruksi
16	PT maju Perkasa Indonesia Industri Batubara Beton Rangan (Bati-Bati)	2013	15.000,00	25	Konstruksi
17	PT Indofood CBP SM Tbk Industri barang dan peralatan teknik /industri pengolahan gula lainnya bukan sirup dan industri produk makanan lainnya (Liang Anggang)	2013	20.746,00	6	Konstruksi
18	PT Sumber Proteindo S Pembibitan dan Ebudidaya ayam ras dan pedaging (Bati-Bati)	2013	14.350,00	50	Konstruksi
	Rencana		2.285.384,43	567	
	Realisasi				

**Tabel 4.39**  
**Daftar PMA**  
**DI Kabupaten Tanah Laut**

No	Investor/Jenis Usaha	Tahun Perijinan & Tahun Usaha	Rencana & Realisasi (Jt Rp)	Rencana dan Ralisasi Tenaga Kerja	Kategori
1	PT Asia Mineral Mandiri Js Penunjang pertambangan umum & Perdagangan besar/Ekspor (Bati-Bati)	2005	1.000,00	35	Produksi
	Rencana		1.000,00	35	
	Realisasi				

No	Investor/Jenis Usaha	Tahun Perijinan & Tahun Usaha	Rencana & Realisasi (Jt Rp)	Rencana dan Ralisasi Tenaga Kerja	Kategori
2	PT Ganesha Mineral Js Penunjang Pertambangan umum	2006	1.000,00	20	Konstruksi
3	PT Essar Indonesia Industri Logam dasar. Besi & Baja (Bekasi)	2006	1.450.000	2.100 452	Konstruksi
4	PT Istana Satwa Borneo Peternakan ayam (Balikpapan)	2006	4.064,00 4.064,00	44 36	Produksi SP Perubahan
	Rencana		1.455.064,00	2.164	
	Realisasi		4.064,00	488	

No	Investor/Jenis Usaha	Tahun Perijinan & Tahun Usaha	Rencana & Realisasi (Jt Rp)	Rencana dan Ralisasi Tenaga Kerja	Kategori
5	PT Chindo Berkat Mineral T Js Penunjang Pertambangan umum (Pelaihari)	2007	1.500.00	47	Konstruksi
6	PT Koft Pratama Js Penunjang Pertambangan umum (Jakarta)	2007	800.00	25	Konstruksi
7	PT Minearl Avenuc Js Penunjang pertambangan umum (Pelaihari)	2007	500.00	103	Konstruksi
8	PT Kencana Y M Js penunjang pertambangan umum (Jakarta)	2007	1.880.00	110	Konstruksi
9	PT Alam Indah Bintang Perdagangan Ekspor dan Import, Pembangunan dan Pengusahaan Kawasan Pariwisata (Bintan)	2007	92.000.00	345	Konstruksi SP Perluasan
	Rencana		96.680.00	583	
	Realisasi				

No	Investor/Jenis Usaha	Tahun Perijinan & Tahun Usaha	Rencana & Realisasi (Jt Rp)	Rencana dan Ralisasi Tenaga Kerja	Kategori
10	PT handy Royal Indonesia Budidaya & Industri olahan kering kepiting (Jawa Timur)	2008	1.000.00 477,60	264 44	Konstruksi
11	PT Hongyuan Mineral Js penunjang pertambangan umum & Perdagangan ekspor (Jakarta)	2008	11.000.00 1.050	126 60	Konstruksi
12	PT Bunutama Coal Js Penunjang Pertambangan umum & Perdagangan ekspor (Jakarta)	2008	1.000.00	10	Konstruksi Perubahan nama PT Miners Indonesia
13	PT Nava Bharat SC Js Penunjang Pertambangan umum & Perdagangan Ekspor (Jakarta)	2008	900.00 387.14	63 1	Konstruksi
14	PT Ecomas Jaya Js Pertambangan & Perdagangan Besar (Jakarta)	2008	600.00	15	Konstruksi Perubahan PMA (2008)
15	PT AH Resurces Js Penunjang Pertambangan & Perdagangan Besar (Banjarmasin)	2008		4	
	Rencana		14.500.00	467	
	Realisasi		2.414,74	109	

No	Investor/Jenis Usaha	Tahun Perijinan & Tahun Usaha	Rencana & Realisasi (Jt Rp)	Rencana dan Ralisasi Tenaga Kerja	Kategori
16	PT HMS BERHBAU Indonesia Js Pertambangan (Jakarta)	2009	4.300,00	15	Konstruksi
	Rencana		4.300,00	15	
	Realisasi				

No	Investor/Jenis Usaha	Tahun Perijinan & Tahun Usaha	Rencana & Realisasi (Jt Rp)	Rencana dan Ralisasi Tenaga Kerja	Kategori
17	PT Daneko Utama Js Pertambangan dan Perdagangan Besar (Jakarta)	2010	1.500,00	45	Konstruksi
18	PT GCC Service Indonesia Js Akomodasi Lainnya dan Js Boga (Jakarta)	2010	1.000,00		Konstruksi
19	PT Bumi Malindo Jaya Js Pertambangan dan Perdagangan Eksport (Jakarta)	2010	1.750,00	62	Konstruksi
20	PT Cassava Plantation Raya Industri ubi kayu (Jakarta)	2010	400,00		Konstruksi
21	PT Scan Steels Indonesia Industri besi, baja dasar, serta kabel (Jakarta)	2010	2.000,00	225	Konstruksi
22	PT Mineral General Malindo Js Pertambangan dan Perdagangan Besar (Jakarta)	2010	1.750,00	52	Konstruksi
23	PT Natural Resource TL Pertambangan (Jakarta)	2010	3.000,00		Konstruksi
	Rencana		11.400,00	478	
	Realisasi				

No	Investor/Jenis Usaha	Tahun Perijinan & Tahun Usaha	Rencana & Realisasi (Jt Rp)	Rencana dan Ralisasi Tenaga Kerja	Kategori
24	PT Equator Prima Sejati	2011	500,00	10	Konstruksi
25	PT IndoAsia Cemerlang Konstruksi Pertambangan batubara (Bogor)	2011	5.000,00	300	Konstruksi
26	PT CH Commodity House Pertambangan Biji Timah	2011	2.500,00	20	Konstruksi
27	PT Cahaya Borneo Sukses Perkebunan singkong & Industri Pati ubi kayu	2011	12.350,00	232	Konstruksi
28	PT Phupa Mining Js Pertambangan & Perdagangan Besar (Pelaihari)	2011	850,00	58	Konstruksi
29	PT Jiangsu Suny MI Pertambangan khususnya di bidang	2011	1.000,00	30	Konstruksi

	Pengangkutan dan Penjualan Batubara serta Perdagangan Besar (Jakarta)				
30	PT Cassava Borneo SP Pertanian Tanaman Umbi-umbian Palawija (Jakarta)	2011	10.000,00	610	Konstruksi
31	PT Bumiimas Agung Perkasa Js Pertambangan & Perdagangan Besar (Jakarta)	2011	2.500,00	20	Konstruksi
	Rencana		34.700,00	1.200	
	Realisasi				

No	Investor/Jenis Usaha	Tahun Perijinan & Tahun Usaha	Rencana & Realisasi (Jt Rp)	Rencana dan Ralisasi Tenaga Kerja	Kategori
32	PT Phupa Mining Pertambangan Biji Besi dan Perdagangan Besar (Pelaihari)	2012	5.255,00	55	Konstruksi
33	PT Pacific Energy Development Js Pertambangan dan Perdagangan (Jakarta)	2012	10.000,00		Konstruksi
34	PT Borneo Bersatu Pertambangan batubara (Jakarta)	2012	1.500,00		Konstruksi
35	PT Geosamudra Utama Js Penunjang Minyak dan Gas Bumi (Jakarta)	2012	1.200,00		Konstruksi
36	PT Yoesin Putera IW Js Pertambangan & Perdagangan Besar (Bandung)	2012	1.200,00	20	Konstruksi
	Rencana		19.155,00	75	
	Realisasi				

No	Investor/Jenis Usaha	Tahun Perijinan & Tahun Usaha	Rencana & Realisasi (Jt Rp)	Rencana dan Ralisasi Tenaga Kerja	Kategori
38	PT ACMER Jasa Pertambangan (Pelaihari)	2013	1.200,00	20	Konstruksi
39	PT Muliindo Feedmill Tbk Pembibitan dan Budidaya ayam ras pedaging (Jakarta)	2013	4.328,00	38	Konstruksi
	Rencana		5.528,00	58	
	Realisasi				

(Sumber, Profil Investasi Tala, 2015). Data akhir + an

Memasukan setiap PMDN, PMA yang eksisting ke dalam database management system dengan template:

No	Uraian	Keterangan
1	Lokasi	
2	Desa	
3	Kecamatan	
4	Kabupaten	
5	Provinsi	
6	Status Lahan	
7	No SK Tanggal	
	Luas Lahan	
	Status	
	Kuasa Lahan	
8	Kegiatan Investasi	
9	Proyeksi nilai investasi	

#### 4.11.2. Database Perencanaan Manajemen Informasi

**Manajemen investasi dilakukan dengan basis online. Pembuatan manajemen informasi dari hasil kajian Potensi Investasi Unggulan Kabupaten Tanah Laut. Isi Data base memenuhi kisi-kisi informasi:**

Dalam kebutuhan data untuk DBMS, Kajian dilakukan untuk mendapatkan data pendukung peluang investasi meliputi:

1. Peta administratif wilayah Kabupaten Tanah Laut.
2. Peta infrastruktur eksisting di daerah (terkait pengembangan potensi investasi di Kabupaten Tanah Laut)
3. Identifikasi awal terhadap peluang investasi daerah objek kajian dan pemetaan.
4. Komoditi unggulan dan program pengembangan daerah.
5. Ketersediaan lahan (untuk peluang investasi sektor primer)



6. Ketersediaan input (bibit) (untuk peluang investasi sektor primer)
7. Jumlah produksi yang terserap pada saat ini dan potensi pengembangan jika peluang pasar dan industrinya masih potensial (untuk peluang investasi sektor primer)
8. Pemasaran distribusi hasil panen eksisting (untuk peluang investasi sektor primer dan sekunder)
9. Jumlah produksi/bahan baku (untuk peluang investasi sektor sekunder)
10. Jumlah produksi/bahan baku yang terserap saat ini dan potensi pemanfaatannya jika masih ada yang tidak terserap (untuk peluang investasi sektor sekunder)
11. Pendataan terhadap potensi investasi yang ditawarkan pemerintah daerah objek kajian dan pemetaan
12. Pelaku usaha, kapasitas produksi dan peluang pasar
13. Perhitungan aspek keuangan/keekonomian terhadap peluang investasi yang ditawarkan
14. Sarana dan prasarana penunjang investasi diantaranya infrastruktur jalan, pelabuhan, bandara, air bersih, listrik, gas, telekomunikasi, kawasan industri, data tenaga kerja dan lain-lain.

## DATA MANAJEMEN INVESTASI-TANAH LAUT

<i>TIPE FILES</i>	<i>Data Dasar Profile Sektoral - KPJU-Potensial</i>	<i>Data Dasar Profile Sektoral - KPJU-Unggulan</i>	<i>Manajemen Investasi: Sektoral -KPJU Potensial (Template)</i>	<i>Manajemen Investasi: Sektoral -KPJU Prioritas (Template)</i>	<i>Manajemen Investasi: Sektoral - KPJU Siap Ditawarkan (Template)</i>
<i>MASTER FILES</i>	<i>Profile Kecamatan dengan Kelurahan dan Desa Dengan Sektoral KPJU .....</i>	<i>-Data Sektoral-KPJU - Unggulan/Kecamatan/Desa</i>	<i>Data Keterkaitan antar sector - KPJU -Potensial</i>	<i>KPS yang ditetapkan</i>	<i>Kelengkapan dokumen Pendukung Investasi</i>
<i>TRANSACTION FILES</i>	<i>Sektoral-KPJU Keioloan Pemerintah (SK/PD) Data sektoral-KPJU Potensial-Penawaran Potensial</i>	<i>Data Sektoral-KPJU- Unggulan Penwaran Prioritas</i>	<i>Data Cost Recovery /Investasi</i>	<i>Usulan Investasi (Proposal) Tahun bersangkutan (Pemerintah, PMA, PMDN)</i>	<i>-Dukungan Pemerintah dengan dokumen lelang Tim Pelaksana</i>
<i>HISTORY FILES</i>	<i>Data Realisasi - Penawaran Potensial Tahun N-1 .....</i>	<i>Data Sektoral-KPJU - Unggulan-Siap Ditawarkan</i>	<i>Data Studi Pendahuluan Sektoral-KPJU/Investor</i>	<i>Kelayakan Data Usulan Investasi (TOLSE)atas Pre-feasibility yang telah dilakukan &amp; Manajemen Resiko</i>	
<i>REFERENCE FILES</i>	<i>New Capitals dalam Manajemen Investasi dengan Pembangunan Global</i>	<i>Acuan: BKPM</i>	<i>Acuan: RPJMN; RPJMD; RENSTRA, RTRW</i>	<i>Acuan : Usulan terkait "usulan prioritas Program Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS)</i>	

(Data Rencana , DPMPSTP, 2019)

*DBMS: Baseline indicator Data historis terkait investasi dan leading sector /organisasi, dan data dalam hal yang terkait organisasi dan hal yang direncanakan telah dicapai)*

**Template:**

Hasil Analisis Peluang Investasi	
Objek yang ditawarkan	
Ketersediaan Bahan Baku	
Ketersediaan SDM yang kompeten	
Ketersediaan sarana dan prasarana	
Pasar jangka pendek dan jangka panjang	
Pasar Dalam Negeri dan Luar Negeri	
Keterlibatan Stakeholders UKM dan Pengusaha Skala Besar	
Keselarasn dengan Peraturan Perundangan (RIA)	
Keselarasn dengan aspek lingkungan	
Ketersediaan dan Status dan Kepemilikan Lahan	
Proyeksi investasi (Milyard)	
Hak atas Kekayaan Intelektual	
Kelayakan untuk ditawarkan kepada investor	

Hasil Verifikasi Faktual	
Objek yang ditawarkan	
Ketersediaan Bahan Baku	
Ketersediaan SDM yang kompeten	
Ketersediaan sarana dan prasarana	
Pasar jangka pendek dan jangka panjang	
Pasar Dalam Negeri dan Luar Negeri	
Keterlibatan Stakeholders UKM dan Pengusaha Skala Besar	
Keselarasn dengan Peraturan Perundangan (RIA)	
Keselarasn dengan aspek lingkungan	
Ketersediaan dan Status dan Kepemilikan Lahan	
Proyeksi investasi (Milyard)	
Hak atas Kekayaan Intelektual	
Kelayakan untuk ditawarkan kepada investor	Layak/tidak layak ditawarkan ke investor

**Data dan informasi dalam manajemen investasi diarahkan agar dapat menjawab pertanyaan dalam keputusan investasi di Tanah Laut. Model berikut dibangun untuk memberikan data dan informasi bagi calon investor terkait rencana investasi.**

MANAJEMEN INVESTASI : OUTPUT INFORMASI HUBUNGAN -PROSES-OUTPUT : KEPUTUSAN INVESTASI

- Identifikasi Masalah :
- Identifikasi Pengusulan Alternatif
- Identifikasi Pemilihan Keputusan:
- 1) Strategik: 2) Semi Berstruktur : 3) Berstruktur

Keputusan investasi dapat bersifat strategic, semi berstruktur, atau keputusan berstruktur bagi investor. Hal ini tergantung kapasitas dan karakteristik rencana investasi calon investor di Tanah Laut dibandingkan status mereka sebagai pelaku bisnis. Hal ini berlaku bagi calon investor dengan PMA dan investor dengan PMDN. Bagi pemerintah melalui mekanisme kerangka anggaran, keputusan belanja modal pembangunan (Belanja langsung) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, keputusan investasi adalah keputusan strategic.

**ANALISIS : pemanfaatan informasi DBMD dalam SIPID**

**Rancangan Paramater:**  
meliputi:

- Penyaji :
- Penerima :
- Teknologi Informasi :
- Karakteristik Informasi :
  
- Pos data :
- Format :
- Bentuk :
- Fokus :
- Orientasi :
- Dimensi waktu :
- Frekuensi :

(Sesuai Template : Penwaran Investasi Daerah)

**UNTUK TAHAP Komunikasi Informasi kepada Users**

**User dan penggunaan Informasi:**

- Identifikasi Masalah: Kelayakan Investasi Daerah
- Pengusulan Alternatif : Investasi (Model 1/2/3)
- Pemilihan Keputusan Investasi :

#### 4.12. Fasilitasi Manajemen Investasi Tanah Laut

Manajemen investasi Kabupaten Tanah Laut dijabarkan sesuai RPJMD, RTRW, Renstra SKPD, serta kebijakan pembangunan berkelanjutan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk setiap kebijakan dan bentuk investasi. Melalui Peraturan Bupati tentang Manajemen Investasi Daerah Kabupaten Tanah Laut diperlukan pemberian kemudahan pada Investor di daerah. Hal ini sesuai kebijakan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang menseleksi 42 kawasan industri di 10 provinsi dan 23 kabupaten/kota yang akan mendapatkan fasilitas kemudahan investasi langsung konstruksi tahap ketiga. Kebijakan terkait diberikan melalui Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM. Pertama untuk sector-KPJU konstruksi melalui kemudahan investasi langsung konstruksi (KLIK). KLIK merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah kepada investor setelah memperoleh pendaftaran investasi untuk dapat segera melakukan konstruksi sambil secara paralel mengurus perizinan di daerah dan perizinan pelaksanaan lainnya. KLIK merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.

Kebijakan lainnya terkait fasilitasi yang diperluas sehingga dapat mendukung upaya pemerintah mendorong percepatan realisasi investasi di Kabupaten Tanah Laut, antara lain:

**(1) Prosedur perijinan investasi yang sederhana dan akuntabel, transparan.**

Dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN, perijinan untuk memulai suatu usaha di Indonesia membutuhkan waktu yang lebih lama. Prosedur yang panjang dan berbelit tidak hanya mengakibatkan ekonomi biaya tinggi tetapi juga menghilangkan peluang usaha yang seharusnya dapat dimanfaatkan baik untuk kepentingan perusahaan maupun untuk kepentingan nasional seperti dalam bentuk penciptaan lapangan kerja. Investor akan diberikan layanan perijinan investasi yang dapat menjamin terlaksananya investasi dan usaha yang aman dan memberikan benefit.

**(2) Kuatnya kepastian hukum.** Ini tercermin dengan dukungan regulasi Penanaman Modal di Indonesia, yang memberikan dasar bagi penegakan hukum yang terkait dengan kinerja pengadilan niaga. Kuatnya kepastian hukum juga tercermin dari upaya birokrasi yang melayani secara terpadu dan

sau pintu. Berdasarkan pelaksanaan program desentralisasi mengakibatkan kesimpangsiuran kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kebijakan investasi dalam batas omnibus regulation dapat diatasi. Juga menghindarkan keragaman yang besar dari kebijakan investasi di daerah. Kesemuanya ini mendukung kejelasan kebijakan investasi daerah sesuai kebijakan nasional yang pada gilirannya akan meningkatkan minat investasi. Berdasarkan cara pandang "good governance", proses investasi harus terhindar dari biaya "tambahan atau pungutan liar" yang membebani investor.

(3) Penguatan insentif investasi. Upaya melembaga dilakukan dalam menyusun insentif investasi, termasuk insentif perpajakan, dalam menarik penanaman modal di Indonesia. Meskipun dengan tingkat pajak progresif yang diperkirakan relatif sama dengan negara-negara lain, sistem perpajakan di Indonesia sebagai bagian dari kebijakan perpajakan di daerah diarahkan dapat memberikan keringanan-keringanan perpajakan dalam upaya mendorong investasi.

(4) Implementasi Kualitas SDM, New Capitals, dan Penguatan infrastruktur. Tumbuh dan berkembangnya iklim investasi juga didukung oleh penguatan kualitas SDM dan infrastruktur. Hal ini menunjukkan aspek-aspek daya saing daerah. Implementasi daerah dengan New Capitals: Finansial, Human, Sosial dan relasi, Manufactur-berbasis teknologi, HaKI, dan Natural. Penguatan *new capitals* sebagai daya dukung modal untuk penguatan daya saing produksi (*supply side*) dan kapasitas dari sistem. Penguatan juga pada jaringan infrastruktur, karena dengan penguatan kapasitas infrastruktur akan berpengaruh pada menekan biaya distribusi yang pada gilirannya dapat memperkuat daya saing produk-produknya. Penguatan jaringan transportasi darat, dan menekan hadimya *bottleneck* di pelabuhan, dengan pembangunan pelabuhan Swarangan.

Dengan kekuatannya dalam jaringan nilai tambah (*value-added chain*) dari mulai *Research & Development* sampai pada pemasaran, aktivitas manajemen investasi di Kabupaten Tanah Laut diharapkan dapat eksis dan signifikan hadir pada pola perdagangan regional, nasional, dan global, terutama jaringan ekspor-impor (baik produk antara maupun final) dari dan ke negara-negara MEA. Fenomena ini mengindikasikan perlunya rumusan strategi dan kebijakan manajemen investasi di Kabupaten Tanah Laut, yang menyesuaikan dan mengamati perkembangan dalam konstelasi global.

## BAGIAN 5

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil deskripsi dan analisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Potensi investasi unggulan di Kabupaten Tanah Laut, sesuai kajian potensinya didasarkan selain aspek potensi sumberdaya alam yang tersedia, juga pada aspek-aspek potensi ekonomi yang lainnya seperti ketersediaan regulasi yang mendukung dalam peningkatan investasi, aksesibilitas, interaksi ekonomi sektoral melalui wilayah basis dan non-basis (melalui analisis LQ yang memiliki daya dukung dan analisis AHP), serta potensi sumberdaya manusia pengelolanya.
2. Peluang investasi dianalisis dengan analisis stakeholders dan lingkungan *new capitals* dalam menentukan investasi yang akan ditawarkan kepada investor. Terdapat aspek pertimbangan peluang investasi, yaitu (1) aspek ketersediaan bahan baku, (2) aspek SDM yang kompeten, (3) aspek ketersediaan sarana dan prasarana, (4) aspek pasar, baik jangka pendek maupun jangka panjang, (5) aspek pasar dalam dan luar negeri, (6) aspek keterlibatan stakeholder UKM dan pengusaha besar, (7) aspek kesesuaian dengan peranan regulasi dan perundangan yang berlaku (Regulatory Impact Assessment: RIA), (8) aspek lingkungan, dan (9) aspek ketersediaan dan status kepemilikan lahan, (10) Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).
3. Berdasarkan hasil analisis peluang investasi selanjutnya memberikan dasar kelayakan sector-KPJU untuk ditawarkan dalam paket investasi Kabupaten Tanah Laut. Kriteria kelayakan untuk sector-KPJU antara lain: Objek yang ditawarkan, ketersediaan bahan baku, ketersediaan SDM yang kompeten, ketersediaan sarana dan prasarana, pasar jenagka pendek dan pasar jangka panjang, pasar dalam negeri dan pasar luar negeri, Keterlibatan stakeholders UKM dan pengusaha skala besar, Keselarasan investasi dengan regulasi, keselarasan dengan aspek lingkungan (KLHS), ketersediaan dan status kepemilikan lahan, Terukur dalam proyeksi investasi-bisnis, pemenuhan HaKI.

4. Sesuai data kajian, KPJU yang potensial dan unggulan dijadikan sebagai KPJU yang ditawarkan dalam skema investasi daerah. Sektor-KPJU Potensial meliputi semua KPJU di Kabupaten Tanah Laut. Untuk sektoral-KPJU Unggulan sesuai analisis, menunjukkan jenjang prioritas investasi untuk: Sektor-KPJU Pertanian, Sektor-KPJU Industri (Pengolahan), Sektor-KPJU Perdagangan, serta Sub Sektor KPJU Pariwisata. Untuk KPJU Pertambangan karena alasan "Filtering" tidak siap ditawarkan.
5. Pertimbangan terakhir dalam kaitan peluang investasi yang ditawarkan adalah perkiraan besaran angka/ nilai investasi yang diperlukan. Besaran investasi tersebut berdasarkan perhitungan kebutuhan nilai investasi (PMDN, PMA) dan belanja modal pemerintah. Hal ini didasarkan dengan penyusunan rencana induk pengembangan, penyusunan *Detailed Engineering Design (DEL)*, penyusunan studi kelayakan dan amdal, Business plan, hingga pembangunan konstruksi dan sarana prasarana infrastruktur dasar yang menjadi focus tanggungjawab pemerintah.

## 5.2. Saran dan Implikasi

Dari kesimpulan di atas, maka dapat disarankan adalah:

1. Salah satu masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah menambahkan investasi modal, hal ini terkait dengan kebutuhan jenis dan besaran investasi, sehingga sering pula dikatakan masalah keterbelakangan adalah masalah kekurangan modal. Jika ada modal dan modal itu diinvestasikan secara produktif maka hasilnya adalah pembangunan ekonomi. Saat ini hampir di semua negara, khususnya negara-negara berkembang membutuhkan investasi sebagai modal. Investasi tersebut merupakan suatu hal yang dipandang semakin penting bagi pembangunan suatu negara, sehingga kehadiran investor nampaknya tidak mungkin dihindari. Oleh karena itu, yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa kehadiran investor ini sangat dipengaruhi oleh kondisi internal suatu negara, seperti stabilitas ekonomi, sosial politik, penegakan hukum, dan lain-lain.
2. Investasi atau penanaman modal sedianya memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor saja, namun juga bagi perekonomian negara tempat investasi itu ditanamkan. Dewasa ini banyak negara-negara yang menerapkan kebijakan kemudahan investasi yang bertujuan untuk meningkatkan masuknya investasi baik domestik ataupun modal asing. Hal tersebut dilakukan mengingat dampak positif kegiatan investasi akan menggerakkan kegiatan ekonomi negara,



menyediakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan output yang dihasilkan, serta menghemat devisa atau bahkan menambah devisa. Terdapat beberapa gambaran mengenai manfaat investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara dan kesejahteraan penduduk di dalamnya, sebagai berikut:

- a) Investasi akan menciptakan perusahaan-perusahaan baru, membuka lapangan kerja, memperluas pasar atau merangsang penelitian dan pengembangan teknologi lokal yang baru;
  - b) Investasi akan meningkatkan daya saing industri ekspor dan merangsang ekonomi lokal melalui pasar kedua (sektor keuangan) dan ketiga (sektor jasa/pelayanan); dan
  - c) Investasi akan meningkatkan pajak pendapatan dan menambah pendapatan lokal/nasional, serta memperkuat nilai mata uang lokal untuk pembiayaan impor.
3. Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah ini pada dasarnya merupakan upaya untuk menyajikan data dan informasi mengenai potensi-potensi dan peluang-peluang investasi yang dimiliki daerah (kabupaten/kota) yang menjadi lokus kajian. Atas dasar hal tersebut nantinya diharapkan akan memberikan kemudahan bagi publik, khususnya para calon investor, dalam mencari peluang-peluang investasi yang terbuka dan selanjutnya bisa menentukan pilihan dari berbagai alternatif peluang investasi yang ada tersebut.
  4. Pesatnya kemajuan dan perkembangan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia akibat aktifitas masyarakat yang terus berbenah dan membangun daerahnya, serta mengelola potensi sumber daya alam dan aset manusia yang dimilikinya, merupakan indikasi kuat terkait semakin terbukanya peluang-peluang investasi di daerah. Dengan adanya peta potensi dan peluang investasi daerah ini, maka diharapkan dapat semakin meningkatkan daya tarik investasi yang ada di setiap daerah.
  5. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut membuat daftar investasi sesuai template sektoral KPJU yang potensial dan unggulan dan memberikan informasi tentang aspek-aspek investasi, yaitu: format Hasil Analisis Peluang Investasi dan Format Hasil Verifikasi Faktual sesuai sektoral-KPJU. Pola penawaran investasi diklasifikasikan dalam (pola 1/2/3).
  6. Perlunya dibangun isi DBMS untuk SIPID, untuk setiap sector-KPJU yang siap ditawarkan ke dalam template:

Template:

**Hasil Analisis Peluang Investasi**

Objek yang ditawarkan	
Ketersediaan Bahan Baku	
Ketersediaan SDM yang kompeten	
Ketersediaan sarana dan prasarana	
Pasar jangka pendek dan jangka panjang	
Pasar Dalam Negeri dan Luar Negeri	
Keterlibatan Stakeholders UKM dan Pengusaha Skala Besar	
Keselarasn dengan Peraturan Perundangan (RIA)	
Keselarasn dengan aspek lingkungan	
Ketersediaan dan Status dan Kepemilikan Lahan	
Proyeksi investasi (Milyard)	
Hak atas Kekayaan Intelektual	
Kelayakan untuk ditawarkan kepada investor	

Template:

**Hasil Verifikasi Faktual**

Objek yang ditawarkan	
Ketersediaan Bahan Baku	
Ketersediaan SDM yang kompeten	
Ketersediaan sarana dan prasarana	
Pasar jangka pendek dan jangka panjang	
Pasar Dalam Negeri dan Luar Negeri	
Keterlibatan Stakeholders UKM dan Pengusaha Skala Besar	
Keselarasn dengan Peraturan Perundangan (RIA)	
Keselarasn dengan aspek lingkungan	
Ketersediaan dan Status dan Kepemilikan Lahan	
Proyeksi investasi (Milyard)	
Hak atas Kekayaan Intelektual	
Kelayakan untuk ditawarkan kepada investor	Layak/tidak layak ditawarkan ke Investor

A. Perlunya dibangun isi DBMS untuk SIPID, untuk setiap sector-KPJU yang telah eksisting ke dalam template:

Nama : Investor

No	Uraian	Keterangan
1	Lokasi	
2	Desa	
3	Kecamatan	
4	Kabupaten	
5	Provinsi	
6	Status Lahan	
7	No SK Tanggal	
	Luas Lahan	
	Status	
	Kuasa Lahan	
8	Kegiatan Investasi	
9	Bentuk Usaha	
10	Lini Bisnis	
11	Proyeksi nilai investasi	
12	Kinerja Investasi	

B. Untuk sektoral-KPJU berorientasi ekspor, Template dibuat dengan pemenuhan isi informasi berikut:

Kriteria	Uraian	Bobot
Direct Backward (jumlah industri hulu)		
Direct forward (jumlah industri hilir)		
Financial Benefit		
Economic Benefit		
Potensial Market Domestic		
Local		
Regional		
National		
Potential market Import Substitution		
Potensial Market Foreign Export		
Tantangan Utama: (0...5)		
Income Multiflier Effect- IM (EB/FB)		

Employment Multiplier Effect (< IM; > IM)		
Ketersediaan Infrastruktur Dasar		
Gov Intervention (RPJPN, RPJMN, RPJPD, RPJMD)		
Environment Effect (the lower cost better)		
Kesesuaian Lahan		
LQ Regional		
LQ National		
Ketersediaan Input		
Besarnya Pasar (lokal; Regional, Nasional; Substitusi Import, dan Eksport)		
Daya Tarik Investasi		
Besarnya Investasi		
Cukup (1-2) baik; baik (3); baik sekali (4-5)		

- C. Pemasaran investasi bersifat “**filtering & Priority**”, bermakna peran Pemerintah diperlukan untuk melakukan investasi pada sektoral KPJU yang menyangkut kebutuhan pangan, infrastruktur. Sementara PMDN dan PMA diorientasikan untuk sektoral-KPJU industri, termasuk industri tertier.

## DAFTAR REFERENSI

- Sard Ridwan, Pedoman Penyusunan RUPMP dan RUPMK, Direktur Perencanaan Industri Manufaktur, Sosialisasi Pedoman Arah Kebijakan Penanaman Modal, 2015
- Bank Indonesia, Profil dan Potensi Ekonomi Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, 2015
- ....., Prospek Perekonomian dan Strategi Pencapaian Target Pembangunan Kabupaten Tanah Laut, Musrenbang Kabupaten Tanah Laut, 24 Maret 2015
- Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016, 2015
- ....., Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2016 Provinsi Kalimantan Selatan, Musrenbangda Tanah laut, 24 Maret 2015
- Kasubdit Perencanaan Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka, Arah Kebijakan Penanaman Modal (RUPM), BKPM, 28 Nopember 2014, Banjarmasin
- RPJMD Kabupaten Tanah Laut (2013-2018), Disampaikan pada Evaluasi RPJMD Kabupaten Tanah Laut, Banjarmasin, Mei, 2014
- Kabupaten Tanah Laut, Profil Investasi Kabupaten Tanah Laut, tahun 2015
- Kabupaten Tanah Laut, Potensi Unggulan Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2015
- Potensi Unggulan Daerah, Kabupaten Tanah Laut, Tahun 2015
- Profil Investasi, Kabupaten Tanah Laut, Tahun 2014
- Profil Investasi, Kabupaten Tanah Laut, Tahun 2015
- Skenario Pembangunan Di Kecamatan Batu Ampar, Tanah Laut, Musrenbang RKPD Di Kecamatan, Pebruari 2016
- Skenario Pembangunan Di Kecamatan Panyipatan Tanah Laut, Musrenbang RKPD Di Kecamatan, 11 Pebruari 2016
- Skenario Pembangunan Di Kecamatan Bajuin Tanah Laut, Musrenbang RKPD Di Kecamatan, 26 Januari 2016
- Skenario Pembangunan Di Kecamatan Kurau Tanah Laut, Musrenbang RKPD Di Kecamatan, 28 Januari 2016
- Skenario Proporsi Anggaran Tahun 2016, DPPKA Kabupaten Tanah Laut, 2015

Buku Panduan, Pemanfaatan Peluang MEA. Kementerian Perdagangan RI dengan Disprindag Provinsi Kalimantan Selatan, 2016

---

**Regulasi:**

UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

UU Nomor 17 tahun 2007 Tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025

UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), 2015- 2019 (Perpres Nomor 2 Tahun 2015)

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012, tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)

Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan RUPMP dan RUPMK

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 Tentang RTRW Kabupaten Tanah Laut tahun 2016-2036

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017-2022

Surat Edaran Bupati Tanah Laut Nomor : 050.13/490/Bappeda/2018 Tentang  
Penyusunan Draft Rancangan Awal Renstra SKPD Tahun 2018-2023

Renstra DPMPPTSP 2018-2023

WEB:

[https://search.yahoo.com/search?ei=utf-8&fr=tightropetb&p=fasilitasi+investasi+daerah&type=Y61\\_F1\\_168069\\_070419](https://search.yahoo.com/search?ei=utf-8&fr=tightropetb&p=fasilitasi+investasi+daerah&type=Y61_F1_168069_070419)

[www.bappenas.go.id/.../bab-16matriks-investasi.doc](http://www.bappenas.go.id/.../bab-16matriks-investasi.doc)

[www.bkpm.go.id/images/uploads/lembaga/file...](http://www.bkpm.go.id/images/uploads/lembaga/file...)

<https://tanahlautkab.bps.go.id/publication.html>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018 Kabupaten Tanah Laut Dalam Infografis 2018, Katalog: 1103022.6301

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut, 2018, Tinjauan Perekonomian Kabupaten Tanah Laut, Katalog 91990216301, ISBN 978-602-639-953-3

**LAMPIRAN-LAMPIRAN POTENSI DAN PELUANG INVESTASI**

**(DATABASE-TEMPLATE-DEMPPTSP UNTUK SIPID BKPM)**

**Template:**

Sektoral-KPJU Pertanian: Pertanian/Tanaman Pangan (1.1.)

**-Potensial:**

Padi Varetas Pontianak
Ubi Kayu
Jagung Manis
Kacang Tanah
Kacang Hijau

**-Unggulan:**

No	KPJU	Skor Terbobot	Prospek PM
	Pertanian/Tanaman Pangan		1/2/3
1	Jagung Pakan Ternak	0,174	
2	Padi Unggul IR 42	0,172	
3	Padi Sibuyung	0,164	
4	Padi Siam Unus	0,151	
5	Jagung Tongkol 2	0,098	

Sektoral-KPJU Pertanian: Pertanian/Hortikultura (1.2)

**- Potensial:**

Bayam
Durian Lokal Siwaluh
Pisang Mas
Wortel
Kencur

**- Unggulan:**

No	KPJU	Skor Terbobot	Prospek PM
	Pertanian/Hortikultura		1/2/3
1	Semangka	0,235	
2	Cabai Rawit	0,130	
3	Pisang Manurun	0,130	
4	Seledri	0,095	
5	Jeruk Manis	0,086	



Sektoral-KPJU Pertanian: Perkebunan (1.3)

- **Potensial:**

Kelapa

- **KPJU-Unggulan:**

No	KPJU	Skor Terbobot	Prospek PM
	Perkebunan		1/2/3/
1	Kelapa Sawit	0,387	Negatif List
2	Karet PB 260	0,281	
3	Karet Jenis IR	0,263	

Sektoral-KPJU Pertanian: Peternakan (1.4)

- **Potensial:**

Kambing
Sapi Limosin
Ayam Buras Petelur
Ayam Buras Pedaging
Kambing Kacang

- **Unggulan :**

No	KPJU	Skor Terbobot	Prospek PM
	Peternakan		1/2/3
1	Sapi Bali	0,225	
2	Ayam Ras (Pedaging)	0,162	
3	Kerbau	0,106	
4	Sapi Putih (Ongole)	0,092	
5	Itik Alabio Petelur	0,088	

Sektoral-KPJU Pertanian: Perikanan (1.5)

- **Potensial:**

Ikan Nila (tangkapan sawah)
Ikan Otek (tangkapan)
Ikan Peda (tagkapan)
Ikan Gabus (tangkapan)
Ikan Tongkol

- **Unggulan**

No	KPJU	Skor Terbobot	Prospek PM
	Perikanan		1/2/3
1	Ikan Nila (tambak/kolam)	0,225	
2	Ikan Patin (tambak/kolam)	0,207	
3	Ikan Nila (keramba)	0,201	
4	Ikan Mas (keramba)	0,173	
5	Ikan Patin (keramba)	0,089	

Sektoral-KPJU Pertanian: Kehutanan (1.6)

- Potensial

No	KPJU	Skor Terbobot	Prospek PM
	Kehutanan		1/2/3
1	Kayu Gaiam	0,500	
2	Kayu Ulin	0,500	

Template: Sektor Industri –KPJU

Sektoral-KPJU Industri: Kelompok  
Industri Pangan (2.1.)

Potensial:

No	Komoditi	Potensial	PM
1	Pentol bakso		
2	Ikan Kering Asin, Ikan Asin Talang		
3	Udang beku dan Kodok Seger		
4	Ikan Rabuk/Abon haruan		
5	Saos Tomat		
6	Minyak kelapa/VCO		
7	Ice Cream, Pudding		
8	Tepung Beras		
9	Kue kering/Roti/Sejenis		
10	Pakan ikan ternak		
11	Gula merah		
12	Sirup/Glukose		
13	Mie basah/macaroni		
14	Pengolahan Kopi		
15	Pembungkusan The		
16	Es batu/Blok		
17	Kecap		
18	Tempe dan Tahu		
19	Susu tahu/Susu kacang kedelai*)		
20	Kacang-Kacangan		
21	Kerupuk		
22	Bumbu Masak		
23	Kue basah/Sejenisnya		
24	Telur Asin *)		
25	Pengemasan garam (Yodium)		
26	Petis kering		
27	Pembungkusan asam Jawa		
28	Pembungkusan Beras		
29	Snack Jagung		
30	Pembungkusan Kesumba		
31	Pembungkusan Mentega		
32	Pembungkusan Tepung Tapioka		
33	Keripik Singkong		
34	Minuman Air Mineral		
35	Penggilingan Padi (Rice Milling)		

**KPJU-Unggulan (Hasil FGD):**

\*Industri Pengolahan: KPJU Agro, Pengolahan Daging Sapi, Pengolahan Kulit, Pengolahan Karet, Pengolahan Kelapa Sawit, Pengolahan Jagung, Industri Hasil Perikanan/ Sentra Pengolahan hasil Laut, dan Pengalengan Ikan.

**Kelompok Industri Sandang (2.2)**

Potensial:

No	Komoditi	Potensial	PM:Jlh Investasi
1	Konveksi Gorden		
2	Pembungkusan Kapas		
3	Penjahitan Karung Goni		
4	Pakaian Jadi Rajutan		
5	Pembuatan Kasur, bantal, dll		
6	Konveksi Pakaian Jadi		
7	Jasa Binatu Pakaian, Karpas dll		
8	Jasa sandang lainnya		

**Unggulan: Kain sasirangan Si Arek Jangkung**

Kelompok Industri Kimia dan Bahan Bangunan (2.3.)

Potensial:

No	Komoditi	Potensial	PM:Jlh Investasi
1	Cat Untuk bahan bangunan		
2	Bedak/Kosmetik Tradisional		
3	Pembuatan Sabun		
4	Tawas & Kaporit		
5	Interior Rumah Tangga		
6	Room Caster plastik, Riber glos		
7	Lukisan dari Kaca		
8	Tajau dari Semen		

**KPJU-Unggulan: Gypsum, Batako/Bata Press, Bata Merah**

Kelompok Industri Logam dan Elektronik (2.4)  
Potensial/Unggulan

No	Komoditi	Potensial	Pot. Bk. Investasi
1	Pengecoran Besi		
2	Pagar, Pintu Teralis		
3	Pembuatan Parang dll		
4	Alat Pertanian dari Logam		
5	Bengkel Las & Bubut		
6	Alat dari Logam (Paku ) dll		
7	Roda kapal, dll		
8	Perabot Rumah tangga		
9	Kawat Harmonika		
10	Barang Logam Lainnya		
11	Balancing Turbo & Injection pump		
12	Bengkel Gergaji		
13	Pembuatan Sound Sistem		
14	Perbaikan Dinamo & Strom Accu		
15	Perakitan/perbaikan Dinamo		
16	Las Listrik & panel Listrik		
17	Chroom varnikel kendaraan		
18	Pembuatan kapal/Speed Boat		
19	Peralatan Kapal		
20	Reparasi Kapal		
21	Reparasi Sepeda		
22	Furniture Logam (bed dll)		
23	Alat Peraga Pendidikan		
24	Perbaikan kapal/Tongkang		
25	Furniture Logam (rak Piring)		
26	Barang Logam Lainnya		
27	Daur ulang barang dari logam		
28	Docking Kapal		
29	Js Perbaikan Mobil		
30	Js Perbaikan Sepeda Motor		
31	Service Barang Elektronik		
32	Peralatan Berbahan Aluminium		

Unggulan: Industri Logam,

Kelompok Industri Kerajinan (2.5)

No	Komoditi	Potensial	PAC/da Investasi
1	Pembersih Kaca dari bulu ayam		
2	sapu ijuk, Topi Purun		
3	Anyaman Purun		
4	Pembuatan sangkar burung		
5	Figura dari Kayu		
6	Merangkai bunga, Pakaian hias		
7	Dekor huruf, Kaligrafi		
8	Daur Ulang barang bukan logam		
9	Daur Ulang barang plastik		
10	Barang Perhiasan Logam Mulia		
11	Konveksi/Sulam Bordir		
12	Aneka Anyaman		
13	Panel kayu		
14	Wood Working		
15	Pintu, Moulding		
16	Peti Kemas Kayu (Pallet)		
17	Rekaman/Video Shoting		
18	Penerbitan Tabloid		
19	Pembuatan Photo		
20	Percetakan		
21	Pembuatan Lilin Lampu		
22	Tepung Arak batok, Arang Kayu		
23	Furniture kayu/Kursi, Meja dll		
24	Furniture dari Rotan		
25	Moulding		

KPJU-Unggulan:

- Industri Tersier: Sentra Industri, Kawasan Industri Jorong

## 2. Sektoral Perdagangan-KPJU

Potensial:

No	KPJU	Skor Terbobot	Prospek PM
	Perdagangan		1/2/3/
1	Perdagangan Kelapa Sawit	0,155	
2	Toko Sembako	0,150	
3	Perdagangan Karet	0,138	
4	Kios Rokok	0,109	
5	Toko Klontong	0,091	
6	Jual Beli Ikan Segar		
7	Toko Pakaian Jadi		
8	Souvenir Khas Pantai		
9	Jual Beli Ikan Kering		
10	Kuliner Jagung		

KPJU -Unggulan: Pasar Tradisional, Pasar Desa-Wisata (BUMDesa), Pasar Modern

## 3. Sektoral : Hotel dan Restoran - Pariwisata

Potensial :

- Hotel dan Penginapan di Kabupaten Tanah Laut
- Restoran (Makan-Minum)

Rumah Makan Ikan
Cottage
Warung Angkringan
Warung Kopi

Unggulan :

No	KPJU	Skor Terbobot	Prospek PM
1	Rumah Makan Banjar	0,184	
2	Warung Banjar	0,165	
3	Wisma	0,106	
5	Rumah Makan Lauk Pauk Ramadhan	0,094	

KPIU-Potensial: Objek Wisata Kabupaten Tanah Laut

No	Objek Wisata	Lokasi	Jenis Wisata	Akses dari Pusat Kota (Km)
1	Pantai Takisung	Kec. Takisung	Alam/Pantai	22
2	Pantai Batakar	Kec. Panyipatan	Alam/Pantai	40
3	Pantai Swarangan	Kc. Jorong	Alam/Pantai	41
4	Pantai Batu Lima	Kuala Tambangan, Takisung	Alam/Pantai	42
5	Air Terjun Bajuin	Sungai Bakar, Pelaihari	Alam	10
6	Air Terjun Balangdaras	Tanjung, Pelaihari	Alam	25
7	Air Terjun Hamindral	Tanjung, Pelaihari	Alam	17
8	Air Terjun Habuin	Tanjung, Pelaihari	Alam	18
9	Gunung Kayangan	Ambangan, Pelaihari	Alam	6
10	Kawasan Goa Marmar	Sungai Bakar, Pelaihari	Alam	10
11	Goa Macan/Liang Babau	Tanjung, Pelaihari	Alam	19
12	Mina Tirta	Pusat Kota, Pelaihari	Alam	1
13	Tanjung Dewa	Kec. Panyipatan	Alam	40
14	Kerbau Rawa	Banua Raya, Bati-Bati	Alam	26
15	Bemeng Belanda	Tabanio, Takisung	Sejarah	25
16	Pulau Datu Panulutan	Tanjung Dewa, Penyipatan	Ziarah	38
17	Datu Insad	Sambangan, Bati-Bati	Ziarah	33
18	Taman Mina Tirta	Angsau, Pelaihari	Buatan	1
19	Taman Hutan Kota	Pelaihari	Buatan	1
20	Air Terjun Lalaran	Pematangan, Bajuin	Alam	14
21	Bekantan	Swarangan, Jorong	Sungai	39
22	Bekantan	Panjaratan, Pelaihari	Sungai	15
23	Makam Keramat Istana	Karang Taruna, Pelaihari	Ziarah	6
24	Taman Kijang Kencana	Pelaihari	Buatan	1
25	Bumi Perkenihan	Sungai Jelai, Tambang Ulang	Agrowisata	9

Unggulan:

1	Wisata Alam Pantai (Takisung, Batulimas, Swarangan, Muara Asam)		
2	Gunung Kayangan		

Sub Sektor-KPJU Transportasi :  
Potensial

No	KPJU	Skor Terbobot	Prospek PM
	Transportasi		1/2/3/
1	Truk Angkutan Barang (Ts 120)	0,196	
2	Angkutan Desa	0,155	
3	Angkutan Desa Pick Up	0,152	
4	Taksi antar Daerah Dalam Provinsi	0,141	
5	Gerobak Pasar	0,122	
6	Ojek Motor		Potensi
7	Mini Bus		Potensi
8	Transportasi Laut		Potensi

KPJU-Unggulan: Pelabuhan Swarangan

Potensial: Jasa Lain-Lain

No	KPJU	Skor Terbobot	Prospek PM
	Jasa		1/2/3/
1	Jasa Angkutan Sawit	0,178	
2	Jasa Angkutan Karet	0,129	
3	Jasa Angkutan Hasil Laut	0,116	
4	Bidan	0,110	
5	Bengkel Motor	0,097	
6	Tukang Bangunan		Potensi
7	Rental Mobil		Potensi
8	Salon Kecantikan		Potensi
9	Bengkel Mobil		Potensi
10	Tukang Kayu		Potensi

- Tidak Siap Ditawarkan

Pertimbangan: Potensi/Unggulan/Moratorium

No	KPJU	Skor Terbobot	Prospek PM
1	Batubara	0,281	Moratorium
2	Batu Gunung	0,180	Potensi
3	Biji Besi	0,166	Unggulan
4	Emas	0,126	Belum siap ditawarkan
5	Galian Tanah Latrit	0,094	
6	Tanah Urug (Sirtu)		Potensi
7	Pasir		Potensi

(Dukungan Legal Opinion)



Lampiran Contoh untuk Template: Acuan

Template:

Hasil Analisis Peluang Investasi	
Objek yang ditawarkan	Kawasan Industri Jorong
Ketersediaan Bahan Baku	Ada di Kabupaten Tanah Laut (Kecamatan/Desa )
Ketersediaan SDM yang kompeten	SDM dan PTKD dan IMTA
Ketersediaan sarana dan prasarana	Kelayakan ketersediaan
Pasar jangka pendek dan jangka panjang	Captive market, Kawasan Pemasaran
Pasar Dalam Negeri dan Luar Negeri	Pasar local dan ekspor
Keterlibatan Stakeholders UKM dan Pengusaha Skala Besar	Kawasan dan Asosiasi, Kemitraan
Keselarasan dengan Peraturan Perundangan (RIA)	Ijin Prinsip, Ijin usaha, K.I. Master Plan, regulasi ketenagakerjaan
Keselarasn dengan aspek lingkungan	Kajian AMDAL
Ketersediaan dan Status dan Kepemilikan Lahan	Luas lahan dan kepemilikannya
Proyeksi investasi (Milyard)	.....
Hak atas Kekayaan Intelektual	..... (Industri pengolahan/formula produksi)
Kelayakan untuk ditawarkan kepada investor	Layak...../...../.....

Template:

Hasil Verifikasi Faktual	
Objek yang ditawarkan	Mendukung
Ketersediaan Bahan Baku	
Ketersediaan SDM yang kompeten	
Ketersediaan sarana dan prasarana	
Pasar jangka pendek dan jangka panjang	
Pasar Dalam Negeri dan Luar Negeri	
Keterlibatan Stakeholders UKM dan Pengusaha Skala Besar	
Keselarasan dengan Peraturan Perundangan (RIA)	
Keselarasn dengan aspek lingkungan	
Ketersediaan dan Status dan Kepemilikan Lahan	
Proyeksi investasi (Milyard)	
Hak atas Kekayaan Intelektual	
Kelayakan untuk ditawarkan kepada investor	Layak/ ditawarkan ke Investor

Pariwisata:

**Hasil Analisis Peluang Investasi**

Objek yang ditawarkan	Pengembangan Kawasan Wisata
Ketersediaan Bahan Baku	Ada di Kabupaten Tanah Laut (Kecamatan/Desa )
Ketersediaan SDM yang kompeten	SDM Pengelola (hulu ke hilir)
Ketersediaan sarana dan prasarana	Kelayakan ketersediaan
Pasar jangka pendek dan jangka panjang	Captive market, Kawasan Pemasaran
Pasar Dalam Negeri dan Luar Negeri	Wisatawan local dan luar negeri
Keterlibatan Stakeholders UKM dan Pengusaha Skala Besar	Kawasan dan Asosiasi, Kemitraan
Keselarasn dengan Peraturan Perundangan (RIA)	Ijin Prinsip, Ijin usaha, KI, Master Plan, regulasi ketenagakerjaan
Keselarasn dengan aspek lingkungan	Kajian AMDAL/KLHS
Ketersediaan dan Status dan Kepemilikan Lahan	Luas lahan dan kepemilikannya
Proyeksi investasi (Milyard)	.....
Hak atas Kekayaan Intelektual	.....
Kelayakan untuk ditawarkan kepada investor	Layak...../...../.....

**Hasil Verifikasi Faktual**

Objek yang ditawarkan	Mendukung
Ketersediaan Bahan Baku	
Ketersediaan SDM yang kompeten	
Ketersediaan sarana dan prasarana	
Pasar jangka pendek dan jangka panjang	
Pasar Dalam Negeri dan Luar Negeri	
Keterlibatan Stakeholders UKM dan Pengusaha Skala Besar	
Keselarasn dengan Peraturan Perundangan (RIA)	
Keselarasn dengan aspek	

lingkungan	
Ketersediaan dan Status dan Kepemilikan Lahan	
Proyeksi investasi (Milyard)	
Hak atas Kekayaan Intelektual	
Kelayakan untuk ditawarkan kepada investor	Layak ditawarkan ke Investor

**Contoh Template: Sektoral-KPJU Berorientasi Ekspor**

Kriteria	Uraian	Bobot
Direct Backward (jumlah industri hulu)		
Direct forward (jumlah industri hilir)		
Financial Benefit		
Economic Benefit		
Potensial Market Domestic		
Local		
Regional		
National		
Potential market Import Substitution		
Potensial Market Foreign Export		
Tantangan Utama: (0...5)		
Income Multiplier Effect- IM (EB/FB)		
Employment Multiplier Effect (< IM; > IM)		
Ketersediaan Infrastruktur Dasar		
Gov Intervention (RPJPN, RPJMN, RPJPD, RPJMD)		
Environment Effect (the lower cost better)		
Kesesuaian Lahan		
LQ Regional		
LQ National		
Ketersediaan Input		
Besarnya Pasar (lokal; Regional, Nasional; Substitusi Import, dan Ekspor)		
Daya Tarik Investasi		
Besarnya Investasi		
Cukup (1-2) baik; baik (3); baik sekali (4-5)		

Database -Template DMPTSP-Menuju SIPID-BKPM



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Brigjen H. Hasan Basry Kotak Pos 219 Banjarmasin 70123

Telp/Fax : (0511) 3305240

Laman : <http://lppm.ulm.ac.id>

Nomor : 88 /UN8.2/PP/2019  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Penerimaan Kerjasama dan Tim Kajian Potensi Investasi  
Unggulan Kabupaten Tanah Laut 2019

21 Februari 2019

Yth. Kepala DPM & PTSP  
Kabupaten Tanah Laut  
Pelaihari

Sesuai surat Saudara Nomor 800/119/DPMPTSP/2019, tertanggal 19 Pebruari 2019, Perihal Permohonan Kerjasama, untuk penelitian dan kajian terkait potensi investasi unggulan yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Kami menerima penyampaian permohonan kerjasama dimaksud. Berikut kami sampaikan tim pelaksana yang akan melaksanakan penelitian dan kajian dimaksud.

Untuk kelengkapan syarat kerjasama ini, kami juga sampaikan perlunya rancangan TOR yang mengatur ruang lingkup kegiatan, termasuk output kegiatan, dan selanjutnya SPK yang mendasari formalitas pelaksanaan kerjasama antara pihak DPMPTSP Kabupaten Tanah Laut dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat.

Semoga kerjasama ini dapat memberikan daya guna dan hasil guna bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam pembangunan. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih.



M. Ariel Soendjoto

NIP 196006231988011001

Tembusan:

1. Rektor ULM (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor Bidang Akademik ULM
3. Wakil Rektor IV, Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Humas ULM

Lampiran Surat Nomor : 88 /UN8.2/PP/2019  
Tanggal : 21 Februari 2019

**Tim Kajian Potensi Investasi Unggulan Kabupaten Tanah Laut 2019**

Pengarah/Penanggungjawab : Ketua LPPM ULM

Counterpart Tim : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tanah Laut

Tim Kajian & Penyusunan :

Ketua Tim/Team Leader : Dr. Syaiful Hifni, Drs. Ec. M.Si, Ak, CA

Anggota : Drs. Ec. H. Achmad Sayudi, M.Si, Ak, CA  
Chairul Sa'roni, SE, M.Si  
: Dr. H. Ichsan Anwary, SH, MH

Surveyor /Olah data : Wawan Gustiawan, SE  
Dheo Tegar Pratama, S.ST

